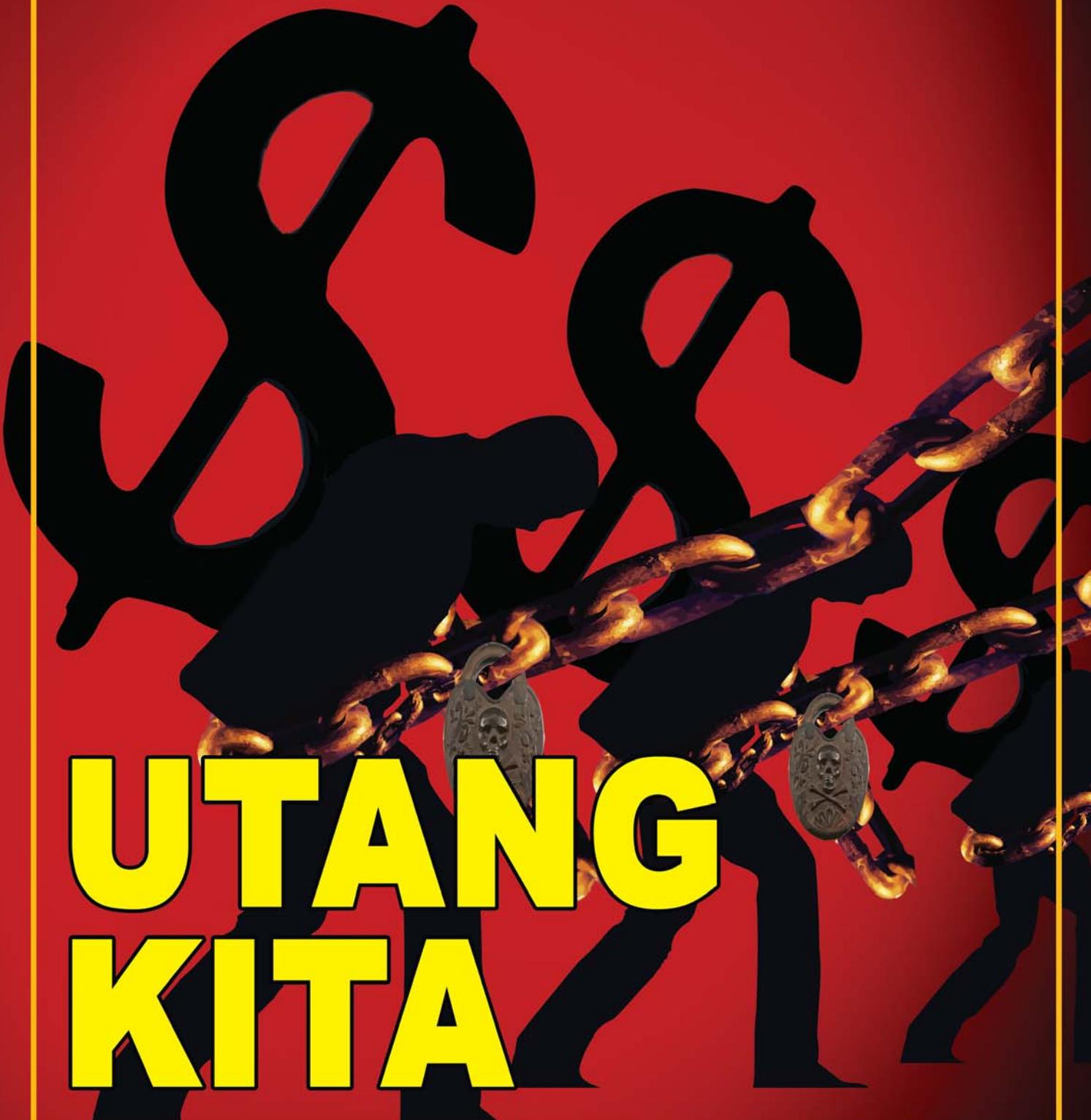


**FORMAT IDEOLOGI IDEAL GEMA MA**

# **BERITAINDONESIA<sup>®</sup>**

EDISI 78 TAHUN VI ★ 15 JULI - 15 AGUSTUS 2010

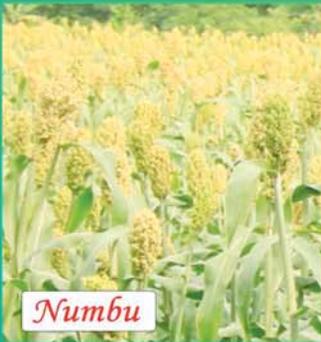
Rp 16.000 (Luar Jabodetabek Rp 17.500)



# **UTANG KITA**

Tersedia

# BIBIT SORGUM VARIETAS NASIONAL DI AL-ZAYTUN



Numbu

## VARIETAS : NUMBU

Umur : 105 - 110 hari

Harga :

1. Packing 5 kg : Rp. 100.000
2. Packing 1 kg : Rp. 30.000
3. Packing 250 gr : Rp. 15.000
4. Packing 100 gr : Rp. 10.000



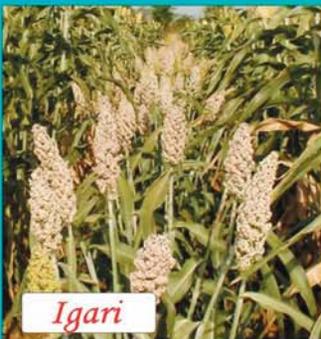
Kawali

## VARIETAS : KAWALI

Umur : 110 Hari

Harga :

1. Packing 5 kg : Rp. 100.000
2. Packing 1 kg : Rp. 30.000
3. Packing 250 gr : Rp. 15.000
4. Packing 100 gr : Rp. 10.000



Igari

## VARIETAS : IGARI

Umur : 75 - 80 hari

Harga :

1. Packing 5 kg : Rp. 100.000
2. Packing 1 kg : Rp. 30.000
3. Packing 250 gr : Rp. 15.000
4. Packing 100 gr : Rp. 10.000



Sampul  
desain: esero

Edisi No.78/Th.VI/15 Juli - 15 Agustus 2010

DARI REDAKSI ..... 4  
 VISI BERITA ..... 5  
 BERITA TERDEPAN ..... 6  
 BUNG WARTO ..... 8  
 HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA ..... 9

**BERITA UTAMA**

**MISKIN DAN BERUTANG HINGGA KIAMAT  
TIBA | 12**

Berutang untuk mengentaskan kemiskinan (memakmurkan rakyat). Benarkah? Atau hal itu hanya slogan! Kenyataan, utang kita (pemerintah Indonesia), baik utang luar negeri maupun dalam negeri, dari tahun ke tahun semakin membesar, dan kemiskinan pun masih terus membelenggu rakyat.



Utang Era Soekarno Sampai SBY ..... 17  
 Hentikan Sindrom Utang Luar Negeri ..... 18  
 Kebijakan Pengelolaan Utang ..... 20  
 Supaya Rakyat Tidak Makin Miskin ..... 21

**BERITA KHAS**  
 Ibu Ani untuk Bangsa ..... 24

**BERITA POLITIK**  
 Nasdem Vs Golkar ..... 26  
 Konfederasi Parpol ..... 28  
 TNI Ikut Memilih, Baikkah? ..... 29

**LENTERA**



**FORMAT IDEOLOGI IDEAL GEMA MA**

Kalau Generasi Muda Mathla'ul Anwar (Gema MA) menginginkan satu format ideologi yang ideal dalam menghadapi tantangan zaman harus merujuk pada ideologi negara. Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang mengemukakan hal itu dalam acara diskusi dan sharing Musyawarah Nasional (Munas) III DPP Generasi Muda Mathla'ul Anwar (Gema-MA) di Pusat Pengembangan Pemuda Nasional (PP-PON), Cibubur, Jakarta, Jumat 25 Juni 2010.....34

**BERITA HUKUM**  
 Habis Korupsi Terbitlah Teror ..... 30  
 Yusril Vs Hendarman ..... 31

**BERITA EKONOMI**  
 Kenaikan TDL Beban Rakyat ..... 32

**BERITA NASIONAL**  
 Tabung Gas Meledak, Salah Siapa? ..... 46  
 Pro Kontra Pemindahan Ibukota ..... 48

**BERITA IPTEK**  
 Teknologi Minimalis Meledaknya Tabung Gas .. 49

**BERITA PUBLIK**  
 Kepedulian Membangun Ekonomi Mikro ..... 50  
 Kapasitas Lintas, Optimalkan Pelayanan ..... 52

**BERITA TOKOH**  
 Zulkifli Zaini ..... 53  
 Mahfud MD ..... 53  
 Jakob Oetama ..... 53  
 Martha Tilaar ..... 53

**BERITA HUMANIORA**  
 Mengapa Masih Harus Merokok? ..... 54

**BERITA KESEHATAN**  
 Keluar dari Jurang Depresi ..... 56



**BERITA MANCANEGERA**  
 Menuju Afganistan yang Mandiri ..... 33



**BERITA DAERAH**  
 Bersihkan Purwakarta dari Pejabat Arogan ..... 58  
 Menjamu Benua, Menyongsong Erau 2010 ..... 59  
 Naik Pesawat Murah ..... 60  
 Berprestasi di Tengah Kesederhanaan ..... 61  
 Palembang Juara Umum Popda XI Sumsel ..... 62

**BERITA BUDAYA**  
 Menjaga Budaya Betawi dari Globalisasi ..... 63

**BERITA OLAH RAGA**  
 Spanyol Menoreh Sejarah ..... 64  
 Chris John Nyaris Gantung Sarung Tinju ..... 66

**PEMIMPIN UMUM:**

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

**PEMIMPIN REDAKSI:**

Ch Robin Simanullang

**REDAKTUR SENIOR:**

MYR Agung Sidayu

Imam Prawoto

Suryo Pranoto

**IN HEADNEWS (LIPUTAN, LITBANG & PUSDAT):**

Mangatur Loriecide Paniroy (Redaktur Eksekutif)

**REDAKTUR:**

Samsuri, Marjuka Situmorang, Dian Gina Rahayu

**SEKRETARIS REDAKSI**

Bantu Hotsan

**STAF REDAKSI:**

Nawawi, Ikhwan Triatmo, Sarjiman,

Doan Adikara Pudan

**WARTAWAN FOTO:**

Wilson Edward

**KARIKATURIS:**

FX. Ichida Sonny P

**KONTRIBUTOR:**

Syahbuddin Hamzah, Anis Fuadi, Chusnato,

Retno Handayani, Hator Sianipar

**DESAIN GRAFIS:**

ESERO Design, Arief Maulana

**BIRO REDAKSI:**

Medan: Bontor Simanullang, Humbahas: Parasian

Manalu, Palembang: Sri Windayani, Jawa Barat:

Ade Wiharyana (Kepala), Bernard Sihite, Tarakan:

Sudirman Leonard Pohan, Amerika Serikat: Mibsam

Bahanan (Maryland), Rukyhal Basri (Philadelphia)

**PENERBIT:**

PT Berita Satria Wiratama

Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia dan PT. Asasira

**KOMISARIS:**

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

**DIREKTUR/PEMIMPIN PERUSAHAAN:**

Ch Robin Simanullang

**WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN:**

Samsuri

**IKLAN DAN PROMOSI:**

Imam Prawoto, Dian Gina Rahayu

**KEUANGAN DAN UMUM:**

Mangatur Loriecide Paniroy

**SIRKULASI DAN DISTRIBUSI:**

Abdul Halim, Marjuka Situmorang, Bantu Hotsan

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:**

Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A Jakarta Selatan.

Telp. (021) 8292735, 8293113, 70930474

Fax. (021) 83787235

**E-MAIL:**

redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

**WEBSITE:**

www.beritaindonesia.co.id

**ISSN: 1907-977X**

MEREK: Ditjen HAKI Sertifikat IDM No. 000.108.028

**PERCETAKAN:**

PT Gramedia (Isi di luar tanggung jawab percetakan)



Suasana di dapur redaksi Berita Indonesia, Pemimpin Redaksi Ch Robin Simanulng memberi arahan kepada redaktur.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*  
Salam Sejahtera

Sidang Pembaca,

Pemerintah membuat utang untuk menyejahterakan masyarakat tidaklah masalah. Namun, berutang terus menerus sehingga sampai bertumpuk dari tahun ke tahun seperti yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia telah cukup mencemaskan. Sebab, dengan jumlah utang Indonesia sekarang ini, 230 penduduk Indonesia diperkirakan telah berutang Rp.7 juta per orang.

Manfaat utang yang kurang tepat, seperti hanya untuk menutupi defisit anggaran atau membayar cicilan utang dan bunganya yang telah jatuh tempo dianggap menjadi penyebab masalah. Jika terus dilakukan akan membuat bangsa ini masuk dalam perangkap utang permanent dan mungkin akan tetap miskin dan berutang hingga kiamat. Berdasarkan data Perkembangan Utang Negara (Pinjaman Luar Negeri & Surat Berharga Negara) Edisi Juni 2010 yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI, posisi utang Pemerintah pada Mei 2010 telah mencapai Rp.1.609,31 triliun. Dengan utang sebanyak itu, tentu membuat kita bertanya, sampai kapan Indonesia bergantung pada utang? Bagaimana supaya rakyat tidak tetap miskin. Ulasan selengkapnya mengenai utang tersebut dapat Anda baca di rubrik Berita Utama.

Dalam rubrik Lentera, kali ini kami menyajikan pandangan Syaykh mengenai ideologi negara yang disampaikan dalam acara diskusi dan sharing Generasi Muda Mathla'ul Anwar (Gema-MA) bertema: "Mencari Format Ideologi yang Ideal bagi Gema-MA Menghadapi Tantangan Zaman" yang dilangsungkan di Kantor Pusat Pengembangan Pemuda dan Olah Raga Nasional (PP-PON), Cibubur, Jakarta pada Jumat 25 Juni 2010.

Sementara rubrik Berita Nasional, kami mengangkat mengenai ledakan tabung gas yang belakangan ini semakin marak, serta wacana pemindahan ibukota negara.

Sedangkan *Berita Khas* kali ini kami angkat mengenai kegiatan keseharian ibu Negara, Ani Yudhoyono dalam mendukung pembangunan bangsa.

Masih banyak rubrik menarik lainnya yang bisa Anda baca. Seperti, Berita Mancanegara tentang tekad kemandirian Pemerintah Afganistan. Di Berita Hukum, kami mengangkat tentang korupsi dan teror yang membayangi para aktivis antikorupsi; Berita Kesehatan tentang depresi serta tips pencegahannya. Sedangkan bagi pecinta olah raga, kami sajikan berita tentang Spanyol yang membuat sejarah baru dalam PD 2010 serta tentang Chris John.

Selain itu, ada juga berita budaya, hiburan dan lainnya.

Akhir kata, kami ucapkan selamat membaca semoga Anda berkenan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

# Utang Kita

**U**tang kita (Indonesia), terutama utang luar negeri, baik utang pemerintah maupun swasta, sudah semakin besar. Berdasarkan data Perkembangan Utang Negara (Pinjaman Luar Negeri & Surat Berharga Negara), Edisi Juni 2010, yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI, Posisi Utang Pemerintah pada Mei 2010 telah mencapai Rp.1.609,31 triliun atau USD.175,31 miliar. Terdiri dari Pinjaman LN sebesar USD 63,46 miliar dan SBN sebesar USD 111,84 miliar.

Sementara berdasarkan data statistik, utang luar negeri yang dipublikasikan bersama oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, Volume I Februari 2010, total utang luar negeri Indonesia (pemerintah dan swasta) pada Desember 2009 telah mencapai USD 172.871 juta, ekuivalen Rp. 1.590,41 triliun dengan kurs Rp.9.200/USD.1).

Dalam data statistik tersebut, BI dan Kemkeu mendefinisikan utang luar negeri sebagai utang penduduk (*resident*) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada penduduk (*non resident*). Konsep terminologi utang luar negeri mengacu pada IMF's External Debt Statistic: Guide for compilers and Users (2003), beberapa ketentuan pemerintah RI dan Peraturan BI.

Besarnya jumlah utang luar negeri Indonesia itu, telah mencemaskan. Kendati pemerintah berusaha meyakinkan bahwa semakin tingginya nilai nominal utang itu tidak perlu dicemaskan. Karena ratio utang Indonesia terhadap PDB kini sudah berada dalam zona aman yakni 26 persen dari PDB.

Moody's Investors Service pada (21/6/2010) juga menaikkan peringkat utang Indonesia berdominasi rupiah dan mata uang asing dari stabil menjadi positif dengan level Ba3, atau satu level di bawah *investment grade* (level layak investasi). Sebagaimana dikutip Reuters Senin (21/6/2010), Moody's Investors Service menyebut dengan demikian Indonesia memiliki kapasitas yang kuat untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, stabilitas dan efektifitas keuangan dan kebijakan moneter.

Sebelumnya, Maret 2010, Standard & Poor's juga meningkatkan rating utang Indonesia berdominasi mata uang asing dua tingkat di bawah *investment grade*. Bahkan Januari 2010, Fitch Ratings telah meningkatkan rating Indonesia menjadi satu tingkat di bawah level layak investasi (*investment grade*).

Namun, justru gencarnya puja-puji ini yang perlu diwaspadai. Pemerintah boleh bangga dengan kenaikan peringkat ini. Tapi kita mendukung pernyataan Menkeu Agus Martowardojo dalam menanggapi hal ini, pemerintah harus semakin berhati-hati dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter.

Sebab naiknya peringkat utang tersebut juga bermakna bahwa Indonesia yang terus didorong lembaga dan negar-negara maju (kreditor) untuk melanjutkan ketergantungan meminjam (berutang), untuk membayar utang dan bunga yang jatuh tempo, tetapi bukan lagi pinjaman lunak (berbunga

rendah) melainkan dengan pinjaman komersial berbunga lebih tinggi. Sehingga, kenaikan peringkat utang ini bisa menjadi perangkap jika pemerintah tidak berhati-hati.

Pemerintah, maupun pihak swasta seharusnya lebih berhati-hati, jangan-jangan penawaran pinjaman luar negeri itu justru diskenarioikan untuk melanggengkan ketergantungan dan sekaligus mengeruk habis sumber daya alam Indonesia, sebagaimana telah terjadi selama ini.

Pemerintah maupun swasta jangan lagi selalu bangga menerima tawaran negara lain atau investor asing yang bersedia memberikan utang, tanpa peruntukan produktif. Jangan lagi ada proyek yang kurang dirasakan manfaatnya tetapi sengaja diada-adakan untuk menampung uluran dana utang. Apalagi bila pemberian pinjaman tersebut diembel-embeli persyaratan yang lebih menguntungkan lembaga atau negara kreditor dan merugikan Indonesia. Antara lain, seperti

terjadi selama ini, dipersyaratkan membeli barang produk dan jasa konsultan dari negara kreditor.

Sadar atau tidak, sesungguhnya ketergantungan kita pada utang telah mengakibatkan kedaulatan pengelolaan ekonomi Indonesia terampas. Kerap kali negara-negara kreditor, melalui Bank Dunia dan IMF, mengintervensi perumusan kebijakan ekonomi Indonesia, sesuai kepentingan mereka. Salah satu yang paling nyata dan berdampak luas adalah langkah IMF yang mendikte Indonesia memberlakukan ekonomi pasar bebas. IMF memaksa pemerintah Indonesia memprivatisasi BUMN serta menghapus subsidi secara total. Bahkan 'memaksa' Indonesia menetapkan kebijakan privatisasi BUMN itu dalam Ketetapan MPR. Bukankah hal ini telah membuat ke-

mandirian ekonomi Indonesia semakin rapuh yang pada gilirannya bermuara pada proses penyengsaraan rakyat banyak?

Karena itu, marilah kita hentikan sindrom kebijakan mencari pinjaman luar negeri itu, dengan menggalang kekuatan sendiri dan menegakkan kedaulatan ekonomi negara ini. Memang, pengurangan (penghentian) utang luar negeri, itu memerlukan pemimpin yang visioner dan punya integritas tinggi. Berani bersikap, jujur dan sungguh-sungguh anti-korupsi. Akan sangat sulit meninggalkan ketergantungan (ketagihan) berutang jika korupsi masih merajalela dan bahkan semakin canggih. Sebab korupsi telah membuat rakyat semakin sengsara yang pada gilirannya membuat mereka apatis.

Korupsi telah mengakibatkan kesiapan rakyat untuk berkorban, bekerja keras dan berpartisipasi semakin rendah. Termasuk dalam hal keikhlasan rakyat (terutama golongan menengah ke atas) membayar pajak. Padahal, kesadaran rakyat (golongan menengah ke atas) membayar pajak sangat diyakini akan mampu mengurangi ketergantungan pemerintah pada utang luar negeri. Hal ini akan bergerak, manakala pemerintah (Presiden) lebih visioner, jujur dan sungguh-sungguh anti korupsi. *Redaksi*





## Menegakkan Perda, Tidak Perlu Senjata Api

Keputusan Kemendagri mengeluarkan aturan Permendagri No 26/2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 6/2010 tentang Polisi Pamong Praja, khususnya Pasal 24 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Satpol PP dinilai tidak tepat. Hanya dipersenjatai dengan pentungan saja sudah banyak terjadi kekerasan antara Satpol PP dan masyarakat. Selain itu pemberian senjata api kepada anggota Satpol PP lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Karena bisa meningkatkan pertikaian antar sipil. Dengan adanya senjata di tangan Satpol PP, itu bisa meningkatkan agresivitas kekerasan. Pemberian senjata kepada satpol PP bisa kontraproduktif dengan tugasnya sebagai pengayom masyarakat. Mendagri seharusnya melakukan evaluasi agar keberadaan Satpol PP bisa dirasakan manfaatnya dan semakin dicintai masyarakat. Kita menolak Satpol PP diberi senjata saat bertugas, karena Satpol PP tidak memerlukan senjata api dalam penegakan perda. Yang diperlukan, pendekatan persuasif agar perda tersebut bisa diterima dan ditaati oleh masyarakat. Sementara itu mentalitas anggota Satpol PP juga harus diperbaiki. Dengan demikian, maka Satpol PP tidak perlu dipersenjatai untuk menakut-nakuti warga.

**Mila**

*Kukusan 22 Beji, Depok, Jabar  
jemeela\_22@plasa.com*

## Menyikapi Hak Pilih TNI di Pemilu 2014

Wacana memberikan TNI menggunakan hak pilih dalam pemilu, bagi sebagian masyarakat Indonesia akan susah diterima akal sehat. Seharusnya TNI tetap independen, sebagai penengah apabila ada masalah dalam negara ini. Sebagai organisasi yang diberi mandat untuk menggunakan senjata, akan sangat berbahaya apabila mereka tidak netral. Dan seharusnya pemerintah tidak usah pu-

sing-pusing untuk memikirkannya. Faktanya TNI secara tidak langsung, tetap netral. Seorang TNI memang tidak berhak memilih karena yang punya hak memilih adalah status individunya sebagai warga negara. Jadi kalau seorang anggota TNI ikut memilih dalam pemilu, itu murni mewakili dirinya sebagai orang biasa, warga negara Indonesia. Keprofesionalismenya sebagai institusi dan individunya akan menentukan tingkat ketralannya. Kemungkinan untuk menyalahgunakan jabatannya hanya karena ikut memilih dalam pemilu sangatlah kecil. Namun bila seorang TNI ikut aktif jadi anggota parpol atau ikut jadi kandidat dalam pemilu, tentu pengaruhnya bisa terasa jelas. Namun bisa tidaknya anggota TNI menggunakan hak pilihnya dalam pemilu maupun dalam Pilkada ditentukan oleh undang-undang yang dirancang oleh pemerintah bersama dengan DPR. Dan berbicara tentang hak asasi politik, militer di negara juga ikut memilih.

**Ronald Surbakti**

*Jl. Tebet Barat 1/19 Jakarta Selatan  
acay\_bogor@plasa.com*

## Berantas Korupsi Melalui Pendidikan Sejak Dini

Gerakan reformasi 1998 telah berhasil membuka keran kebebasan, yang juga semakin membuka lebar peluang korupsi. Kalau zaman Orde Baru korupsi harus lewat istana, sekarang semua pihak bisa ikut korupsi. Apalagi setelah desentralisasi kekuasaan otonomi dikeluarkan, korupsi semakin terdesentralisasi ibarat kanker stadium tinggi yang sudah mengerogoti tubuh bangsa. Korupsi sudah semakin parah, sehingga perlu upaya maksimal untuk membunuh perilaku korupsi bangsa ini. Yang dimulai dari segala bidang, baik politik, sosial, budaya, agama, dan lain-lain. Dan masing-masing harus segera berperan aktif menumbuhkan kesadaran bahwa perilaku korupsi bertentangan dengan norma-norma agama dan kemanusiaan.

Beberapa solusi alternatif untuk memberantas dan mengubah perilaku tindak pidana korupsi yakni dengan memberikan pendidikan yang memadai kepada generasi muda. Pertama, dimulai dari pendidikan anti korupsi dalam keluarga. Sebagai wadah pertama, keluarga memiliki peranan penting untuk memberantas korupsi. Keluarga bisa membentuk karakter anak sejak usia dini dan menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak di rumah. Kedua, dunia sekolah. Pendidikan karakter dan akhlak yang baik selama ini masih kurang mendapat penekanan dalam sistem pendidikan nasional sehingga

harus lebih ditekankan lagi. Mengingat tujuan dari pendidikan bukan hanya mengembangkan dimensi kognitif, tetapi juga dimensi afektif. Dengan memberikan pemahaman korupsi sejak usia muda diharapkan mereka akan bisa mengajak dan mewarnai lingkungan sekitarnya untuk berani dan bangkit melawan korupsi.

**Dini Kinanthi Putri**

*Jl. Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan  
dinikina@gmail.com*

## Hentikan Ledakan Tabung Gas

Korban jiwa akibat ledakan tabung gas di masyarakat semakin hari makin membengkak. Kerugian harta benda akibat ledakan tabung gas ukuran 3 kilogram yang diduga bermasalah juga sudah tidak terhitung. Di samping maraknya tabung gas palsu yang beredar di kalangan masyarakat dan lemahnya pengamanan tabung gas oleh instansi terkait, ledakan yang terjadi pun ditengarai karena kekurangmengertian masyarakat akan penggunaan tabung gas hasil kebijakan konversi minyak tanah ke gas elpiji itu. Dari peristiwa ledakan tabung gas yang terungkap, kecenderungan terus meningkat, hingga saat ini masih terjadi. Bahkan lebih tinggi dari ketika program konversi minyak tanah ke gas elpiji pada 2008 itu baru dilaksanakan. Padahal Kementerian ESDM dan Polri mengawasi secara ketat pabrik pembuat tabung gas dan aksesorisnya untuk memastikannya telah memenuhi standar nasional Indonesia (SNI). Sehingga tidak ada cara lain yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan institusi terkait, agar para pengoplos dan pemalsu tabung gas segera ditindak tegas karena dianggap melakukan tindak terorisme dengan menjual tabung gas bermasalah bagi masyarakat kecil yang tidak berdosa.

**Sumiartini**

*Jl. Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat  
sumiartini1983@gmail.com+++*

## Dekadensi Moral Jangan Sampai Jadi Awal Keruntuhan Bangsa

Ketenaran Nazriel Ilham atau Ariel Peterpan dan pacarnya Luna Maya benar-benar tedongkrak setelah skandal videonya merebak dimana-mana, bahkan menjadi bahan pemberitaan di koran umum paling bergengsi di Amerika Serikat, The New York Times, serta diwawancarai oleh CNN. Juga masuk berita terpopuler di situs majalah Time.com. Berita ini berada di posisi keempat berita terpopuler. Hanya kalah oleh fenomena kokain di kalangan kelas

menengah, pencemaran oli oleh British Petroleum dan Cina yang fokus garap pasar Afrika. Berita yang berjudul "Sex Video Scandal and Indonesia's Porn Obsession" memotret tentang obsesi pornografi orang-orang Indonesia yang semakin terbuka setelah Soeharto jatuh. Juga memuat kecemasan sejumlah kalangan terhadap merebaknya pornografi di Indonesia. Kepopuleran mereka sekaligus menjadi kemerosotan moral yang dimotori oleh artis tersebut. Masalah ini harus segera diselesaikan pihak berwajib. Jangan sampai dekadensi moral menjadi awal runtuhnya bangsa yang bermoral ini.

**Linda Surachman, SH**  
*Taman Cilandak, Lebak Bulus,  
Jakarta Selatan*  
[linda\\_surachman@yahoo.com](mailto:linda_surachman@yahoo.com)

### **Tetap Waspada terhadap Kegiatan Kelompok Teroris**

Berkurangnya aksi teroris di tanah air, karena Densus 88 terus gencar memburu dan mengejar para pelaku teror. Meski situasi kini mulai agak tenang pasca penangkapan sejumlah teroris di tanah

air dan dinilai sudah mereda. Namun kita tidak boleh terlena dan harus waspada karena aksi teror tidak bisa diprediksi kapan terjadi dan dimana. Dalam menyebarkan faham, kelompok teroris tidak lagi melakukan perekrutan melalui pengajian atau perkumpulan. Tapi juga menggunakan media internet untuk menyebarkan pesan-pesan mereka. Media dinilai paling efektif untuk menyebarkan pesan-pesan dan ajakan untuk melakukan teror. Untuk itu kita harus selalu waspada, meski kondisi negara kita sudah agak tenang dari aksi terorisme, terhadap aksi-aksi mereka. Terlebih lagi menjelang, peringatan HUT RI pada 17 Agustus mendatang. Informasi yang diperoleh dari Polri bahwasanya kelompok teroris akan melakukan teror kepada pemerintah (presiden dan para menteri) pada momentum tersebut. Oleh karena itu diperlukan kewaspadaan yang tinggi dari masyarakat guna mencegah aksi tersebut.

**Agung Wiratam**  
*Jl. Raya Margonda No. 274, Depok,  
Jawa Barat*  
[agungwt@yahoo.co.id](mailto:agungwt@yahoo.co.id)

### **Perlu Pengkajian UU Perlindungan Aktifis**

Wacana membuat Undang-Undang Perlindungan Aktifis yang diusung oleh sebagian masyarakat, terus bergulir pasca penyerangan aktivis ICW, Tama S Langkung. Memang saat ini belum ada undang-undang yang spesifik melindungi kerja aktifis. Namun jangan sampai aktifis gadungan atau yang menjual informasi ke pihak asing demi/untuk kepentingan kelompoknya dan merugikan bangsa dan negara masuk dalam UU perlindungan tersebut. Sebenarnya sudah ada UU yang cukup melindungi setiap orang Indonesia, termasuk aktifis, seperti pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sehingga ada dua alasan wacana UU tersebut tidak diperlukan. Pertama, hukum harus memihak terhadap semua orang. Kedua, UU akan mengalami kesulitan terkait definisi aktivis. Aktifis cukup dilindungi dengan aturan, memaksimalkan penegakan hukum guna melindungi masyarakat.

**Rizal Mappaseng, SH**  
[ribet\\_ledeng@plasa.com](mailto:ribet_ledeng@plasa.com)

## **Tempat Anda untuk Berlangganan Majalah BERITAINDONESIA**

Anda yang berada di luar Pulau Jawa dapat menghubungi alamat di bawah ini :

**BANDA ACEH** : BTN Ajuen, Lr Melati No. 118 Kec. Peukan Bada, Banda Aceh 23351. Tlp (0651)41093, **MEDAN** : Komplek Vila Palm Kencana Blok R No. 10 KM 12, Medan-Binjai 20351. Tlp (061)8460646, **SIANTAR** : Jl. Ramping No. 18, Pematang Siantar, **LABUHAN BATU** : Jl. Padang Bulan No. 28, Rantau Prapat. **KARO** : Jl. Sangab Enlau No. 51 Kaler Jahe. **RIAU** : Jl. Ababil No. 15B Rt 07 Rw. 07, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi Pekanbaru 28124, Riau. Telp (02761) 26578, **RIAU UTARA** : Perum Beringin Patra Gg. Poros No. 3 Rt 02/09, Bukit Datuk, Dumai 28825. Telp (0765)36219. **RIAU SELATAN** : Jl. Pattimura No. 28C Rt. 06/02, Kel. Skip Hilir, Rengat Timur, INHU, Riau. Telp (0769)21932, **RIAU KEPULAUAN** : Jl. Sri Pulau Gg. Kayu Manis No. 129W Rt. 03/02, Kel. Bengkalis Riau. Telp (0766)22924, **PADANG** : Jl. Pamancangan I No. 1Rt. 006/02 Kel. Pasar Gadang, Padang Selatan, Sum-Bar 25210. Telp (0751)27289, **JAMBI** : Jl. Depati Purbo, Komplek Karya Telawai Permai II No. 06 B, Kel. Pematang Sulur RT 16, Kec. Telanaijura, Kota Jambi. Telp 081366106709, **BENGKULU** : Jl. Kemang Manis No. 8 Rt. 08/Rw. 2, Kel. Sawah Lebar, Kec. Gading Cempaka, Kodya Bengkulu 38228. Telp (0736)20663, **PALEMBANG** : Perum Mas Karebet Blok A1 No. 15 Palembang 30154. Telp (0711)416545, **MUARA ENIM** : Perum Gunung Ibul Blok C2 No. 8 Kab. Prabumulih Sumatera Selatan Telp (0713)322420, **PANGKAL PINANG** : Achmad Effendi, Jl. Sriwijaya RT.001/001, Gedung Nasional, Taman Sari. **LAMPUNG** : Jl. Wiraswasta No. 23 Rt. 02 Lk. I Kel. Gedong Meneng, Kec. Kedaton, Bandar Lampung 35145. Telp (0721)701281, **KOTABUMI** : Jl. Jend. Sudirman No. 49 Kota Gapura Kotabumi Lampung Utara. Telp (0724)328369, **PONTIANAK** : Jl. Karimata No. 19, Kelurahan Sui Bangkong Pontianak 78116, **SINGKAWANG** : Jl. Pembangunan Gg. Sukaramah No. 27A Singkawang Kal-Bar, **SINTANG** : Jl. Imam Bonjol No. 54 Sintang 78611. Telp (0562)21544, **KETAPANG** : Jl. Kol. Sugiono No. 48 Ketapang, **BALIKPAPAN** : Jl. Sepinggan XI, Rt 33 No. 6, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kodya Balikpapan 76115. Telp (0542) 764365, **PASIR** : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 12 Rt. 05 Rw. 02 Tanah Grobot Kab. Pasir, Kal-Tim. Telp (0543)22335, **SAMARINDA** : Jl. Latsitarada III, Perum Bukit Indah Blok B No. 6, Kel. Sel Kunjang Samarinda. Telp (0541)273035, **BERAU** : Jl. SM Aminuddin No. 749 Tanjungredep Kab. Berau Kal-Tim. Tlp (0554)23130, **BANJARMASIN** : Komplek Kayu Tangi I No. 28 Rt. 45, Kec. Banjar Utara Banjarmasin 70123. Telp (0511)304396, **PALANGKARAYA** : Jl. Karanggan No. 1 Kelurahan Tanjung Pinang, Kec. Pahandut, Kodya Palangkaraya 73113, Kalimantan Tengah. Telp (0536)38958, **PANGKALAN BUN** : Jl. Perwira No. 1 Rt/Rw 05, Kel. Mendawai, Kec. Arsel, Pangkalan Bun Kal-Teng. Telp (0532)24452, **KAPUAS** : Jl. Seroja No. 2 Selat Dalam, Kuala Kapuas, Kal-Teng. Telp (0513)24082, **BUNTOK** : Jl. Ampah Buntok, No. 24 Rt. 40. Ampah, Barito Selatan, Kal-Teng. Telp (0622)31334, **MANADO** : BTN Nusantara Permai Blok C No. 11 Mapanget Barat, Manado 9524, **MAKASSAR** : Komplek Mangasa Permai Jl. Tallasalapang II Blok J1 No. 12, Makassar, Sul-Sel. Telp (0411)863655, **PAREPARE** : Jl. Wakke'e No. 5 Parepare Sul-Sel. Telp (0421)22785, **GOWA** : Jl. Syekh Yusuf V/I Gowa. Telp (0411)861661, **BONE** : Jl. Hussain Jeddawi Baru No. 9A, Bone, Sul-Sel. Telp (0481)2000041, **PALOPO** : Jl. Imam Bonjol No. 3 Palopo. Telp (0471)24310, **PALU** : Jl. Tulip II No. 1, Perumnas Balaroa, Palu, Sul-Teng. Telp (0451)460717, Fax. (0451)460717, E-mail: [ypi\\_calebaswusih@yahoo.com](mailto:ypi_calebaswusih@yahoo.com). **KENDARI** : Jl. A. Yani 204 Kendari, Telp (0401) 390913, HP. 081320696320 a/n. S. Edi Nurrahman. **BUTON** : Jl. MH. Thamrin No. 32A, **AMBON** : BTN Kanawa Indah Blok C-3 No. 12 Air Kuning, Ds. Batumerah Kodya Ambon, Maluku 97128. Telp (0911)310427, **TIMIKA** : Jl. Pendidikan No. 10, Desa Koprak Kopa, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika/Timika, Irian Jaya, **KUPANG** : Jl. Trikora No. 16 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Air Mata, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang NTT 85000, **BELU** : Perum Ray Belu Permai A/9, Belu. Telp (0389)22408, **MATARAM** : Jl. R. Suprpto No. 37 Ampenan, Kodya Mataram 83000. Telp (0370)632331, **LOMBOK** : Jl. Pejanggih No. 66 Pancor. Lombok. Telp (0376)21718, **SUMBAWA** : Jl. Hasanuddin Gg. Teratai, Sumbawa. Telp (0371)21070, **BALI** : Jl. Buana Raya Gg. Buana Kerti No. 3 Pd.Sambian Denpasar Barat 80117. Telp (0361)485890, **MALAYSIA** : 32 Jalan Tengku Ampuan Zabedah 9/A, 40100 Shah Alam, Selangor. Telp (03)55137009, **NEW ZEALAND** : Ikhwani Triatmo. **JAWA BARAT** : Ade Wiharyana, Jl. Purnawarman No.5, Bandung – **TARAKAN** : S.L. Pohan, Jl. Gereja Rt.17 No.59, Markoni, Tarakan - Kaltim 77121 – **PURWAKARTA** : Bernard Sihite, Kantor Perwakilan PWI, Jl. KK Singawinata No.23, Purwakarta, Tlp. (0264) 205081

# Rupiah Mau Dibawa Kemana

**Bank Indonesia (BI) memaparkan kajian tentang penyederhanaan dan penyetaraan nilai rupiah (redenominasi). Redenominasi merupakan pengurangan beberapa angka nol dalam rupiah dan penyederhanaan sistem akuntansi dalam sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.**

**P**ada hari Selasa (3/8) Pjs. Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution didampingi pejabat BI lainnya memaparkan kajian penyederhanaan dan penyetaraan nilai rupiah atau disebut dengan istilah Redenominasi. Bank Indonesia menilai mata uang rupiah sudah saatnya diredenominasi untuk menghindari kerugian yang bisa terjadi di masa depan akibat nilai transaksi yang semakin besar melampaui sistem penghitungan yang digunakan sekarang. "Benefit-nya lebih banyak dari biayanya dibanding kalau kita tidak mengubahnya," ujarnya.

Sementara itu, pengamat pasar uang, Krisna Dwi Setiawan mengatakan, Bank Indonesia (BI) tidak perlu melakukan redenominasi rupiah dalam upaya mengecilkan nilai tukar mata uang Indonesia.

"Redenominasi rupiah tidak perlu dilakukan, saya tidak merasa risih memegang rupiah dalam nominal yang besar. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan hal itu," katanya sesudah Bank Indonesia (BI) mengumumkan wacana redenominasi. Menurut dia, upaya redenominasi BI kemungkinan akan mengalami kesulitan, karena BI tidak dapat mengontrol harga barang, meski rupiah dapat dikontrol. Apabila nilai tukar rupiah mengecil apakah harga barang itu juga bisa mengecil, katanya.

Kekhawatiran mengenai penyesuaian nilai tukar rupiah dan harga barang ditanggapi Pjs Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dengan mengatakan pihaknya akan memberikan masa transisi bagi semua pihak ketika memberlakukan redenominasi. Kata Darmin, nantinya ada undang-undang (UU) yang mengatur redenominasi rupiah dan tambahan peraturan pemerintah (PP) dari instansi terkait untuk pelaksanaan teknis di lapangan. Misalnya ketika kebijakan ini diberlakukan, toko yang menjual barang dagangan membuat dua label harga barang untuk pecahan rupiah lama dan baru. Uang pecahan rupiah baru (hasil redenominasi) diberi cap (label) untuk membedakan uang rupiah lama. Jadi konsumen bisa membeli barang di toko dengan menggunakan rupiah lama dan rupiah baru.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan redenominasi agar tidak menimbulkan masalah secara ekonomi adalah penerapannya dilakukan saat



kondisi ekonomi stabil. Menurut Darmin, momen yang tepat untuk melakukan redenominasi adalah saat ini karena perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi baik dengan inflasi yang terkendali.

Guru Besar FEB UGM Prof Dr Nopirin MA setuju dengan pernyataan Darmin. Tapi, menurutnya Bank Indonesia juga perlu memperhitungkan dampak psikologis yang bisa muncul akibat penerapan redenominasi. "Masalahnya kan hanya persepsi seolah-olah kekayaan masyarakat itu turun, menyusut sehingga menimbulkan dampak psikologis. Kemarin saja ada beberapa orang nasabah bank yang mengganti rupiahnya menjadi dolar. Padahal kan ini baru wacana, tapi mereka sudah khawatirkan itu," terang Nopirin di Yogyakarta, (4/8/2010).

Kekhawatiran yang sama juga disampaikan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Bambang Soesatyo yang mengatakan inisiatif Darmin mewacanakan redenominasi rupiah saat ini sangat berbahaya. Dia menilai wacana tersebut berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Karena bisa disalahtafsirkan sebagai sanering atau pemotongan nilai uang. Bahkan, bukan tidak mungkin

deposan besar akan terdorong untuk tidak percaya lagi terhadap valuta rupiah.

Nopirin menambahkan, jika redenominasi benar-benar akan diberlakukan, perlu sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami bahwa yang dirubah itu nilai nominalnya bukan nilai riilnya, sehingga dampak psikologis ke masyarakat tidak ada.

Pjs. Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, sosialisasi redenominasi rupiah ke seluruh masyarakat akan dilakukan mulai tahun depan (2011). Sosialisasi ini diperkirakan membutuhkan waktu dua tahun hingga 2012. Sosialisasi juga bakal menyentuh aspek akuntansi atau pencatatan di seluruh instansi pemerintah maupun swasta. Proses redenominasi rupiah baru bisa dilakukan mulai 2013. Darmin juga mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu resah dengan rencana redenominasi. Redenominasi hanya penyederhanaan penyebutan satuan harga atupun nilai mata uang. "Misalnya, seribu rupiah (Rp.1000) akan menjadi satu rupiah (Rp 1), sedangkan satu juta rupiah (Rp 1.000.000) menjadi seribu rupiah (Rp.1000)." Tapi, nilai uang sebelum dan sesudah redenominasi sama," jelasnya. ■

## KA Logawa Terguling

**29/6** - KA Logawa jurusan Purwokerto-Jember terguling di kawasan hutan jati Wilangan. Tepatnya di Dusun Petung, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Kamis (29/6) sekitar pukul 14.30 WIB. Menewaskan 6 orang penumpang dan 73 orang menderita luka-luka. Menurut Wakil Kepala Daop VII Madiun Nur Amin, kecelakaan terjadi karena saat kejadian posisi kereta menikung tajam sehingga gerbong paling belakang, yakni gerbong 9, 10, dan 11 terlempar dari bantalan rel, lalu terguling. Sementara menurut penyidik KNKT, Whosep Muktamar, timnya menemukan sejumlah informasi awal penyebab kecelakaan, terkait dengan kecepatan kereta, kondisi rel yang patah, dan klem beberapa bantalan rel yang diduga hilang. Sabtu (3/7) seluruh gerbong kereta akhirnya selesai dievakuasi.

## HUT Ke-64 Polri Dihiasi Karikatur Celengan Babi

**01/7** - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali diuji oleh beberapa kritik atau masukan dari pihak lain. Di tengah HUT Ke-64 Polri (1/7/2010), Korps Bhayangkara itu mendapat kritikan dari media melalui pemberitaan Majalah *Tempo*. Majalah edisi 28 Juni-4 Juli 2010 itu tampil dengan pemberitaan

soal transaksi mencurigakan dalam rekening sejumlah perwira Polri. Sampul majalah itu menampilkan sebuah karikatur yang menggambarkan seorang perwira polisi memegang tali yang mengikat tiga celengan (tempat menyimpan uang) babi dengan judul laporan utama: Rekening Gendut Perwira Polisi.

Mendapat kritikan demikian, Mabes Polri merasa tersinggung. Sehingga korps baju cokelat itu pun sempat berencana mengajukan gugatan perdata dan pidana terhadap *Tempo*. Namun dengan pertimbangan tertentu, masalah itu akhirnya diselesaikan dengan jalan damai.

## Rapor Merah KIB II

**08/07** - Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto melaporkan hasil evaluasi UKP4. Hasil evaluasi yang ia paparkan di rapat kabinet paripurna, Kamis (8/7) itu menyebutkan, kinerja beberapa kementerian dan lembaga tergolong mengecewakan. Menurutnya, rapor paling merah di antaranya adalah Bakorsurtanal, BNPB, Kominfo, PU dan KemenkumHAM.

Kementerian atau lembaga digolongkan mengecewakan bila gagal melaksanakan lebih dari 50% sub rencana aksinya dalam 6 bulan sejak penerbitan

Inpres I/2010 yang mengesahkan program prioritas dari masing-masing kementerian dan lembaga pada Februari 2010 silam. Jadi, evaluasi kali ini merupakan tahap awal. Masih ada evaluasi berikutnya pada 6 bulan ke depan.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden SBY hanya memberi dorongan kepada kementerian berapor merah itu agar segera melakukan koreksi sehingga kinerja mereka bisa lebih cepat. Sementara kementerian dan lembaga yang mendapat rapor merah itu mengaku lebih termotivasi dalam bekerja serta berjanji akan bekerja lebih giat.

## Din Syamsudin Terpilih Keduakalinya

**08/07** - Untuk kedua kalinya, Din Syamsudin kembali terpilih menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 dalam Muktamar Muhammadiyah ke-46 yang bertempat di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya, Din juga menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk periode 2005-2010 setelah terpilih dalam Muktamar ke-45 di Malang pada tahun 2005 lalu.

"13 nama Ketua PP, akhirnya menyetujui Din Syamsuddin yang kebetulan pada pemilihan kemarin mendapatkan suara terbanyak untuk menjadi

## Karikatur Berita



Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2010-2015,” kata Ketua Panitia Pemilihan, Rosyad Saleh. Kemenangan Din disambut baik oleh seluruh peserta muktamar. Selain Dalam kesempatan itu, juga diputuskan Agung Danarta sebagai sekretaris umum PP Muhammadiyah untuk 5 tahun ke depan.

## Ekspor Perikanan RI masih Ditolak Eropa

**09/07** - Hingga Juli 2010, Indonesia menghadapi enam kasus penolakan ekspor perikanan Ke Uni Eropa. Menurut Direktur Sertifikasi dan Akreditasi Perikanan Nazori Djazuli, penolakan tersebut terjadi karena ditemukannya kasus logam berat pada ikan tuna, marlin dan swordfish, serta satu kasus histamin (suhu drop), dan satu kasus labeling.

Dengan penolakan itu, Indonesia menempati urutan ke-12 dari deretan negara-negara yang ekspor ikannya ditolak di Uni Eropa. Namun demikian, dibandingkan dengan negara pesaing, Indonesia masih terhitung kuat. Vietnam misalnya, menempati posisi ke tiga dengan 19 kali penolakan, dan China di urutan keempat dengan 10 kasus penolakan.

## SBY Jenguk Aktivis ICW

**10/07** – Tama Satrya Langkun, aktivis ICW (Indonesian Corruption Watch) dianiaya oleh 4 orang tak dikenal di daerah Duren Tiga Jakarta Selatan Kamis, 8 Juli 2010 sekitar pukul 03.45

WIB. Akibatnya, Tama menderita memar di beberapa bagian tubuh, luka benda tumpul di tangan, serta luka bacokan dengan 29 jahitan di kepala. Tama pun harus menjalani perawatan di RS Asri, Jalan Duren Tiga Raya, Jakarta Selatan.

Ada dugaan, kekerasan terhadap Tama ini berkaitan dengan keterlibatannya sebagai salah satu pelapor kasus rekening mencurigakan milik sejumlah perwira tinggi Polri ke KPK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Insiden percobaan pembunuhan itu sangat disesalkan oleh sejumlah pihak termasuk Presiden SBY dan pejabat lembaga negara lainnya. Menunjukkan simpati serta dukungannya, Presiden SBY pun mendukung Tama di RS Asri Sabtu (10/7) serta meminta Kapolri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Sementara itu, aktivis LSM yang tergabung Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan, mengancam keras penganiayaan fisik, baik terhadap Tama maupun aktivis prodemokrasi lainnya. Setelah menjalani perawatan selama 5 hari, Tama akhirnya meninggalkan rumah sakit pada hari Selasa (13/7).

## UKM Tumpuan Pertumbuhan 7,7%

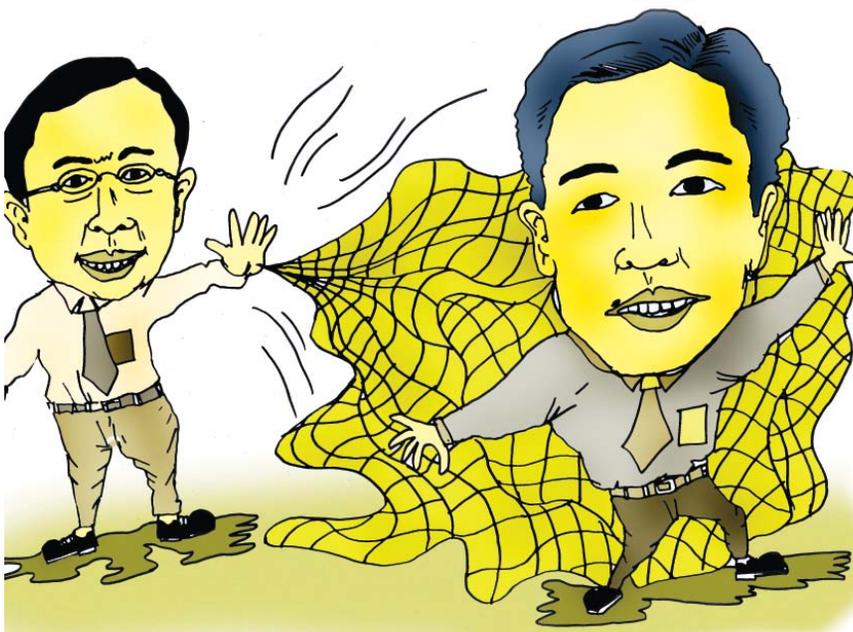
**16/7** - Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan Optimis sektor koperasi dan UKM akan menjadi tiang ekonomi rakyat paling kuat di Indonesia. Dengan cara meningkatkan promosi untuk

mendorong produk UKM. Selain menajaring transaksi kegiatan promosi, pameran tersebut diharapkan dapat mengetahui sejauh mana kualitas masyarakat, sudah bisa diterima atau belum akan produk-produk tersebut. Ketika melakukan pembukaan Smesco UKM Festival 2010 Ke-8 di Gedung Smesco, Jalan Gatot Subroto (14/7), Syarif mengatakan pemerintah akan terus bertumpu pada sektor koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagai penentu tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,7 persen pada akhir 2014.

## Indonesia Peringkat 6 IBO

**21/7** - Untuk pertama kalinya, Indonesia mendapatkan prestasi gemilang dalam Internasional Biology Olimpiade (IBO) ke-21 di Changwong, Korea Selatan. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan tiga medali perak dan satu perunggu. Namun pelajar Indonesia dapat meraih prestasi membanggakan yang berhasil mendapatkan 2 emas dan 2 perunggu. Emas diraih Irfan Haris dengan (SMAN 1 Pringsewu Lampung); Harus Reza Sugito (SMAK BPK Penabur Jakarta). Sedangkan medali perunggu diraih Danang Crysnanto (SMAN 1 Wonogiri); Thriq Salafari dari MAN Insan Cendikia Serpong. Dari 60 negara yang berprestasi, Indonesia menduduki posisi enam dunia, melalui Irfan Haris dan Harus Reza Sugito menduduki posisi 10 dunia.

## Karikatur Berita



## Menhan AS: Puas dengan Reformasi TNI

**22 /7** - Melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Robert Gates, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat akan melakukan kerja sama bidang pertahanan dengan melibatkan Kopassus. Pada saat itu juga, Gates menyatakan puas dengan reformasi TNI satu dekade ini. Hal itu yang menjadi pertimbangan AS untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia. Gates mengatakan kerjasama ini merupakan langkah awal dalam batas-batas hukum Amerika Serikat dan tidak ada tanda penurunan pentingnya hak asasi manusia dan akuntabilitas. "Selain itu, kemampuan kita untuk mengembangkan langkah-langkah awal akan tergantung pada aplikasi lanjutan atau reformasi dalam Kopassus dan TNI secara keseluruhan," ujar Gates.

## 9 Juta tabung gas 3 Kg non-SNI akan ditarik

**28/07** - Insiden ledakan tabung gas yang terjadi, membuat pemerintah berencana menarik 9 juta tabung gas 3 Kg yang tidak memakai standar nasional Indonesia (SNI). Menurut Agung Laksono, sebanyak 9 juta dari 45 juta tabung gas 3 Kg yang beredar saat ini merupakan tabung yang diimpor, dan dibuat dengan standar Australia dan Jepang yang sudah memenuhi persyaratan mutu. Namun yang belum bersandar SNI tetap akan ditarik dan tidak

boleh diedarkan. Sehingga jika ditemukan di pasar harus dilakukan penarikan.

## Empat Lembaga Akan Bisa Sidik Rekening Mencurigakan

**1/8** - Untuk menindaklanjuti hasil analisis transaksi keuangan yang mencurigakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak lagi hanya bergantung kepada Polri dan Kejaksaan Agung. Dalam RUU PPATK yang sedang dibahas di DPR, hasil temuan itu bisa ditindaklanjuti oleh empat lembaga yaitu, KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan BNN. Bahkan menurut Ketua PPATK Yunus Husein, tidak tertutup kemungkinan Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak juga bisa meminta laporan dari PPATK. Dalam UU PPATK yang berlaku saat ini, disebutkan bahwa lembaga pencegah tindak pencucian uang itu hanya bisa memberikan laporan kepada Polri dan Kejaksaan.

Sementara itu, Yunus sangat menyayangkan kewenangan yang sepatutnya dimiliki PPATK memanggil pemilik rekening mencurigakan dan memblokir rekening yang mencurigakan dipangkas dewan. DPR menghendaki, PPATK harus meminta bantuan Polri bila hendak memblokir rekening.

## Kapolda Jateng Intervensi final Piala Indonesia

**2/8** - Liga final Piala Indonesia 2010 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, (1/8/2010) diwarnai intervensi Kapolda

Jawa Tengah, Irjen Alex Bambang Riatmodjo yang meminta mengganti wasit pemimpin pertandingan Jimmy Napitupulu, karena Jummy dinilai tidak adil dalam memimpin pertandingan. "Kalau wasit tidak adil akan berpengaruh pada penonton, apalagi dalam jumlah sebanyak ini. Keamanan bisa kami jamin, tapi kalau wasitnya tidak adil kan bisa repot," kata Alex Bambang. Namun demikian Jimmy menolak permintaan Kapolda itu. "Piala Dunia antara Jerman lawan Inggris. Inggris membuat gol tapi tidak disahkan oleh wasit. Diganti nggak wasitnya? Ada polisi intervensi? Tidak ada" kata wasit terbaik nasional itu.

## 39 Persen BLK Memprihatinkan

**4/8** - Pemetaan yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) terhadap infrastruktur dan fasilitas 208 balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah daerah menemukan sebanyak 39 persen BLK dalam kondisi jelek atau memprihatinkan, 51 persen sedang, 6 persen belum, hanya 3 persen saja yang bagus. Sehingga diperlukan upaya untuk menyelamatkan BLK milik pemda tersebut karena sudah terbukti dapat meningkatkan ketrampilan dan kompetensi para pekerja. "BLK yang kondisinya memprihatinkan perlu dibenahi," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar. Dibutuhkan anggaran sekitar Rp 10 triliun untuk merevitalisasi BLK milik pemerintah daerah yang kondisinya tak terurus. Dalam hal ini pihaknya akan bekerjasama dengan pemda.



# Miskin dan Berutang

**Berutang untuk mengentaskan kemiskinan (memakmurkan rakyat). Benarkah? Atau hal itu hanya slogan! Kenyataan, utang kita (pemerintah Indonesia), baik utang luar negeri maupun dalam negeri, dari tahun ke tahun semakin membesar, dan kemiskinan pun masih terus membelenggu rakyat. Ditambah lagi beban utang luar negeri swasta yang semakin besar. Tampaknya, Indonesia telah masuk dalam perangkap utang permanen (*permanent debt trap*), yang memungkinkan Indonesia akan tetap miskin (*permanent poor*) dan berutang hingga kiamat tiba.**

**R**akyat diajak untuk bersabar, mengencangkan ikat pinggang. Pembangunan memerlukan waktu, bertahap dan jangka panjang. Membangun, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, pertanyaannya, berapa lama jangka panjang itu dan seberapa ketat ikat pinggang itu? Jangan-jangan saking lamanya jangka panjang itu, semua rakyat miskin sudah mati, serta saking ketatnya ikat pinggang, hingga rakyat miskin sudah tidak lagi punya pinggang.

Dalam kaitan ini, berangkali relevan dikutip apa yang dikemukakan John Maynard Keynes (Cambridge, 5 Juni 1883 - Sussex, 21 April 1946) seorang ahli ekonomi Inggris yang melontarkan ide-ide radikal dan berdampak luas pada ilmu ekonomi modern serta pemikiran dan filsafatnya biasa disebut dengan istilah Keynesianisme. Keynes mengatakan *the long run is a misleading guide to current affairs*. (Jangka panjang adalah panduan menyesatkan untuk urusan saat ini). Sebab menurutnya, *in the long run we are all dead*. (Dalam jangka panjang kita semua sudah mati).

Bisa saja pernyataan Keynes ini dipandang mengandung kelakar. Tetapi jika melihat kebijakan pemerintah yang menjanjikan pembangunan jangka panjang dan selalu mengejar angka dan persentase laju pertumbuhan dengan mengandalkan utang seperti terjadi hingga saat ini, sampai kapan pun rakyat Indonesia akan dibelenggu kemiskinan. Atau, setidaknya, mustahil si penguat lebih kaya dari pemberi utang, jika kebijakan utang-piutang itu dilakukan seperti selama ini.

Dalam pandangan pemerintah, sebagaimana dirilis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI, perihal Perkembangan Utang Negara, Edisi Juni 2010, disebutkan utang meru-

pakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN) yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan, yang bertujuan menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menguatkan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan keamanan.

Utang, katanya, adalah konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimana penerimaan negara lebih kecil daripada belanja negara. Pemerintah berpandangan, pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara. Di mana utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh *tempo* (*debt refinancing*); serta *refinancing* dilakukan dengan *terms & conditions* (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik.

Penjelasan pemerintah ini, secara sengaja atau tidak, mengakui bahwa Indonesia telah terjebak dalam perangkap utang permanen. Gali lobang untuk menutup lobang. Utang untuk menutupi defisit anggaran serta membayar cicilan utang dan bunganya. Sehingga tujuan kebijakan pengelolaan ekonomi untuk menciptakan kemakmuran rakyat sering kali menjadi bukan prioritas utama.

Jumlah nominal utang luar negeri terus membesar berlipat-lipat, sementara penciptaan lapangan kerja dan upaya pengurangan kemiskinan merambat lambat, nyaris tak bergerak lebih baik. Angka laju pertumbuhan dikejar demi prestasi dan pencitraan, tanpa peduli apakah laju pertumbuhan itu bersinggulang langsung dengan pengurangan kemiskinan rakyat.

Nyatanya, kemiskinan pun kian merisaukan (Kompas, 12/7/2010). Laju



penurunan angka kemiskinan semakin lambat. Di sisi lain, angka inflasi meningkat seiring kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Beban masyarakat termarjinalkan pun makin berat seiring kenaikan tarif dasar listrik per 1 Juli 2010. Menurut data pemerintah (Badan Pusat Statistik) jumlah penduduk miskin saat ini (Maret 2010) sebanyak 31,02 juta (13,33 persen), sedangkan Maret 2009 sebanyak 32,53 juta (14,15 persen). Penentuan jumlah penduduk miskin versi pemerintah ini didasarkan pada asumsi pengeluaran rata-rata per kapita penduduk per bulan adalah Rp.211,726, tergolong di bawah garis kemiskinan.

Bandingkan dengan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia USD 2 per kapita per hari. Jika Indonesia menggunakan garis kemiskinan USD 2 per

# Hingga Kiamat Tiba



kapita per hari atau Rp. 552.000 per bulan (kurs Rp.9.200/USD 1), maka jumlah orang miskin di Indonesia lebih 90 juta orang.

Tampaknya, pemerintah selalu dengan giat menurunkan angka kemiskinan dalam data Badan Pusat Statistik. Apakah data itu sesuai dengan realitas kehidupan keseharian rakyat, itu adalah soal lain. Yang penting ada data-data publikasi penurunan angka kemiskinan untuk meningkatkan citra pejabat pemerintah.

Bila perlu, paling menyedihkan, rakyat disuapi saja dengan BLT (bantuan langsung tunai) dan Raskin (beras miskin). Tak peduli apakah dengan hal itu rakyat semakin mandiri atau tidak. Sehingga semakin 'paripurna dan permanenlah' kemiskinan rakyat dengan mental peminta-minta. Akibatnya, yang kaya sema-

kin kaya dan yang miskin semakin miskin serta karakter kemandirian bangsa semakin melorot pula.

Barangkali hal inilah yang dikuatirkan Presiden Soekarno ketika dengan lantang menolak tawaran utang dari negara-negara maju (kapitalis), dengan ucapan yang terkenal: *Go to hell your aid!* Dia pemimpin visioner yang memilih lebih baik menyerukan dan mengajak rakyat untuk Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) sekaligus mengedepankan pembangunan karakter bangsa (*character and nation building*).

Kendati pemerintahan Soekarno tidak bebas murni dari utang luar negeri, tetapi dia mempunyai visi dan sikap yang tegas bahwa untuk membangun kejayaan bangsa harus dengan mengandalkan kemandirian dan karakter bangsa yang kuat. Visi

Soekarno ini memberi penegasan yang cerdas bahwa berutang dan menerima investasi luar bukanlah hal yang haram atau tabu, tetapi harus dengan visi, prinsip, sikap dan tujuan yang jelas dan teguh membangun kemandirian bangsa.

Prinsip inilah tampaknya yang dilupakan pemerintah Indonesia sejak Orde Baru hingga Era Reformasi hari ini. Dengan amat mudah, pemerintah berkata bahwa utang adalah konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimana penerimaan negara lebih kecil daripada belanja negara. Bahkan, apabila dipercaya sebagai negara pengutang, sudah menjadi kebanggaan pemerintah. Sehingga jumlah nominal utang luar negeri Indonesia (utang pemerintah dan utang swasta) setiap tahun melonjak semakin tinggi. (Baca: *Utang dari Soekarno Hingga SBY*).

## Rekor Utang Terbesar

Tim Indonesia Bangkit (TIB) yang 'beroposisi' dengan pemerintah mencatat utang Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 31 persen menjadi Rp 1.667 triliun. "Utang sebesar itu merupakan utang terbesar Indonesia sepanjang sejarah," kata Ketua Tim Indonesia Bangkit, Rizal Ramli. Menurut Rizal, itu menempatkan Indonesia pada rekor utang terbesar sepanjang sejarah.

Rizal juga menjelaskan jumlah utang per kapita Indonesia pun meningkat. Jika pada 2004 utang per kapita Indonesia sekitar Rp 5,8 juta per kepala, maka pada Februari 2009 melonjak jadi Rp 7,7 juta per kepala. "Kan aneh, data TIB menunjukkan utang naik, kok berani-berani-nya pemerintah bikin iklan utang turun," katanya.

Total utang pemerintah pusat sampai Mei 2010 telah mencapai USD 175,31 miliar (ekuivalen Rp.1.609,31 triliun dengan nilai tukar Rp.9.180/USD.1). Bahkan berdasarkan perhitungan asumsi makro 2011, jumlah utang pemerintah ini diperkirakan akan mencapai Rp.1.878 triliun.

Jika dilihat dari posisi utang pemerintah (pinjaman luar negeri dan Surat Berharga Negara) yang dirilis Dirjen Pengelolaan Utang, Kemkeu RI, Edisi Juni 2010, telah terjadi kenaikan jumlah nominal utang pemerintah yang sangat tinggi dalam kurun waktu 2001-2010. Jika pada akhir tahun 2001 utang pemerintah pusat

mencapai USD 122,42 miliar (Rp.1.273,18 triliun dengan kurs Rp.10.400/USD.1), bertambah sebesar USD 17.46 miliar (Rp. 174, 6 triliun dengan kurs Rp.10.000/USD.1) pada akhir 2004 menjadi USD 139.88 miliar (Rp.1.299,50 triliun dengan kurs Rp.9.290/USD.1).

Kenaikan jumlah nominal utang pemerintah semakin tinggi terjadi dalam pemerintahan saat ini (2005-Mei 2010), menjadi USD 175.31 miliar (Rp. 1.609,31 triliun dengan kurs Rp.9.180/USD.1). Atau meningkat USD 35.43 miliar (Rp. 325.956 triliun dengan kurs Rp.9.200/USD.1). Bandingkan dengan utang luar negeri pemerintah Orde Baru (32 tahun) sebesar USD 53.865 (1997) dan akibat diterpa krisis naik sebesar USD 13.463 menjadi USD 67.328 (1998) yang berakibat secara politik dengan lengsernya Presiden Soeharto.

Pemerintah (Kementerian Keuangan) menjelaskan bahwa kenaikan jumlah nominal utang pemerintah yang sedemikian tinggi sejak 2005 yakni sebesar USD 35.43 miliar (Rp. 325.956 triliun dengan kurs Rp.9.200/USD.1), itu berasal dari: *Pertama*, akumulasi utang di masa lalu (*legacy debts*) yang memerlukan *re-financing* yang cukup besar; *Kedua*, dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998 yang berakibat: a) Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing, b) BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan, c) Sebagian setoran BPPN dari *asset-recovery* digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.

*Ketiga*, pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk: a) Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi, dan proyek padat karya; b) Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH, Subsidi; c) Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; d) Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; e) Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); dan f) Melanjutkan reformasi birokrasi.

Penjelasan ini menegaskan bahwa pemerintah memang mengandalkan utang, selain untuk membayar cicilan utang masa lalu dan bunganya yang jatuh tempo, juga menjaga stimulus fiskal, membiayai PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH dan subsidi, juga membiayai insentif pajak dan reformasi birokrasi (remunerasi). Salah satu contoh, reformasi birokrasi yang dibiayai dengan utang luar negeri adalah pemberian remunerasi (dana tunjangan khusus) pegawai Kementerian Keuangan.

Selain itu, pemerintah terus melanjutkan ketagihan berutang ke luar negeri,

pada era pemerintahan saat ini, kendati dengan bunga yang lebih tinggi (komersial). Sebab akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia sudah dibatasi. Pembatasan ini disebabkan status Indonesia yang tidak lagi digolongkan sebagai *low income country*, di samping adanya batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (*country limit*).

Bahkan berita terbaru, Moody's Investors Service pada (21/6/2010) menaikkan peringkat utang Indonesia berdominasi rupiah dan mata uang asing dari stabil menjadi positif dengan level Ba2. Sebagaimana dikutip Reuters Senin (21/6/2010), Moody's Investors Service menyebut dengan demikian Indonesia memiliki kapasitas yang kuat untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, stabilitas dan efektifitas keuangan dan kebijakan moneter.

Moody's juga meningkatkan rating deposito jangka panjang berdominasi mata uang asing di 10 bank di Indonesia ke Ba3, dari stabil menjadi positif atau satu level di bawah *investment grade* (level layak investasi). Tahun 2009, Moody's menaikkan rating utang luar negeri Indonesia menjadi Ba2 atau dua level di bawah *investment grade*.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan naiknya peringkat Indonesia dari stabil menjadi positif dari Moody's sebagai sinyal positif bagi Indonesia untuk segera masuk ke jajaran *investment grade*. Dengan demikian, kata Agus, pemerintah akan semakin berhati-hati dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga performance pemerintah. Meskipun dia tidak mau memasak target waktu Indonesia masuk ke jajaran *investment grade*.



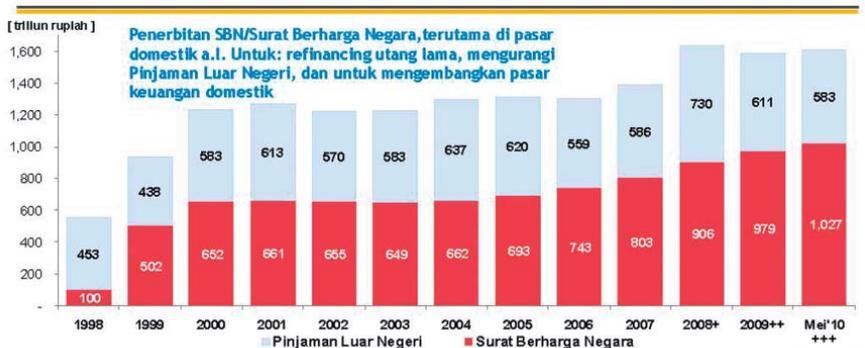
**RENUMERISASI:** Salah satu contoh reformasi birokrasi tunjangan khusus bagi Kementerian Keuangan.

"Kalau itu saya tidak bisa bilang (masuk ke *investment grade*), kita mesti kerja yang baik saja," tandasnya.

Sebelumnya, Maret 2010, Standard & Poor's juga meningkatkan rating utang Indonesia berdominasi mata uang asing dua tingkat di bawah *investment grade*. Bahkan Januari 2010, Fitch Ratings telah meningkatkan rating Indonesia menjadi satu tingkat di bawah level layak investasi (*investment grade*).

Pemerintah boleh bangga dengan ke-

## Posisi Utang Pemerintah, 1998-2010



Tahun	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008+	2009++	Mei'10+++
Pinjaman	82%	47%	47%	48%	47%	47%	49%	47%	43%	42%	45%	38%	36%
Surat Berharga Negara	18%	53%	53%	52%	53%	53%	51%	53%	57%	58%	55%	62%	64%
Total Utang Pemerintah Pusat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Catatan:  
 + Angka Sementara  
 ++ Angka Sangat Sementara  
 +++ Angka Sangat-Sangat Sementara, per 31 Mei 2010

**Kenaikan Pinjaman Luar Negeri, terutama karena volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap berbagai denominasi mata uang dalam Pinjaman Luar Negeri**

Kementerian Keuangan - Republik Indonesia — 19



si yang dibiayai dengan utang luar negeri berupa dana

naikan peringkat ini, tapi sebagaimana dikemukakan Menkeu Agus Martowardojo pemerintah harus semakin berhati-hati dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter.

Sebab hal ini juga bermakna bahwa Indonesia yang terus didorong lembaga dan negara-negara maju (kreditor) untuk melanjutkan ketergantungan meminjam (berutang), tapi bukan lagi pinjaman lunak (berbunga rendah) melainkan pinjaman komersial berbunga lebih tinggi.

Sehingga, kenaikan peringkat utang ini bisa menjadi perangkap jika pemerintah tidak berhati-hati.

Puja-puji lembaga atau negara kreditor itu seharusnya diwaspadai. Sebab, bukanlah saat ini utang pemerintah sudah semakin banyak dan mencemaskan? Saking banyaknya, jika ditumpuk tidak muat di beberapa gedung termasuk Gelora Bung Karno, Senayan. "Banyaknya, mungkin kalau (uangnya) ditumpuk jadi berapa gedung, GOR Senayan juga enggak akan cukup," ungkap Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto, kepada pers di kantornya, Jakarta, Senin (19/4/2010).

Menurutnya, nominal utang pemerintah pusat kian bertambah dari waktu ke waktu yang disebabkan meningkatnya nominal defisit dan utang lama yang jatuh tempo. Walaupun pinjaman luar negeri semakin berkurang, tetapi tambahan nominal utang berasal dari surat berharga negara (SBN) baik surat utang negara (SUN) dan sukuk. Kondisi tersebut ditunjang oleh porsi SBN valas yang meningkat karena daya serap pasar domestik masih terbatas. Menurutinya, SBN valas ini untuk *benchmarking* dan memperkuat cadangan devisa.

Memang, sebagaimana sering dideklarasikan pemerintah, meskipun secara nominal jumlah utang pemerintah semakin meningkat, namun besaran rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin menurun. Pada akhir tahun 2001, rasio utang terhadap PDB sebesar 77 persen, menurun menjadi 67 persen tahun 2004, dan makin menurun lagi menjadi 26 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2010 (perkiraan sementara).

Sebelumnya, Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto saat konferensi pers

di ruang pers Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin, Jakarta, Selasa (25/5/2010) malam mengatakan meski bertambah (nominal utang), tapi sesuai konsensus dari semua cendekiawan di dunia bahwa harus dilihat dari GDP. Dia menjelaskan peningkatan nominal utang pemerintah merupakan penyesuaian atas besaran defisit anggaran yang mengikuti pertambahan nominal PDB dari tahun ke tahun.

Selain itu, Rahmat Waluyanto mengatakan pemerintah juga berkepentingan untuk membayar utang jatuh tempo yang cukup tinggi pada tahun ini di mana utang tersebut dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Tahun ini, menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo pemerintah bersiap menanggung utang jatuh tempo sekira Rp.115 triliun. "Pada tahun ini utang jatuh tempo kita Rp110 triliun, kalau ditambah bunga Rp115 triliun dan sekarang sedang dalam posisi untuk memperpanjang itu," jelasnya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (25/5/2010) malam.

Menkeu Agus Martowardojo menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari besaran utang yang ditanggung oleh pemerintah. Sebab pengelolaan utang negara saat ini berkategori sehat, karena pemerintah juga mengelola utang jatuh tempo setiap tahunnya.

Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto juga membantah anggapan pengelolaan utang tidak efisien. Pasalnya, defisit anggaran setiap tahunnya dibatasi maksimal hanya tiga persen dari PDB. Tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru.

Dia juga menjelaskan bahwa tidak benar jika tambahan utang melewati batas APBN. "September 2009, lembaga peringkat internasional menaikkan rating kredit Indonesia karena dinilai telah mengelola keuangan dengan baik. Audit BPK terhadap pengelolaan utang, juga sudah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP)," tambahnya.

Rahmat menegaskan bahwa jumlah nominal defisit dan pembiayaan melalui utang, termasuk pelunasan utang, ditetapkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dengan persetujuan DPR. Maka, dia sangat heran kalau ada pengamat merangkap anggota DPR terus teriak-teriak soal utang. "Dia (DPR) sendiri kan ikut juga membahas itu," katanya.

Sementara, perihal anggapan bahwa yield surat utang negara (SUN) yang

## Posisi Utang Pemerintah, 2001-2010

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*	2009**	Mei 2010***
<b>a. Pinjaman (djm. miliar US\$)</b>	58.90	63.74	68.91	68.59	63.09	62.02	62.26	66.69	65.02	63.46
Bilateral **)	35.16	40.37	46.19	46.48	42.16	41.07	41.03	44.28	41.27	39.03
Multilateral ***)	20.68	20.61	19.98	19.48	18.78	18.84	19.05	20.34	21.63	21.49
Komersial ***)	2.41	2.20	2.19	2.17	1.82	2.01	2.08	1.98	2.16	2.88
Suppliers ***)	0.48	0.39	0.37	0.29	0.17	0.11	0.08	0.09	0.07	0.06
Lain-Lain ***)	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-	-	-	-	-
<b>b. Surat Berharga Negara (djm. miliar US\$)</b>	63.52	73.30	76.64	71.29	70.51	82.34	85.26	82.78	104.20	111.84
Denominasi Valas	-	-	-	1.00	3.50	6.50	7.00	11.20	15.23	17.23
Denominasi Rupiah	63.52	73.30	76.64	70.29	67.01	76.84	78.26	71.58	88.97	94.61
<b>Total Utang Pemerintah Pusat (djm. miliar US\$)</b>	122.42	137.04	145.55	139.88	133.60	144.36	147.51	149.47	169.22	175.31
<b>Total Utang Pemerintah Pusat (ekuivalen djm. triliun Rupiah)</b>	1.273.18	1.225.15	1.232.04	1.299.50	1.313.29	1.302.16	1.389.41	1.636.74	1.590.66	1.609.31
<b>diantaranya SBN Denominasi Rupiah (djm. triliun Rupiah)</b>	660.65	655.31	648.75	633.03	638.67	693.72	737.13	783.86	836.31	868.51
<b>Nilai Tukar Rupiah (IDR/US\$1)</b>	10.400	8.940	8.465	9.290	9.830	9.020	9.419	10.950	9.400	9.180
<b>PDB (djm. triliun Rupiah)</b>	1.848.32	1.821.83	2.013.88	2.295.83	2.774.28	3.339.48	3.948.32	4.964.03	6.613.44	6.263.79
<b>Rasio Utang terhadap PDB</b>	77%	67%	61%	57%	47%	39%	35%	33%	28%	26%

Catatan:

+ Angka Sementara

++ Angka Sangat Sementara

+++ Angka Sangat-Sangat Sementara, per 31 Mei 2010, menggunakan PDB asumsi APBN-P 2010

\* Termasuk semi commercial

\*\* Beberapa termasuk semi concessional

\*\*\* Seluruhnya termasuk commercial

Kementerian Keuangan - Republik Indonesia



Chris Komari

terlalu tinggi, Rahmat Waluyanto mengatakan pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk menetapkan yield atas SUN tersebut. Karena Yield obligasi ditetapkan melalui mekanisme pasar yang prosesnya dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Sebelumnya, Sri Mulyani, sebelum mengundurkan diri dari jabatan menteri Keuangan, dalam paparannya di Musrenbangnas 2010, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (28/4/2010) mengatakan kendati berdasarkan perhitungan asumsi makro 2011, jumlah utang pemerintah diperkirakan akan mencapai Rp1.878 triliun atau meningkat dari utang pada kondisi awal 2010 yang sebesar Rp1.617 triliun, namun, jika dibandingkan antara jumlah utang dan PDB, rasio utang Indonesia pada tahun 2011 justru akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 26,7 persen saja.

"Pada 2011, utang Indonesia rasionya terhadap PDB semakin kecil yaitu hanya sebesar 26,7 persen dari PDB atau turun dari tahun ini yang sudah ada di kisaran 30 persen," ujar Sri Mulyani. Dia menegaskan, peningkatan jumlah utang tersebut masih sejalan dengan pertumbuhan PDB. Menurut Sri Mulyani, kondisi ekonomi Indonesia sudah jauh lebih baik saat ini, namun tetap saja diperlukan kewaspadaan tinggi terhadap perkembangan ekonomi global. Dipaparkan, defisit dalam RAPBN-P 2011 ditetapkan sebesar 1,7 persen dari PDB atau menurun dibandingkan dengan asumsi defisit dari APBN-P 2010 adalah 2,1 persen.

Data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, menunjukkan kebutuhan pembiayaan utang pada tahun 2010 mencapai Rp 234,776 triliun, yakni digunakan untuk membiayai defisit anggaran sebesar Rp 98,010 triliun, pembayaran utang jatuh tempo dan cicilan pokok pinjaman luar negeri Rp 129,384 triliun, serta biaya lain-lain sebesar Rp 7,381 triliun.

Untuk menutupi sebagian besar kebutuhan pembiayaan tahun ini, pemerintah



Rahmat Waluyanto

akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 174,97 triliun. Dirjen Pengelolaan Utang mengatakan SBN diprioritaskan karena membantu pengembangan pasar keuangan, memperkuat basis investor domestik, mendukung kebijakan moneter Bank Indonesia, dan yang juga penting adalah mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri.

Sisanya, menurut Rahmat Waluyanto, akan dibiayai melalui pinjaman program Rp 24,443 triliun, pinjaman proyek Rp 24,519 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 1 triliun, penerusan pinjaman Rp 8,644 triliun, serta pengelolaan aset negara Rp 1,2 triliun.

### Jangan Ngutang Sampai Kiamat

Rezim boleh berubah. Namun ada yang tidak pernah berubah yakni kebijakan ekonomi dengan kegemaran berutang. Mulai dari era Soekarno, terutama era Orde Baru (Soeharto), dan era Transisi Reformasi (BJ Habibie) sampai era Reformasi (Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono), kebijakan ekonomi sangat tergantung pada utang. Terutama sejak era Orde Baru hingga era Reformasi, penggunaan utang sebagai sumber dana pembangunan dan pembiayaan pemerintah senantiasa tercantum dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tentu saja berakibat akumulasi penumpukan utang pemerintah semakin membesar dari tahun ke tahun. Sehingga tak heran bila posisi utang Indonesia berada pada jajaran top rank negara pengutang dunia. Untuk membayar utang (cicilan pokok utang dan bunga) pemerintah menggali lubang utang baru. Ironisnya, jumlahnya tidak pernah mencukupi untuk melunasi kewajiban utang pada setiap tahun.

Chris Komari, warga negara Indonesia yang tinggal di California, mengibaratkan utang pemerintah Indonesia dengan mengejar yang naik bus pakai sepeda.



Rizal Ramli

Tidak akan bisa terkejar, malah semakin hari akan semakin ketinggalan jauh. Dia pun bertanya, kapan hutang-hutang ini akan dilunasi? Sampai anak cucu dan sampai generasi ke berapa hutang itu akan bisa lepas dari beban APBN, lepas dari pundak dan tidak lagi mencekik leher bangsa Indonesia? Apakah kebijaksanaan Pemerintah Pusat hanya bisa tambal sulam sekadar mengelola hutang-hutang itu?

Dia menggambarkan pengelolaan utang pemerintah saat ini: "Kalau tidak hutang sama Paul untuk bayar Peter, ya ganti utang sama achong-achong di dalam negeri untuk bayar Peter di luar negeri?" Chris Komari bertanya, sekaligus menggambarkan bagaimana pemerintah menggali pinjaman luar negeri baru untuk membayar utang luar negeri, atau menggali utang dalam negeri dengan menjual obligasi atau SUN (Surat Utang Negara) dan SBN (Surat Berharga Negara) untuk membayar utang luar negeri.

Dulu zaman Orde Baru sebelum tahun 1997/1998, kata Komari, hutang dalam negeri hampir tidak ada atau kecil sekali, karena rejim Orde Baru, selalu pinjam Paul untuk bayar Peter, termasuk IMF. Sekarang di zaman reformasi, hutang sama Peter dibayar dengan meminjam hutang dari achong-achong dengan menjual SUN (Surat Utang Negara) dan SBN (Surat Berharga Negara), menjadikan hutang dalam negeri besarnya melampaui hutang luar negeri hanya dalam waktu 12 tahun.

Dia mengungkapkan hutang sama IMF dilunasi dengan menciptakan hutang baru dalam negeri yang jumlahnya dua kali lipat dari jumlah hutang di luar negeri yang dilunasi. Apa bedanya? Lalu, kapan hutang dalam negeri (SBN) akan bisa dilunasi yang jumlahnya jauh lebih besar dari hutang (pinjaman) luar negeri? Maka, jika pemimpin tidak memiliki visi kemandirian yang tinggi, di tengah arus globalisasi saat ini, negeri ini akan dibelenggu utang sampai kiamat tiba.

■ **BI/Ch. Robin Simanullang**

# Utang Era Soekarno Sampai SBY

Indonesia yang subur dan kaya sumber daya alam, sejak sebelum merdeka (Hindia Belanda), dan sesudah merdeka, mulai era Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri hingga era Susilo Bambang Yudhoyono, tak bisa melepaskan diri dari jeratan utang luar negeri, baik utang pemerintah maupun utang swasta.

## Era Soekarno (1945–1966)

Presiden Soekarno yang berkuasa sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, pada akhir kekuasaannya meninggalkan utang luar negeri sebesar USD 6,3 miliar, terdiri dari USD 4 miliar warisan utang Hindia Belanda (sejak 1968 disepakati rentang 35 tahun dan jatuh tempo 2003) ditambah utang pemerintah USD 2,3 miliar (rentang 30 tahun sejak 1970 dan jatuh tempo 1999).



Presiden Soekarno, sebenarnya seorang pemimpin yang berani punya sikap tentang utang. "Go To Hell with Your Aid," pernyataan tegasnya menyikapi campur tangan IMF pada peristiwa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, 1956. Pernyataan ini menegaskan bahwa dia seorang pemimpin yang visioner dan berani mengambil sikap untuk menolak utang dan investasi asing apabila hal itu diikuti kepentingan dan intervensi asing.

Dia pemimpin visioner yang memilih lebih baik menyerukan dan mengajak rakyat untuk Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) sekaligus mengedepankan pembangunan karakter bangsa (*character and nation building*).

## Era Soeharto (1966–1998)

Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun (1966- Mei 1998) meninggalkan utang luar negeri sebesar USD 136,088 (1997). Terdiri dari Utang LN Pemerintah USD 53.865 dan Utang LN Swasta USD 82.223 (*Sumber Bank Indonesia*). Jika dirupiahkan dengan kurs Rp.10.000, Utang LN Pemerintah Rp.538,65 triliun, dan Utang LN Swasta Rp.822,23 triliun. Total utang LN Rp.1.360,88 triliun.



Dibanding tahun 1996, terjadi lonjakan

Utang LN Swasta sebesar USD 27.355 dari USD 54.868 menjadi USD 82.223 tahun 1997. Sementara pinjaman LN Pemerintah turun USD 1.438 dari USD 55.303 (1996) menjadi USD 53.865 (1997). Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia telah mulai diguncang krisis moneter yang berbuntut pada krisis politik yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan presiden Soeharto, Mei 1998.

Tahun 1998, pinjaman LN Pemerintah naik sebesar USD 13.463 dari USD 53.865 (1997) menjadi USD 67.328 (1998). Sedangkan pinjaman LN Swasta naik USD 1.335 dari USD 82.223 (1997) menjadi USD 83.558 (1998).

## Era Habibie (1998–1999)

Di tengah krisis moneter dan politik, Presiden Soeharto menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden BJ Habibie, 22 Mei 1998. Presiden BJ Habibie yang berkuasa selama 518 hari sampai Oktober 1999, meninggalkan utang LN (1999) sebesar USD 148.097 terdiri dari utang LN pemerintah USD 75.862 dan utang LN Swasta USD 72.235. Utang LN Pemerintah tersebut naik sebesar USD 21.997 dibanding tahun 1997 (USD 53.865).



## Era Gus Dur (1999–2001)

Presiden BJ Habibie digantikan Presiden Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gus Dur, sejak 21 Oktober 1999. Namun, Presiden RI ke-4 ini hanya berkuasa sampai 23 Juli 2001. Dia dilengserkan setelah menolak memberikan pertanggungjawaban pada Sidang Istimewa MPR. Ia digantikan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa sulit pemerintahannya, utang luar negeri pada tahun 2000 turun menjadi USD 141.693 (pemerintah USD 74.916 dan swasta USD 66.777). Tahun 2001 turun lagi menjadi USD 139.143 (pemerintah USD 72.197 dan swasta USD 66.946). (*Sumber Bank Indonesia, 2001*).



Dibanding tahun 1996, terjadi lonjakan

## Era Megawati (2001–2004)

Presiden Megawati Soekarnoputri yang berkuasa sejak 23 Juli 2001 sampai 21 Oktober 2004, praktis tidak terjadi



kenaikan utang luar negeri. Pada tahun 2004, dari data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, Volume I Februari 2010, Publikasi Bersama Kementerian Keuangan dan Bank

Indonesia, dia meninggalkan utang sebesar USD 141.273 (pemerintah USD 83.296 dan swasta USD 57.977). Sedikit turun dari posisi total utang LN tahun 2000 yakni sebesar USD 141.693 (pemerintah USD 74.916 dan swasta USD 66.777). (*Sumber BI, 2001*).

Penurunan atau tidak meningkatnya utang luar negeri tersebut adalah akibat kebijakan privatisasi beberapa BUMN dan saham-saham perusahaan yang diambil alih pemerintah sebagai kompensasi pengembalian kredit BLBI dengan nilai penjualan sekitar 20% dari total nilai BLBI. Selama kurang lebih tiga tahun pemerintahan Megawati, dilakukan privatisasi BUMN sebesar Rp18,5 triliun masuk ke kas negara, yakni Rp3,5 triliun (2001), Rp7,7 triliun (2002), dan Rp7,3 triliun (2003).

## Era SBY I (2004–2009)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang akrab dipanggil SBY, Presiden RI pertama pilihan langsung melalui Pemilu 2004, menggantikan Presiden Megawati pada 21 Oktober 2004 sampai 2009. Kemudian pada Pilpres 2009, berpasangan dengan Boediono, kembali terpilih untuk menjabat Presiden RI periode kedua 2009-2014.



Selama periode pertama kekuasaannya (2004-2009) berdasarkan data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, Volume I Februari 2010, Publikasi Bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, posisi utang LN sampai Oktober 2009 meningkat menjadi USD 170.785 (pemerintah USD 98,859 juta dan swasta USD 71.926). Diperkirakan peningkatan utang masih akan tinggi pada periode kedua (SBY-Boediono) 2009-2014, sebab kebijakannya masih gemar menggali utang. ■ BI/pdti

# Hentikan Sindrom Utang Luar Negeri

Utang Indonesia kian mencemaskan. Sebab, utang, terutama utang luar negeri dan SBN valas, itu dinilai merupakan skenario untuk melanggengkan ketergantungan dan sekaligus mengeruk habis sumber daya alam Indonesia. Lalu, kenapa pemerintah tidak menghentikan sindrom kebijakan mencari pinjaman luar negeri?

**P**ara aktivis reformasi 'mencaci-maki' pemerintah Orde Baru karena kegemarannya menengadahkan tangan berutang (meminjam) ke luar negeri maupun melalui Surat Berharga Negara (SBN) valas, sementara sebagian utang itu (diperkirakan sekitar 33,33 persen) justru dikorupsi. Namun, dalam 12 tahun era reformasi kegemaran meminta-minta pinjaman luar negeri dan menimbun utang lewat SBN itu, bukan surut apalagi berhenti, bahkan semakin merisaukan.

Jika pada era Orde Baru utang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pada era reformasi digunakan untuk menutupi defisit anggaran, membiayai insentif pajak, gaji dan tunjangan khusus (renumerasi) pegawai negeri, bantuan langsung tunai (BLT) dan beras miskin (Raskin). Jika pada era Orde Baru korupsi merajalela, justru pada era reformasi korupsi semakin canggih (malah berbaju demokrasi dan hukum). Pegawai rendah Kemenkeu (Pajak) saja bisa meraup uang

ratusan miliar dan *bail out* Bank Century yang menelan lebih Rp.6,7 triliun bisa secara hukum dinyatakan belum ada bukti walaupun pemeriksaan BPK dan DPR telah menyatakan berbau korupsi.

Rezim Orde Baru yang memerintah selama 32 tahun meninggalkan utang pemerintah tahun 1998 sebesar Rp.553 triliun terdiri dari pinjaman Rp.453 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp.100 triliun. Meningkat tajam pada 31 Mei 2010 (angka sangat-sangat sementara) menjadi Rp.1.610 triliun terdiri dari pinjaman Rp.583 triliun dan SBN Rp.1.027 triliun. (Posisi Utang Pemerintah (1998-2010) yang dirilis Ditjen Pengelolaan Utang, Kemenkeu, Juni 2010).

Pakar ekonomi dari Universitas Andalas Padang Prof Dr Elfindri berharap pemerintah meninggalkan kebijakan mencari pinjaman luar negeri (LN), dan menghapus "sindrom" utang seperti yang dilakukan rezim Orde Baru. Menurutnya, jika utang itu dibuat oleh pemerintah, konsekuensinya bangsa ini tentu akan

terus membayar cicilan untuk negara kreditur. "Dampaknya, tentu kemandirian bangsa ini akan semakin jauh atau sulit dicapai," katanya.

Prof Dr Elfindri pun mempertanyakan untuk apa defisit anggaran itu dinaikkan? Sebab, menurutnya, semakin besar defisit, tabungan tentu akan menjadi rendah, serta kemampuan fiskal akan semakin terancam. Maka, dia menyarankan, agar pemerintah lebih menyeleksi keperluan tahunan guna menekan defisit tersebut.

Hal senada dikemukakan pengamat ekonomi Rizal Ramli dari Tim Indonesia Bangkit. Dia mengatakan, ketergantungan pada utang luar negeri bisa dikurangi secara drastis melalui berbagai langkah antara lain peningkatan efisiensi anggaran, perang terhadap korupsi, serta penegakan hukum tanpa tebang pilih.

Menurut Rizal Ramli, efisiensi anggaran antara lain dapat dilakukan dengan cara penghentian pembelian mobil dan rumah pejabat serta pengurangan pem-



**KURANGI UTANG:** Kesadaran membayar pajak diyakini mampu mengurangi ketergantungan pemerintah pada utang luar negeri.



salkan rencana pemerintah menyeter tambahan modal Rp.400 miliar kepada ADB sampai tahun 2014 berdasarkan pertimbangan jika menambah modal, pemerintah akan mendapat fasilitas pinjaman 1 miliar dolar AS setiap tahun dari ADB.

Menurut Irvan Duriatnata hal itu menunjukkan sikap keranjingan utang rezim neoliberal demi melayani kepuasan korporasi multinasional tanpa mempertimbangkan beban ekonomi dan sosial yang harus ditanggung oleh rakyat miskin.

Koalisi LSM Anti Utang ini juga menyesalkan kebijakan pemerintah yang bersama negara kapitalis maju pada pertemuan G20 di Washington (dan belum lama ini dilanjutkan di Toronto, Kanada), telah menyepakati langkah reformasi struktural perekonomian dunia yang tengah krisis berlandaskan pada prinsip pasar. Sebab, mereka menilai, hal tersebut dilakukan dengan cara mendorong rezim investasi dan perdagangan bebas dan meningkatkan peran lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, atau ADB.

Mereka berpandangan, pelaksanaan agenda-agenda ekonomi pasar bebas dan penyaluran utang luar negeri merupakan penyebab dari hilangnya kedaulatan ekonomi negara atas sumber daya alam dan menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin tajam di Indonesia.

Apalagi sebagaimana pernah dikemukakan Rizal Ramli bahwa sebagian besar dari utang tersebut, telah dikorupsi oleh para pejabat pada masa pemerintahan yang lalu dan telah diketahui oleh Bank Dunia maupun negara kreditor. Maka, menurutnya, utang tersebut bisa diklasi-



Prof. Dr. Elfindri

fikasi sebagai “utang najis” yang harus dinegosiasikan kembali dengan negara-negara kreditor, sehingga beban rakyat menjadi berkurang untuk membayar utang luar negeri.

Namun, menurut Rizal, karena mental ‘inlander’ pejabat kita, Indonesia telah kehilangan tiga kali kesempatan untuk melakukan negosiasi. Ketiga kesempatan itu adalah (1) saat transisi pemerintahan dari otoriter ke pemerintahan demokratis, kemudian (2) momentum perang melawan terorisme, serta (3) ketika bencana tsunami melanda Aceh.

Namun, Rizal mengingatkan usaha untuk negosiasi kembali terhadap utang luar negeri, serta penghematan dan efisiensi anggaran tersebut akan efektif jika didahului dengan reformasi birokrasi yang agresif.

**Kurangi Ketergantungan Pinjaman Asing**

Secara terpisah, Dirjen Pengelolaan

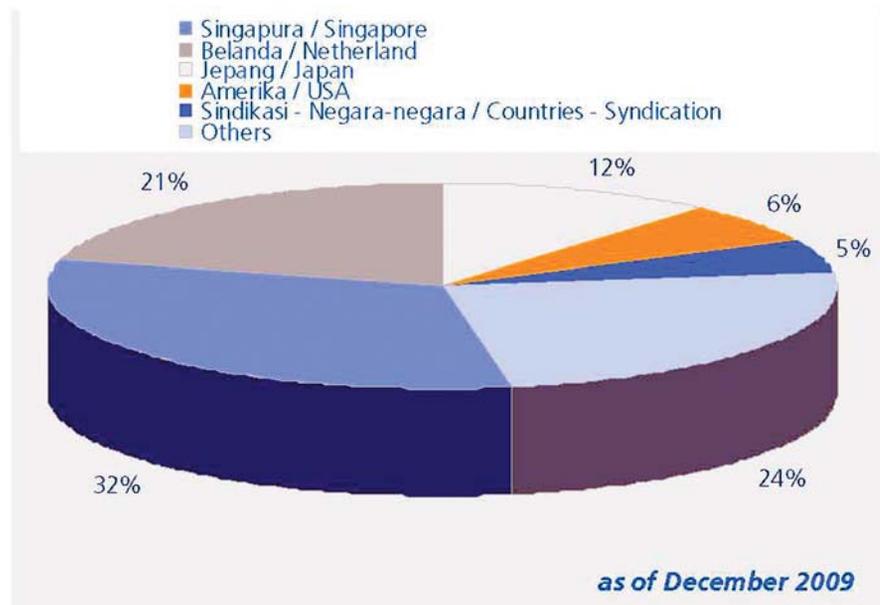
bangunan kantor-kantor pemerintah yang tidak tepat guna.

Dengan efisiensi ini, kata Rizal Ramli, dapat membangun bangsa tanpa ketergantungan pada utang luar negeri. Dia memberi gambaran bahwa selama ini sepertiga dari APBN yang telah mencapai lebih Rp.1.000 triliun per tahun, itu digunakan untuk membayar pokok bunga dan cicilan utang.

Sementara itu, sejumlah LSM Anti Utang menilai utang luar negeri merupakan skenario untuk mengeruk habis sumber daya alam Indonesia. Mereka menunjuk contoh, pinjaman ADB sebesar 350 juta dolar AS untuk proyek LNG Tangguh di Papua, dinilai hanya untuk melayani pasokan energi bagi negara industri maju dengan harga yang sangat murah.

Karena itu, menurut Irvan Duriatnata, staf Media dan Informasi Koalisi Anti Utang, sejumlah LSM mendesak pemerintah menghentikan segala bentuk perjanjian utang luar negeri baru. Mereka meny-

Posisi ULN Swasta Menurut Lima Negara Kreditor Terbesar  
*External Debt Position of Private by Top Five Creditor Nations*



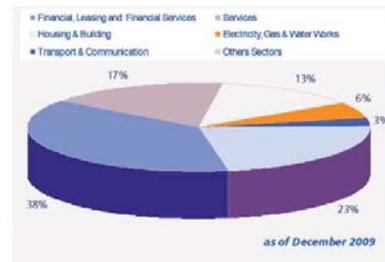
Utang Kemkeu Rahmat Waluyanto mengemukakan bahwa pemerintah telah mengurangi ketergantungan atas pinjaman asing. Pemerintah kini telah memprioritaskan surat berharga negara (SBN). Walaupun diakui pula bahwa pemerintah masih mengandalkan SBN valas akibat kemampuan dalam negeri (rupiah) masih lemah.

Menurut Rahmat Waluyanto, perkembangan pasar keuangan seperti sukuk, telah dapat memperkuat basis investor domestik (ORI, Sukri) sehingga mendukung kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman dari luar negeri.

Dirjen Pengelolaan Utang Kemkeu Rahmat Waluyanto, dalam konferensi pers, di Gedung Menko Perekonomian, di Jakarta, Senin (19/4/2010) menegaskan pinjaman luar negeri saat ini pun dibatasi karena dua hal pokok. Pertama, pinjaman lunak untuk pembangunan infrastruktur dan energi, perubahan iklim (*climate change*) dan proyek pembangunan lainnya terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan, dari lembaga-lembaga pinjaman internasional, seperti World Bank, ADB, IDB, Japan, Prancis dan lain sebagainya. Kedua, alokasi untuk alutsista TNI dan alat Polri dalam beberapa bagian yang berlaku untuk kegiatan yang dihasilkan, khususnya di dalam negeri.

Selain itu, menurut Rahmat Waluyanto, pemerintah juga melakukan berbagai upaya dalam mengelola utang. Pertama, mengutamakan SBN rupiah dalam negeri

Posisi UIN Pemerintah Menurut Lima Sektor Ekonomi Terbesar  
External Debt Position of Government by Top Five Economic Sectors



Posisi UIN Pemerintah Menurut Lima Jenis Mata Uang Terbesar  
External Debt Position of Government by Top Five Currencies



(*wealth effect*). Kedua, penerapan *project readiness criteria* dan monitoring serta evaluasi untuk kegiatan yang dituju dengan pinjaman luar negeri.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan (Kamis, 24 Juni 2010) bahwa pemerintah Indonesia berupaya mendesak negara-negara anggota G20 untuk berkomitmen menurunkan beban utang dan defisitnya. Menurutnya, ke-

seimbangan utang dan defisit perlu untuk menjaga perekonomian global. Desakan penurunan beban utang itu telah menjadi salah satu isu utama yang dibawa pemerintah dalam sidang pimpinan negara G20 pada 26-27 Juni 2010 di Toronto, Kanada.

Sementara itu, pengamat ekonomi INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Fadhil Hasan, Rabu (20/5/2010) mengkritisi pemerintah Indonesia yang selalu menerima tawaran negara lain yang bersedia memberikan utang kendati kurang memerlukan dana tersebut. "Akibatnya banyak proyek yang seharusnya kurang dirasakan manfaatnya terpaksa diada-adakan untuk menghabiskan dana utang," katanya tanpa menyebutkan proyek apa itu.

Walaupun Fadhil Hasan menilai, transparansi pengelolaan utang sudah cukup bagus. "Hanya saja pengelolaan dan manajemen utang yang harus dibenahi dan dikelola dengan lebih baik. Saat ini, utang luar negeri dikelola oleh hampir semua lembaga pemerintah yang ada, sehingga pengawasan dan pengalokasiannya menjadi tidak efektif karena terpecah-pecah," katanya.

Dia menyarankan pengelolaan utang luar negeri dilakukan oleh satu lembaga tersendiri, sehingga pengawasannya akan lebih mudah dan efektif. "Begitu juga pendistribusian dan pemanfaatan utang, cukup dilakukan oleh satu lembaga, untuk menghindari pembiayaan proyek yang dilakukan dua kali," kata Fadhil.

■ BI/crs-bhs

## Kebijakan Pengelolaan Utang

Pemerintah, melalui Direktorat Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menyebut tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali.

Kebijakan yang ditempuh adalah: 1) Tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor; 2) Persyaratan lunak (jangka panjang, biaya relatif ringan), terutama dari multilateral dan kreditor bilateral (G to G); 3) Tambahannya pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru;

4) Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar dalam negeri, untuk: a) Mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan APBN; b) Mendukung pengembangan pasar modal dengan memperluas basis investor melalui diversifikasi berbagai instrumen investasi bagi masyarakat; c) Membantu pengelolaan likuiditas pasar, misalnya melalui penerbitan instrumen pasar uang (SPN).

5) Membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional (global bond, global sukuk,

samurai bond) untuk meningkatkan posisi tawar pemerintah sebagai peminjam (*upper-hand borrower*).

Jenis Utang

Pinjaman (utang) terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Pinjaman Luar Negeri bersumber dari World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. Berupa: 1) Pinjaman Program: Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur; dan 2) Pinjaman Proyek: Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

Sementara, Pinjaman Dalam Negeri didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah. Pinjaman Dalam Negeri ini diperun-

tukkan membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum dan kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.

Berupa Surat Berharga Negara (SBN) dalam rupiah dan valuta asing, tradable & non-tradable, fixed & variable, terdiri dari: 1) Surat Utang Negara (SUN), berupa a) Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d.12bln); dan b) Obligasi Negara (> 1 thn) yakni Coupon Bond (Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond dan Non tradable: SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan) dan Zero coupon;

2) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk Negara dalam rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll, berupa: a) SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); SBSN Retail (Sukri); b) SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia).

■ BI/pditi

# Supaya Rakyat Tidak Makin Miskin



Utang seharusnya dipakai untuk membangkitkan kemandirian, bukan dengan dengan BLT.

**Utang pemerintah telah menjadi beban berat bagi rakyat. Saat ini, rakyat Indonesia telah terbebani utang pemerintah lebih Rp.7 juta per orang. Utang ini, setiap tahun akan kian membesar pula. Sehingga, setiap tahun pula rakyat harus ikhlas merelakan pemerintah memangkas dana pembangunan (yang semestinya meningkatkan kesejahteraan rakyat) untuk membayar cicilan pokok utang dan bunga bahkan juga membayar tunjangan khusus pegawai pemerintah (remunerasi).**

**S**aking kronisnya utang luar negeri Indonesia membebani APBN, sehingga kebijakan anggaran negara tidak memiliki kebebasan lagi untuk diprioritaskan pada kepentingan ekonomi rakyat. Pemerintah sudah semakin harus menurut dan tergantung pada penerimaan utang baru kendati dengan persyaratan yang lebih menguntungkan kreditor dan memberatkan (merugikan) rakyat Indonesia.

Kondisi beban pada utang lama dan ketergantungan pada utang baru itu telah berakibat rendahnya nilai tambah utang yang seyogyanya dimaksudkan sebagai sumber dana pembangunan. Apalagi pada setiap pemberian utang oleh lembaga atau negara kreditor selalu mewajibkan Indonesia untuk membeli barang-barang dan menggunakan jasa konsultan mereka dengan tarif relatif tinggi. Dengan demikian, sesungguhnya mereka (kreditor) hanya memasarkan produk dan jasa

dengan memberi pinjaman yang dibebani bunga pula. Bayangkan, sebuah 'bangsa besar' diberi utang (berbunga lunak dan komersial) untuk membeli barang si pemberi utang. Sehingga sebagian besar utang pinjaman itu kembali lagi ke negara-negara kreditor tersebut.

Dampak buruk lainnya dari ketergantungan pada utang itu, sadar atau tidak, adalah terampasnya kedaulatan pengelolaan ekonomi Indonesia. Kerap kali negara-negara kreditor, melalui Bank Dunia dan IMF, mengintervensi perumusan kebijakan ekonomi Indonesia, sesuai kepentingan mereka. Salah satu yang paling nyata dan berdampak luas adalah langkah IMF yang mendikte Indonesia memberlakukan ekonomi pasar bebas. IMF memaksa pemerintah Indonesia memprivatisasi BUMN serta menghapus subsidi secara total. Bahkan 'memaksa' Indonesia menetapkan kebijakan ini dalam Ketetapan MPR. Bukankah hal ini

telah membuat kemandirian ekonomi Indonesia semakin rapuh yang pada gilirannya bermuara pada proses penyengsaraan rakyat banyak?

Sejak era Orde Baru hingga 12 tahun reformasi saat ini, kondisi ini sudah berlarut. Bahkan semakin mencemaskan pada era reformasi ini. Lihat saja bebas beroperasinya pusat-pusat perbelanjaan asing di Indonesia saat ini, yang pada era Orde Baru tidak diizinkan. Kalaupun diizinkan, seperti Makro, harus memenuhi persyaratan-persyaratan ketat, yang tidak melemahkan dan mematikan pasar tradisional. Kini pedagang kecil di pasar tradisional telah dihimpit pusat perbelanjaan asing, seperti Carrefour dan Giant.

Diakui atau tidak, kondisi ini adalah sebagai akibat dari ketergantungan Indonesia pada bantuan (utang) luar negeri, yang disertai persyaratan-persyaratan yang menguntungkan kreditor dan telah merampas kedaulatan kebijakan ekonomi nasional. Indonesia harus menurut kepada kreditor. Inilah kenyataan ketidakadilan ekonomi global. Kendati sejak tahun 2000, semua negara anggota PBB telah bersepakat dalam *Milleneum Development Goals (MDGs)* yang salah satu tujuan utamanya adalah pengurangan angka kemiskinan menjadi separuh pada 2015, tetapi perampasan kedaulatan kebijakan ekonomi seperti dialami Indonesia terus saja berlangsung.

Khusus bagi pemerintah Indonesia, bagaimana target pengurangan angka kemiskinan itu bisa tercapai jika sebagian besar APBN harus dibebani utang dan bunganya serta sebagian besar lainnya hanya untuk menutupi biaya perbelanjaan pemerintah?

Memang, salah satu prinsip dari *Milleneum Development Goals (MDGs)* itu adalah adanya kesepakatan bersama untuk mengatasi kemiskinan secara bersama, lintas bangsa dan negara. Sangat ideal, tetapi realita, setiap negara lebih mengutamakan kepentingan negaranya sendiri. Terutama negara-negara maju berlomba (bersaing) menjadikan negara berkembang (miskin) sebagai negara yang harus membangun negerinya menjadi pasar produk industrinya. Antara lain membangun infrastruktur atau industri di negara berkembang yang sejatinya hanya sebagai substitusi impor.

## Target Akhiri Kemiskinan

Pemerintah Indonesia, dari sejak rezim

Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati hingga SBY, selalu mengumandangkan tekad untuk mengakhiri kemiskinan yang membelenggu rakyat. Tapi target mengakhiri (mengurangi) kemiskinan itu, masih jauh dari harapan. Lebih 90 juta rakyat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan, jika mengacu pada kriteria Bank Dunia, berpendapatan minimal USD 2 per kapita per hari.

Pemerintah yang terjebak dalam ketergantungan pada utang (kebijakan instan) untuk menutupi defisit anggaran, telah memperpanjang masa penderitaan rakyat. Setiap tahun utang semakin banyak dengan tingkat kenaikan yang amat tinggi tapi penurunan (pengurangan) kemiskinan stagnan. Kecemasan atas makin besarnya utang itu pun pantas mencuat. Walaupun pemerintahan SBY berulang kali menjelaskan bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB saat ini sudah semakin baik yakni sekitar 26 persen.

Namun demikian, seharusnya hal itu bukan suatu alasan yang baik untuk terus melanjutkan kegemaran berutang. Para pengamat ekonomi kerakyatan berpandangan pengurangan utang harus diprioritaskan supaya rakyat tidak semakin terbebani dan semakin miskin. Kebijakan yang mengandalkan utang (dengan harus memenuhi syarat-syarat kreditor) untuk memberantas kemiskinan sudah seharusnya ditinggalkan. Sebab hal itu tidak mungkin mujarab karena terbukti tidak secara langsung menyentuh akar penyebab kemiskinan rakyat banyak.

Pengurangan (penghentian) utang luar negeri, memang memerlukan pemimpin yang visioner dan punya integritas tinggi. Berani bersikap, jujur dan sungguh-sungguh antikorupsi. Akan sangat sulit meninggalkan ketergantungan (ketagihan) berutang jika korupsi masih merajalela dan bahkan semakin canggih. Sebab korupsi telah membuat rakyat semakin sengsara yang pada gilirannya membuat mereka apatis.

Korupsi telah mengakibatkan kesiapan rakyat untuk berkorban, bekerja keras dan berpartisipasi semakin rendah. Termasuk dalam hal keikhlasan rakyat (golongan menengah ke atas) membayar pajak. Padahal, kesadaran rakyat (golongan menengah ke atas) membayar pajak sangat diyakini akan mampu mengurangi ketergantungan pemerintah pada utang luar negeri.

Jika pun pemerintah masih berutang, peruntukannya jangan lagi bertumpu pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsumtif, tetapi seharusnya bulat pada program (investasi) yang langsung menukik mematikan akar kemiskinan. Tentu bukan dengan bantuan langsung tunai (BLT) atau sejenisnya, tetapi dengan program yang membangkitkan kemandirian.



Gayus Halomoan Tambunan

Pola pembangunan ekonomi yang bertitik sentral pada angka persentase pertumbuhan, tampaknya juga sudah terbukti kurang berhasil mengurangi kemiskinan. Pola pembangunan dengan mengejar persentase pertumbuhan (growth atau GNP/GDP) yang diterapkan di negara-negara maju (*industrialized*) itu telah membuai Indonesia larut dalam mimpi yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang *industrialized* sama seperti negara-negara maju (kreditor) yang telah lebih dulu maju.

Sebenarnya, Mahbub Ul Haq sudah lama mengingatkan bahwa pola pembangunan dengan mengejar angka pertumbuhan seperti itu adalah model pembangunan palsu (*the catching up fallacy*). Dalam pandangan Mahbub Ul Haq sangat tidak mungkin negara-negara berkembang dengan mengandalkan utang akan mengejar dan menyamai negara-negara maju (kaya). Apalagi bila dikaitkan dengan penelitian Prof. Dr. Jeffry Winters bahwa sepertiga dari total utang telah dikorupsi oleh para elit penguasa bersama Bank Dunia. Semakin sempurnalah kepaluan pembangunan tersebut.

Kini saatnya para elit (penguasa) pengambil kebijakan politik ekonomi Indonesia segera bertobat, supaya rakyat tidak makin miskin. Guru Besar IPB Prof Ali Khomsan dalam artikelnya bertajuk Menggugat Ukuran Kemiskinan mengakhirinya dengan pertanyaan: Apakah pemerintah telah gagal dalam program penanggulangan kemiskinan? Bagaimana dampak program beras untuk rakyat miskin (raskin), Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin (Askeskin), sekolah gratis, kompor gas gratis yang selama ini dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat miskin?

Dia pun menjawab sendiri pertanyaan itu secara diplomatis. Menurut Prof Ali Khomsan, kehidupan yang kini dirasakan semakin sulit membuat rakyat miskin



Utang seharusnya dimanfaatkan untuk mematikan akar

memimpikan kembali zaman normal ataupun zaman Orde Baru yang meski sama-sama sulit, saat itu harga pangan relatif terjangkau oleh daya beli mereka.

Kondisi terakhir, setelah pemerintah menaikkan tarif dasar listrik, mulai 1 Juli 2010, berdampak langsung pada semakin membubung tingginya harga berbagai barang, termasuk kebutuhan bahan pokok. "Kondisi ini membuat beban rakyat yang sudah berat semakin berat," tulis Kompas (13/7/2010).

Kenaikan harga kebutuhan pokok ini, menurut Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Rekson Silaban, jelas memukul daya beli buruh dengan pendapatan yang relatif tidak berubah. Menurutnya, penurunan daya beli buruh terjadi karena kenaikan upah buruh lebih lambat dari inflasi. Dalam lima tahun terakhir, kata Rekson, buruh semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup karena kenaikan harga barang yang sangat cepat.

Hal yang hampir sama juga dialami para petani. Meski produksi pangan terus meningkat, tetapi pendapatan riil petani tidak juga meningkat. Badan Pusat Statistik mencatat, nilai tukar petani terus



ar kemiskinan.

merosot. Pada tahun 1976, nilai tukar petani sudah mencapai 113. Bahkan pada tahun 1979 dan 1989 telah mencapai angka tertinggi, yakni 117. Lalu, ironisnya, pada tahun 2009, nilai tukar petani bulanan tertinggi hanya 101, jauh merosot dari nilai tukar petani 1979 dan 1989 (117).

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian yang juga Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Jember, Rudi Wibowo, mengatakan peningkatan produksi pangan tidak mampu memberikan peningkatan pendapatan riil yang memadai bagi aktor utama peningkatan produksi pangan, yaitu petani.

Menurut Rudi, hal ini terjadi karena kebijakan pangan nasional terjebak dalam peningkatan produksi yang membabi buta. Peluang investasi usaha budidaya pangan diberikan kepada swasta nasional dan multinasional, yang selama ini menggarap sarana produksi yang menjadi kunci penguasaan pangan nasional. "Kesejahteraan petani terabaikan akibat ketidakjelasan arah pengembangan teknologi dan tidak konsistennya kebijakan. Sementara itu, kelembagaan yang berkenaan dengan petani dan pertanian cenderung makin tergerus," kata Prof. Rudi Wibowo.

Pendapat senada kerap disampaikan Guru Besar Emeritus Institut Pertanian Bogor, yang juga mantan Menteri Pertanian, Bungaran Saragih, bahwa politik pertanian pada masa lalu yang berorientasi pada peningkatan produksi 'menjebak' petani pada kegiatan usaha tani yang nilai tambahnya kecil. Karena kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah besar, seperti perdagangan, pengadaan sarana produksi pertanian, serta kegiatan pengolahan hasil dan perdagangan produk pertanian (off farm) diserahkan kepada yang bukan petani.

Penguasaan lahan petani juga makin sempit. Bahkan jumlah petani yang berubah status menjadi buruh tani pun makin banyak karena tidak lagi memiliki lahan sendiri. Kini banyak di antara mereka menjadi buruh di tanah sendiri. Petani sudah semakin miskin dan termarginalkan dalam proses pembangunan. Sebab kebijakan pangan saat ini justru menempatkan produksi pangan dalam skema industrialisasi yang mengedepankan kapitalisme sebagai ujung tombaknya.

Pendekatan kapital dalam produksi pangan itu, ternyata justru semakin meminggirkan peranan jutaan kaum tani. Karena petani langsung diperhadapkan berkompetisi dengan kekuatan modal yang dimiliki perusahaan-perusahaan besar. Apalagi tanpa subsidi yang memadai petani pasti kalah. Sebab mereka tidak punya kekuatan modal, efisiensi produksi, kesenangan pengetahuan, serta tidak menguasai akses menuju pasar komoditi pangan.

Semua itu, berdampak pada tetap tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dengan mengikuti standar yang digunakan pemerintah (BPS), jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan yakni Rp.211,726) di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33 persen). Hanya turun 1,51 juta dibandingkan dengan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen).

Penurunan ini jauh lebih kecil daripada penurunan angka kemiskinan dari Maret 2008 ke Maret 2009. Sebagaimana dikemukakan Kepala BPS Rusman Herawa, pada Maret 2009 jumlah penduduk miskin mencapai 32,53 juta jiwa, sementara pada Maret 2008 mencapai 34,96 juta jiwa, turun 2,43 persen. Sedangkan penurunan angka kemiskinan dari Maret 2009 ke Maret 2010 hanya sebesar 0,82 persen.

Jika dilihat dalam realita, jumlah penduduk miskin Indonesia jauh dari angka yang dipublikasikan pemerintah (BPS) tersebut. Pertanyaannya, apakah realistis orang yang berpengeluaran Rp.7000 per hari untuk semua kebutuhannya, mulai dari makan dan segala kebutuhan lainnya, tidak lagi tergolong miskin.

Barangkali akan lebih realistis bila penentuan garis kemiskinan mengacu pada Bank Dunia yakni berpendapatan sebesar USD 2 per kapita per hari, ekuivalen Rp. 552.000 per bulan (kurs Rp.9.200/USD 1). Jika mengacu pada Bank Dunia, maka jumlah orang miskin di Indonesia lebih 90 juta orang. ■ BI/crs/ms



Pemberian utang dianggap sebagai skenario untuk mengeruk sumber daya alam.



Kristiani Yudhoyono

## Ibu Ani untuk Bangsa

**Istri seorang presiden dengan sendirinya mendapat kehormatan sebagai ibu negara. Bagi Ibu Ani Yudhoyono, panggilan itu tampaknya tidak hanya sekadar kehormatan, tapi juga tanggung jawab. Hal itu terlihat dari aksi kesehariannya dalam upaya membangun kehidupan bangsa.**

Seorang perempuan yang menjadi ibu rumah tangga, tentu dengan sendirinya akan duduk sebagai seorang istri bagi suaminya sekaligus sebagai ibu bagi anak-anaknya. Artinya, dia akan menjadi mitra atau teman pemberi dorongan bagi suaminya, juga menjadi pelindung, pendidik, sekaligus jadi sahabat bagi anak-anaknya. Tapi bagi istri seorang presiden, posisi itu akan bertambah lagi karena ia juga menjadi ibu negara, yang tidak lagi hanya dimiliki oleh anak-anak yang dilahirkannya, tapi juga jadi ibu bagi seluruh rakyat negaranya.

Dalam sejarah kelahiran orang-orang 'besar' di seluruh dunia, selalu tidak lepas dari adanya seorang istri yang hebat di samping mereka. Demikian halnya di Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan seorang tokoh yang telah mencatat sejarah dalam pemerintahan Republik Indonesia dengan menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, sekaligus berhasil mempertahankannya pada periode kedua. Di samping itu, Presiden SBY juga tentu telah membuat beberapa prestasi dalam hidupnya yang membanggakan bangsanya, atau paling tidak keluarganya. Keberhasilan itu, seperti disebutkan di atas tentu tidak terlepas dari keberadaan

seorang istri yang hebat di sampingnya, yakni Ibu Kristiani Herrawati atau yang akrab dipanggil Ibu Ani Yudhoyono. Bagaimana Ibu Ani menopang suaminya dalam menjalankan tugas yang sangat berat sebagai presiden, tentu sangat menarik untuk diketahui.

Bagi Ibu Ani sendiri, menjadi istri presiden tentu merupakan satu kebanggaan dan kehormatan, tapi juga menjadi tanggung jawab. Hal tersebut ditunjukkannya dari kegiatan kesehariannya yang selalu aktif dalam membangun kehidupan bangsa.

Sebagai seorang istri dalam sebuah rumah tangga, Ibu Ani tentu mendorong dan memberikan semangat pada suaminya. Menyiapkan apa-apa yang bisa dia siapkan. Intinya, membuat rumah menjadi nyaman sehingga kalau suaminya pulang ke rumah atau sedang bersama-sama dengan keluarga, ada rasa kenyamanan.

Sementara sebagai istri presiden, sebagaimana standar etika kenegaraan negara-negara di dunia pada umumnya, Ibu Ani tentu harus selalu siap mendampingi suaminya Presiden SBY menerima tamu negara, khususnya menemani istri tamu negara tersebut. Demikian halnya jika Presiden SBY pergi berkunjung ke negara-negara sahabat, Ibu Ani juga harus selalu

setia menemani. Di lingkungan Kabinet Indonesia Bersatu sendiri, ia harus bertindak sebagai ibu bagi anggota kabinet, khususnya bagi istri-istri menteri.

Di luar hal-hal yang resmi demikian, sejak tahun 2004 mendampingi SBY sebagai presiden, Ibu Ani juga banyak memberikan waktu, pemikiran dan perhatian pada masalah-masalah bangsa di luar masalah pemerintahan. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat maupun di bidang lingkungan, sosial, dan budaya. Melalui program yang dinamainya "Bersama Menuju Indonesia Sejahtera," Ibu Ani bersama ibu-ibu anggota Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), mengembangkan program Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, serta lingkungan sehat dan indah.

Di bidang pendidikan, melalui SIKIB, Ibu Negara keenam Republik Indonesia sejak suaminya Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004, ini memelopori Program Indonesia Pintar, yakni penyediaan Motor Pintar, Mobil Pintar, Kapal Pintar sebagai sarana bergerak untuk menyediakan buku-buku bacaan bagi anak-anak secara gratis. Juga rumah pintar, yakni rumah di suatu daerah yang agak jauh dari kota, seperti Rumah Pintar 'Akhlakul Karimah' yang ada di Kelurahan Cipondoh, yang menyediakan buku bacaan untuk anak-anak yang juga gratis. Dengan cara itu, anak-anak dimaksudkan akan dapat belajar sambil bermain tanpa harus berjalan jauh dari rumahnya.

Di bidang kesehatan, ibu Ani juga selalu berada di barisan depan pada setiap kampanye kesehatan. Selain itu, untuk menuju Indonesia sehat, sejak tahun 2008 Ibu Ani juga menyampaikan ide tentang Mobil Sehat, yakni mobil ambulans keliling bagi masyarakat yang ingin mendeteksi dini kesehatannya.

Beberapa asosiasi seperti pengurus daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Provinsi DKI Jakarta telah menyumbangkan mobil untuk mewujudkan ide tersebut. "Hari ini (18/1/2008) menyumbang dua unit ambulans yang akan diubah jadi Mobil Sehat," kata Murniati Widodo A.S usai mendampingi Ibu Ani menerima Dewan Pengurus ASITA DKI Jakarta di Istana Negara ketika itu.

Ambulan itu kemudian akan dirombak dan diberi fasilitas yang lebih lengkap. Tujuan Mobil Sehat ini dimaksudkan untuk deteksi dini kesehatan masyarakat dan penyuluhan kesehatan. "Contohnya, bila ada ibu hamil yang datang ke Mobil Sehat, HB-nya dicek jangan sampai terlalu rendah. Mobilitas Mobil Sehat ini juga bisa saja bergabung dengan mobilitas

Mobil Pintar. Jadi bila di suatu tempat ada Mobil Sehat bagi orang tua yang ingin diperiksa, maka anak-anaknya bisa belajar di Mobil Pintar,” jelas Murniati saat itu.

Di bidang lingkungan hidup, Ibu Ani juga tak jarang melakukan aksi penanaman pohon maupun penyebaran benih ikan. Desember 2009 misalnya, dengan tema “Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara 2009”, Ibu Ani melakukan aksi penanaman 1.000 pohon di Situ Cikaret, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong Bogor. Aksi penanaman itu dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap peduli lingkungan, terutama bagi anak-anak.

Pada kesempatan itu, Ibu Ani juga melakukan penyebaran 30 ribuan benih bandeng air tawar. Program semacam ini tidak hanya dilaksanakan di Kota Bogor saja, tapi juga di berbagai daerah lainnya pada waktu yang berbeda. Menurut anggota SIKIP lainnya, masih ada enam situ lagi yang tersebar di seluruh Indonesia yang akan dikonservasi.

terdepan mengulurkan tangan ketika kelaparan menimpa warga Yahukimo di Papua.

Dalam hal pencegahan penyakit sosial akibat narkoba, Ibu Ani juga aktif dengan selalu mengampanyekan bahaya narkotik dan obat terlarang tersebut di setiap kesempatan. Pada acara peluncuran “Aksi Peduli Anak Bangsa Bebas Narkoba” di Central Park Podomoro City Jl. S Parman Tanjung Duren Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta beberapa waktu lalu misalnya, Ibu Ani mengatakan bahaya narkoba sudah sangat serius di Indonesia karena 19 persen pengguna barang haram itu adalah kalangan remaja dan pemuda. Menurutnya, itu merupakan pertanda buruk bagi eksistensi bangsa di masa depan. Indonesia pun saat ini bukan hanya konsumen lagi tapi sudah menjadi produsen juga. Karena itu, ia mengharapkan agar setiap orangtua terus memperhatikan anak-anaknya, walaupun mereka sudah di SMA atau kuliah.

Selain disebutkan di atas, masih banyak

perempuan, Ibu Ani menunjukkan kepedulian dan perhatiannya terhadap keselamatan dan kesejahteraan para tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri, juga terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan secara umum.

Tentang TKW, Ibu Ani berharap para TKW memahami dengan seksama kontrak kerjanya sebelum bekerja di luar negeri sehingga hak dan kewajibannya terpenuhi. Ia juga mengharapkan para Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) memaparkan dengan jelas isi dari kontrak kerja kepada seluruh TKW yang akan diberangkatkan ke luar negeri. “Saya berharap, sebelum mereka diberangkatkan, dibekali dulu pengetahuan pada bidangnya. Kemudian, mereka juga harus diberitahu tentang hak dan kewajiban kalau mereka menjadi seorang tenaga kerja di luar negeri,” kata Ibu Ani.

Dalam kesempatan lain, seperti pada Malam Anugerah “Kartini Awards 2010” di Balai Kartini, Jakarta beberapa waktu yang lalu, Ibu Ani juga mengajak kaum perempuan Indonesia untuk turut memantau pelaksanaan program pemerintah mengenai perlindungan, promosi dan pemberdayaan perempuan.

Tidak ketinggalan di bidang pelestarian budaya, Ibu Ani juga menunjukkan perhatian besar. Dalam satu kunjungan ke daerah Cirebon misalnya, Ibu Ani menyempatkan berkunjung ke toko batik. Kemudian, ia juga meninjau Sanggar Batik Katura dimana banyak pelajar SMA yang belajar membuat sejak dini di sana. Pada kesempatan itu Ibu Ani menyapa para pelajar yang sedang mendemokan kegiatan belajar membuat batik. “Terimakasih ya sudah mau belajar membuat batik. Kalau begini, Ibu senang karena batik ada generasi penerusnya,” katanya seperti dikutip *presiden-sby.info*.

Demikian sebagian kecil upaya Ibu Ani dalam membangun bangsanya. Ia akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat semampu mungkin sesuai dengan kapasitasnya. Kepada semua pihak ia mengajak untuk bersama-sama membangun kepedulian sosial dan peningkatan kesejahteraan ini sesuai kapasitasnya masing-masing sehingga dapat membawa kebaikan bagi masyarakat.

Indonesia memang pantas bangga dengan apa yang dilakukan Ibu Ani selama ini, khususnya Program Indonesia Pintar dengan layanan mobil pintar, motor pintar, serta kapal pintar-nya. Jadi, jika Ibu Ani pun dengan bangga mempromosikan program tersebut dalam berbagai even, seperti di depan Sidang Umum Forum Parlemen Asia-Pasifik untuk Pendidikan (FASPPED) di Jakarta, Rabu (7/7/2010) lalu, hal itu barangkali tidaklah terlalu berlebihan.

■ BI, BS



**PEDULI:** Sebagai istri Presiden, Ibu Ani banyak memberikan waktu, pemikiran dan perhatian pada masalah-masalah bangsa.

Kegiatan itu pun bukanlah yang pertama sekali. Kegiatan serupa juga sudah pernah dilakukan pada tahun 2007 dengan tema Perubahan Iklim, sedangkan kegiatan kedua dilangsungkan pada tahun 2008 dengan tema Ketahanan Pangan.

Di bidang sosial, Ibu Ani yang kelahiran Yogyakarta, 6 Juli 1952 dari pasangan Letjen (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Alm) dan Hj. Sunarti Sri Hadiyah, ini selalu cepat merespon setiap bencana yang melanda suatu daerah di Tanah Air. Ketika bencana tsunami mendera NAD dan Nias misalnya, Ibu Ani segera mengorganisir bantuan untuk anak-anak yang kehilangan orangtuanya. Ia juga yang

lagi kegiatan sosial yang diikuti dan dikembangkan Ibu Ani. Bersama anggota SIKIB, ia juga suka menghadiri kegiatan donor darah seperti kegiatan donor darah di Departemen Pertahanan, Jakarta dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-81 beberapa waktu lalu. Mengenai kegiatan itu, Ibu Ani mengatakan, kegiatan donor darah sangat tepat dan relevan dengan kondisi nyata kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan donor darah, Ibu Ani berharap ada semangat dan kesadaran setiap warga negara tentang pentingnya persaudaraan dan saling tolong menolong antarsesama manusia.

Sementara di bidang pemberdayaan

# Nasdem Vs Golkar

Ibarat dikejar bayangan sendiri, karena diduga akan bermetamorfosa menjadi partai politik yang akan menggembosi partainya, kelahiran ormas Nasional Demokrat mencemaskan beberapa elit partai politik.

**A**wal Februari 2010 lalu, sejumlah tokoh politik, akademisi dan budayawan, antara lain Surya Paloh, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Siswono Yudo Husodo, Syamsul Mu'arif, Syafi'i Ma'arif, Anis Baswedan, dan Bambang Sujatmiko bergabung mendeklarasikan organisasi masyarakat (Ormas) Nasional Demokrat (Nasdem).

Menurut sang inisiator Nasdem, Surya Paloh, Nasdem tidak dipersiapkan untuk menjadi parpol. Tetapi lebih kepada kegiatan sosial untuk perubahan. "Pikiran kami tidak sampai ke sana (parpol.red). Untuk mendirikan parpol itu mudah, sambil 'ngopi' juga bisa. Tetapi Nasional Demokrat lain," kata Surya Paloh usai acara deklarasi di Istana Senayan Jakarta, Senin (01/02/2010) silam. Nasdem menurutnya akan lebih fokus kepada perubahan di masyarakat untuk menghadapi masa depan. Nasdem katanya akan menghimpun semangat seperti semangat yang pernah ditunjukkan semua lapisan masyarakat saat berlangsung Ganefo pada akhir tahun 1962.

Namun, walaupun sudah dijelaskan demikian, dan deklarasinya sendiri dilakukan para tokoh politik dari lintas partai dan beberapa budayawan serta akademisi seperti disebutkan di atas, mungkin mengingat latar belakang sang inisiator, yakni Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang merupakan mantan pengurus Partai Golkar, sehingga banyak yang menduga Nasdem kemungkinan besar akan bermetamorfosa menjadi partai politik (parpol).

Fajran Zein dari Banda Aceh seperti dilansir *Antara* misalnya, ketika menanggapi terbentuknya Nasdem di daerahnya menyebut, bila dilihat dari kepemimpinan Nasdem yang pernah duduk di partai politik besar di Indonesia, maka Nasdem diduga bakal menjadi parpol. "Rasanya aneh kalau para elite politik membentuk ormas, seharusnya partai politik. Saya rasa, ormas itu hanya sebagai batu lon-

catan. Kalau diterima rakyat selanjutnya akan menjadi parpol," katanya.

Hal senada juga disampaikan pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Alfian Alfian. Seperti dikatakan kepada *Rakyat Merdeka*, Alfian menilai Surya Paloh diduga sedang mencari peluang untuk membangun kendaraan politik pada Pemilu 2014, dan bisa jadi Nasdem dijadikan eksperimen politiknya.

Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum juga memperkirakan Nasdem merupakan embrio parpol. Sehingga ia menganjurkan agar lebih baik kalau dalam waktu yang tidak terlalu lama Nasdem dijadikan saja parpol. "Biar lebih jelas jenis kelaminnya," katanya belum lama ini.

Sedangkan menurut Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Ibramsyah, Nasdem murni sebuah gerakan moral yang muncul atas keprihatinan kondisi bangsa. "Ini gerakan kritis untuk mengingatkan pemerintah SBY," katanya kepada *Rakyat Merdeka*. Menurutnya, melihat Syafi'i Ma'arif, Anis Baswedan, Bachtiar Ali dan beberapa kalangan kampus ikut di dalamnya, Nasdem ini bukan embrio parpol. "Saya kira kalau jadi parpol bisa langsung bubar. Sebab, yang bergabung di situ adalah orang-orang cendekiawan dan tokoh-tokoh parpol," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar yang juga anggota Komisi I DPR, Yorrys Raweyai. Seperti dikutip *Rakyat Merdeka*, Yorrys mengatakan bahwa Nasdem sulit menjadi partai politik sebab pendirinya berasal dari berbagai unsur. Sehingga jika dipaksakan, Nasdem menurutnya akan pecah.

Sedangkan menurut salah satu deklator Nasdem, Anies Baswedan sendiri, sebagaimana dikutip *KOMPAS.com* (1/2/2010), Nasdem merupakan solusi pilihan untuk mengatasi permasalahan bangsa. Tujuan pendiriannya bukan untuk menggembosi oposisi. Orientasi ormas pun pada kegiatan nyata untuk masyarakat



**UJICOPA:** Tidak tertutup kemungkinan Nasional Demokrat partai politik.

seperti pendidikan dan kesejahteraan. Pendiri Nasdem lainnya, Sri Sultan Hamengkubuwono X juga mengatakan, alasan pendirian Nasdem adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil dalam urusan kenegaraan.

Belakangan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan tidak memberi jaminan soal masa depan organisasi yang didirikannya, terkait apakah akan tetap bergerak menjadi organisasi sosial dan kemasyarakatan, atau berganti menjadi partai politik. Artinya, Surya mengisyaratkan bahwa tidak tertutup kemungkinan Nasdem akan berubah jadi Parpol jika masyarakat menginginkan demikian.

Mendapat isyarat demikian, ditambah lagi dengan masuknya beberapa kader Partai Golkar (PG) dalam kepemimpinan Nasdem, tak urung membuat elit PG merasa khawatir, sehingga memerintahkan kader PG yang menjadi pengurus di Nasdem untuk keluar atau akan diberikan sanksi tegas, sebagaimana disampaikan Sekjen DPP PG, Idrus Marham dalam konferensi pers belum lama ini.

"Tak boleh ada keanggotaan ganda di organisasi yang bercita-cita menjadi parpol. Jadi, jangan terjebak," kata Idrus, Rabu (23/6/2010). Pasalnya, kata Idrus, wacana yang mengemuka, Nasdem akan dijadikan Parpol dengan target perolehan suara 5-10 persen. "Kalau mau mendirikan partai, ya, silakan ke Nasdem atau ke



Ormas yang diprakarsai Surya Paloh bertransformasi jadi

Golkar. Kami hanya ingin sikap gentleman saja,” ujarnya. Idrus Marham juga menyarankan Surya Paloh untuk mundur dari PG.

Pernyataan Idrus tersebut dengan cepat menjadi bahan perdebatan di kalangan politisi dan pengamat politik nasional. Bahkan menjadi perdebatan terbuka antara Partai Golkar dan Nasdem. Seperti diberitakan, pernyataan Idrus tersebut dengan cepat dibalas Surya Paloh dengan mengatakan, bahwa dia sepenuhnya memahami seruan dari Idrus Marham yang masih politisi “anak kecil” yang baru belajar berpolitik. Ia juga menyatakan agar pimpinan Golkar tak usah gelisah dan merasa terancam dengan kehadiran Nasdem yang sedang coba mengadakan perubahan di negeri ini.

Deklarator Nasdem, Poempida Hidayatulloh juga mengatakan, biarpun banyak diisi kader Golkar dan lintas partai, namun Nasdem bukan sebuah organisasi politik. Dia juga membantah jika gerakan ini muncul gara-gara rasa sakit hati Surya Paloh karena kalah dalam Munas Partai Golkar. “Bukan gara-gara sakit hati deh, tapi ini didirikan dari lubuk hati demi berbuat di bidang sosial dan moral,” katanya.

Sementara Sekjen Nasdem yang juga anggota Dewan Pembina Partai Golkar Syamsul Muarif menanggapi ancaman Idrus Marham dengan sedikit lebih

lembut. “Kami ini ormas. Kalau ada kecurigaan, Golkar sebaiknya mengirim utusannya ke Nasdem, atau Golkar yang memanggil kami. Tanya apa duduk perkaranya? Tanya sama saya, Sri Sultan, Ferry dan Surya Paloh,” katanya, Rabu (23/6). Menurutnya, sampai terakhir ini Nasdem masih menjadi Ormas yang bergerak untuk melakukan restorasi Indonesia. Belum ada keputusan menjadi parpol. Karena itu, jangan sampai menghukum atas dasar ‘jika’ menjadi parpol.

“Saya itu sudah katakan berulang kali kalau Nasdem itu Ormas. Kami tidak ada niat untuk menjadi partai. Surya Paloh bilang bukan tidak mungkin jadi partai apabila masyarakat menghendaki dan potensinya besar. Yang kita lakukan saat ini adalah melakukan yang terbaik untuk masyarakat,” terangnya.

Pedapat Syamsul didukung juga oleh Wakil Sekjen Nasdem, Irma Chaniago yang mengatakan pihaknya tidak akan menghalangi bila rakyat menghendaki agar Nasdem berubah menjadi partai politik. “Kalau sudah punya anggota 30 juta, baru bermimpi jadi parpol. Tapi yang melakukan itu harus rakyat. Setelah itu kita lakukan referendum terhadap keinginan anggota itu,” katanya kepada *Rakyat Merdeka*.

Dari pihak PG sendiri, Wakil Ketua Umum PG Agung Laksono menyerukan agar Nasdem gentleman. “Nasdem kita dengar kalau didukung akan jadi partai. Ada juga pemikiran kalau sudah niat jadi partai yang akan jadi kompetitor Golkar, sebaiknya terang terangan saja, gentleman,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (27/6/2010).

Hal senada dikatakan oleh Wakil Sekjen PG, Nurul Arifin. Nurul menyerukan agar Surya Paloh dan Nasdem *fair play*, dan jangan menggunakan bangunan parpol lain. Sementara Ketua Umum PG Aburizal Bakrie dengan gaya bahasa ironi justru menyebut bahwa Nasdem itu ormas kecil dan bukan ancaman bagi Golkar.

Di kalangan pengamat, perseteruan antara PG dan Nasdem ini pun menjadi pembahasan tersendiri. Sejumlah kalangan menilai perseteruan itu merupakan kelanjutan persaingan dan pertarungan lama yang terjadi di internal parpol berlambang pohon beringin tersebut, terutama terkait perebutan posisi Ketua Umum beberapa waktu lalu.

Peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bhakti misalnya mengatakan, pertarungan itu lebih bersifat personal. “Saya melihat pertarungannya lebih bersifat personal. Ini sisa-sisa persaingan perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar lalu antara Ical dan Paloh yang dimenangkan oleh Ical,” katanya.

Sementara itu, kalangan pengamat dan politisi sendiri melihat kehadiran Nasdem

tidak hanya ‘mencubit’ PG. Ormas ini juga disebut-sebut menjadi momok bagi dua partai besar lainnya, yakni PDIP dan Partai Demokrat (PD). Di tubuh PDIP, kekhawatiran muncul menyusul adanya kader PDIP, yakni Budiman Sudjatmiko yang menjadi anggota Nasdem. Sementara di PD, Nasdem dianggap menjadi kompetitor bila ormas tersebut menjadi Parpol, karena keduanya sama-sama mengusung misi demokrasi.

Namun, berbeda dengan PG, PDIP menanggapi permasalahan ini dengan halus. Seperti dinyatakan Ketua Dewan Penasehat PDIP Taufik Kiemas, PDIP tidak melarang kadernya bergabung di Nasdem. Taufiq mengatakan, Nasdem memiliki visi nasionalisme yang sama dengan PDIP. Namun demikian, Taufiq akan menegur kadernya jika Nasdem sudah mendeklarasikan diri menjadi parpol.

Tapi, kalau Nasdem merubah status menjadi parpol, kadernya diperingatkan untuk kembali atau meninggalkan PDIP.

Tidak jauh berbeda dengan dua partai di atas, Partai Demokrat (PD) juga memandang Nasdem sebagai kompetitor jika memang menjadi parpol dalam Pemilu 2014. “Setiap partai itu kompetitor,” demikian ujar Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR Senayan, (24/6) terkait isu Nasdem menjadi parpol.

Namun Marzuki yakin PD tidak akan tersaingi oleh Nasdem. “Kita membangun daya saing, menarik hati rakyat, itu tergantung perjalanannya nanti,” katanya.

Belakangan, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie juga akhirnya mengatakan tidak melarang jika ada kadernya gabung dengan Nasdem selama itu masih ormas. “Selama Nasional Demokrat masih ormas, saya tidak melarang saudara-saudara bergabung ke sana,” kata Aburizal saat konsolidasi DPP Golkar dengan ormas yang didirikan dan mendirikan Golkar di Hotel Sahid, Jakarta. Aburizal juga mengatakan dirinya tidak akan memberi sanksi jika ada yang gabung. Karena anggota Golkar tidak dilarang gabung dalam ormas. Namun jika Nasdem berubah jadi partai, ia mengatakan kadernya harus memilih tetap di Golkar atau ke Nasdem.

Terlepas dari kecemasan dari parpol-parpol yang ada sekarang, kehadiran Nasdem yang jajaran pengurusnya diawaki oleh para mantan pengurus PG itu, yakni Surya Paloh sebagai Ketua Umum; Syamsul Mu’arif sebagai Sekjen; Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Ketua Dewan Pertimbangan; dan Dr. (HC) Ir. H. Siswono Yudo Husodo sebagai Ketua Dewan Pakar Nasdem, ini telah mengawali pertarung politik tahun 2014. Pecahnya kembali ‘kapal’ Partai Golkar tampaknya semakin susah dihindarkan. ■ MS



AKUISISI: Partai Amanat Nasional (PAN) mewacanakan dilakukannya penyederhanaan partai.

# Konfederasi Parpol

**Konfederasi atau akuisisi partai politik (parpol), solusi untuk menampung suara parpol kecil atau hanya untuk merebut kue kekuasaan?**

Pemilu 2014 masih 4 tahun lagi, namun mengingat kemungkinan dinaikkannya ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold dan atau electoral threshold) sebagai syarat menjadi pemenang pemilu, sejumlah partai politik (parpol) sudah mulai mengkonsolidasikan diri untuk mempertahankan eksistensinya dengan beberapa gagasan, seperti konfederasi parpol.

Jika ambang batas parliamentary threshold (PT) pada Pemilu Legislatif 2014 menjadi 5% jadi disahkan dalam revisi paket UU Politik yang akan datang, maka sesuai hasil rekapitulasi Pemilu 2009, partai yang lolos kemungkinan hanya tinggal enam. Seiring dengan itu, akan banyak pula suara partai politik yang hilang atau tidak terwakili. Berpijak dari perhitungan tersebut, di samping alasan menjaga stabilitas perpolitikan nasional, beberapa kader Partai Amanat Nasional (PAN) mewacanakan ide dilakukannya penyederhanaan partai dengan melakukan konfederasi atau penggabungan parpol.

“Ada 40 persen suara yang hilang yang bisa mendatangkan instabilitas politik,” kata Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto dalam diskusi “Penyederhanaan Parpol: Konfederasi atau Akuisisi” di Pancoran Jakarta, Selasa (6/

7/2010). Menurutnya, konfederasi parpol adalah salah satu jalan keluar bagi partai-partai kecil apabila parliamentary threshold (PT) dan electoral threshold (ET) disahkan dalam revisi paket UU Politik.

PAN sendiri menyatakan sudah mengajukan dua model konfederasi yaitu konfederasi permanen yang akan terbentuk sebelum pemilu digelar, dan konfederasi parsial yang akan dibentuk setelah pemilu.

Menanggapi ide ini, para politisi dan pengamat politik memberi tanggapan berbeda. Direktur Lingkaran Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti misalnya memperkirakan, wacana konfederasi partai ini akan laris manis karena sejumlah parpol tidak ingin kehilangan suaranya. Menurut perkiraannya, parpol-parpol akan lebih siap melepas ideologinya ketimbang kehilangan suara.

Apa yang diperkirakan Rangkuti, mungkin saja terjadi. Partai Bintang Reformasi (PBR) yang sebelumnya pernah dikabarkan bergabung ke Partai Hanura dan PKNU misalnya, belakangan ini dikabarkan tengah mengadakan kerjasama dengan Partai Golkar dan kemungkinan akan melebur jika PT naik jadi 5%. Partai Matahari Bangsa (PMB) juga dikabarkan setuju dengan ide konfederasi partai yang digagas PAN ini. Sejumlah

partai yang tidak lolos electoral threshold lainnya seperti, PNBK, PBB, dan PPRN juga dikabarkan sudah mengindikasikan akan bergabung dengan partai yang lebih besar.

Sementara itu, tanggapan sedikit berbeda disampaikan pakar politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bhakti. Menurutnya, dari pengalaman sejarah, merangkul parpol besar tidak mungkin dilakukan. Karena, internal partai memiliki tokoh dan ego masing-masing. Dia mencontohkan, Partai Masyumi yang berusaha berkongsi dengan merangkul semua partai berhaluan Islam pada pemilu puluhan tahun silam, hasilnya justru menjadi semakin kecil. Karena itu, ia lebih menekankan untuk merangkul partai-partai kecil yang tidak memiliki wakil di parlemen. Efektifitas meleburnya partai-partai kecil ke dalam partai besar untuk menaikkan perolehan suara, menurutnya juga belum tentu otomatis akan menambah perolehan suara partai tersebut karena belum tentu diikuti masyarakat di tingkat akar rumput. “Bagaimanapun ide konfederasi ini berasal dari elite partai, belum tentu ditingkat akar rumput berdampak sama,” katanya.

Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera dengan tegas menolak usulan PAN ini. Menurut politisi PKS, Agoes Poernomo, dari pengalaman sebelumnya, partai-partai yang memberikan suaranya kepada partai tertentu supaya bisa meningkatkan jumlah kursinya di parlemen ditengarai telah menjadi ajang money politics. “Bisa jadi ajang money politics,” ungkapnya.

Pendapat senada disampaikan President University AS Hikam. Menurut dugaannya, konfederasi ini hanya sebatas upaya para pimpinan partai gurem untuk mendapatkan bagian kue kekuasaan pada 2014, bukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dengan dalih memperbaiki sistem politik nasional. Menurutnya, wacana ini akan lebih memunculkan banyak mudharat. Salah satunya adalah perebutan posisi di internal partai yang makin memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut menurutnya, sistem kepartaian yang berlangsung saat ini sudah berada dalam jalur yang benar, sehingga tidak perlu lagi dirusak dengan konfederasi.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum berpendapat upaya politik internal PAN itu sah-sah saja, namun kalau gagasan itu dilakukan untuk Pileg 2014 dalam konteks untuk Sekretariat Gabungan (Setgab) partai pendukung Presiden SBY, hal itu sulit dilakukan karena tidak ada dasar yang kuat. Menurutnya, kalau pada pemilu legislatif, partai-partai anggota Setgab cenderung akan maju dengan bendera sendiri-sendiri. Tetapi kalau untuk urusan pilpres, Setgab bisa saja kembali berkoalisi. ■ **BS, JK**

# TNI Ikut Memilih, Baikkah?



**BUKA-TUTUP:** Tarik menarik boleh tidaknya TNI menggunakan suaranya dalam pemilu masih terus digulirkan, walau pengalaman sebelumnya TNI sudah terbukti.

**Di tengah giatnya TNI mengembalikan dirinya sebagai murni tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara profesional. Wacana pemberian hak pilih kepada institusi ini seolah ingin mengulang masa lalu.**

**D**i zaman Orde Baru, tentara nasional dijadikan sebagai alat pendukung pemerintah yang sedang berkuasa dengan pemberian peran ganda yang ketika itu dikenal dengan istilah dwi fungsi ABRI yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Setelah era reformasi, semua alat negara dan perangkat pemerintahan, termasuk TNI dituntut mereformasi diri. TNI yang sebelumnya sering dimanfaatkan oleh kekuatan politik sepihak itu pun pelan-pelan berubah menjadi TNI yang profesional, jauh dari kepentingan politik. Hal tersebut bisa dilihat dari sikap TNI/Polri yang memang benar netral dalam tiga kali pemilu terakhir ini.

Di internal TNI, mereka terus berbenah. Bahkan berbagai kalangan menilai TNI sangat cepat merespon tuntutan reformasi internal. Hampir 85 persen TNI telah menjalankan reformasi birokrasi yang diinginkan. Setidaknya, ada beberapa momentum yang telah dilakukan, seperti merubah paradigma tentang TNI yang sebelumnya sering jadi alat kekuasaan menjadi hanya alat kekuatan pertahanan dan keamanan.

Namun baru-baru ini, apa yang sudah berjalan selama 12 tahun ini sedikit terusik oleh adanya wacana pemberian hak pilih kepada TNI/Polri melalui revisi UU No 10/2008 tentang Pemilihan Umum Legislatif dan UU No 42/2008 tentang Pemilihan Presiden/Wapres.

Secara prinsip, TNI/Polri sebagai warga

negara memang memiliki hak pilih. Namun, menimbang perannya yang harus netral, sementara fakta historis menyiratkan hal berbeda. Maka jika saat ini hak pilih diberikan kepada TNI, ada kekhawatiran netralitas yang mulai pulih akan terganggu.

Dari segi kuantitas, jumlah anggota TNI dan Polri aktif memang tidak fantastis. Sesuai data tahun 2009, jumlah anggota TNI aktif hanya 432.129 personil, dan Polri sekitar 400.000 personil. Artinya, hanya sekitar 0,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Tapi jika ditambah dengan keluarga besar TNI dan Polri yakni, para purnawirawan, anak-istri atau suami, hingga yayasan yang memiliki hubungan dengan dua institusi tersebut, jumlahnya akan cukup signifikan untuk menjadi lumbung suara.

Menyadari dampak dari ikut tidaknya TNI/Polri memiliki hak pilih, wacana ini pun mendapat tanggapan cukup besar dari pengamat militer maupun pengamat politik. Bagi sebagian kalangan, wacana ini dianggap terlalu prematur untuk dibicarakan. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens misalnya menyebut, walau di negara-negara maju hak suara sudah diberikan kepada institusi seperti TNI/Polri, hal itu karena mereka sudah jauh lebih profesional sehingga tidak mengkhawatirkan bila mereka ikut pemilu. Berbeda dengan Indonesia, kedua institusi tersebut seringkali dipolitisasi demi kepentingan politik tertentu sehingga terjebak dalam paradigma lama. Terlebih lagi sebelumnya,

wacana ini juga sudah pernah dimunculkan oleh anggota DPR periode 2004-2009, namun ditolak berbagai kalangan, bahkan oleh TNI sendiri. Karena prajurit menyadari TNI bukan organ konstitusi, tapi organ negara.

Senada dengan itu, anggota Komisi I DPR Hidayat Nurwahid juga mengatakan, DPR harus betul-betul mempertimbangkan apakah dalam UU pemilu mendatang TNI bisa dilibatkan atau tidak. Ditambahkan mantan Ketua MPR itu, sebelum ikut pemilu, TNI dan Polri harus bisa membuktikan dirinya bukan sebagai alat kekuasaan, serta tidak terkooptasi dengan kepentingan tertentu (dapat dipilih).

Parpol-parpol sendiri memberikan pandangan berbeda tentang wacana ini. Beberapa pejabat teras partai seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKS memberikan sinyal setuju jika TNI/Polri memiliki hak suara. Sementara PDI Perjuangan dan PPP dengan tegas menolaknya.

Golkar yang selama 32 pemerintahan Orde Baru pernah dekat dengan TNI menyambut wacana diberikannya hak pilih TNI/Polri dalam UU. Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, sama seperti PNS, TNI/Polri juga memiliki hak untuk berpolitik. Ia juga meminta masyarakat agar tidak curiga akan terbukanya kembali kekuasaan militer, asalkan tidak ada lagi Fraksi TNI di DPR.

Walau tidak memiliki hubungan kedekatan dengan TNI, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta juga setuju dengan wacana ini. Menurutnya, TNI sudah cukup merestrukturisasi diri dari dwifungsi ABRI yang pernah berlaku pada masa Orde Baru. "Saya secara pribadi mendukung pada pemilu 2014 TNI sudah ikut memilih. Sejak 1999 TNI tidak ikut memilih. Persoalannya, saat itu dwifungsi mau dihilangkan. Sekarang dwifungsinya sudah dihilangkan akan lebih netral pada pemilu 2014," ujar Anis.

Sekjen Partai Demokrat (PD) Edhie Baskoro juga setuju dengan wacana ini. Ibas mengatakan, reformasi di tubuh TNI sudah berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Sementara itu, pendapat berbeda disampaikan oleh Fraksi PPP DPR. Seperti dikatakan Wakil Ketua Fraksi PPP Romahurmuzzy, TNI sebaiknya tetap berada dalam posisi netral dalam mengawal ideologi politik negara. "TNI lebih dibutuhkan sebagai pengawal ideologi negara dan penjaga wawasan Nusantara. Karenanya, sebaiknya TNI tetap dalam posisi netral," katanya. Menurutnya, meski hanya memilih, masih tetap akan berpotensi menggiring TNI dalam ketidakutuhan. ■

# Habis Korupsi Terbitlah Teror



**TEROR:** Tama S Langkun salah satu pelopor kasus dugaan rekening mencurigikan sejumlah perwira tinggi Polri ke KPK dianiaya orang tak dikenal.

**Diduga karena semakin terpojok oleh pemberitaan pers dan kegigihan para aktivis, koruptor atau kroninya berusaha melakukan teror untuk menakut-nakuti para pejuang anti korupsi.**

**K**ekerasan terhadap penggiat anti-korupsi kembali terjadi. Baru-baru ini, nasib malang menimpa seorang aktivis ICW (Indonesian Corruption Watch) bernama Tama Satrya Langkun. Peristiwa naas itu terjadi pada Kamis 8 Juli 2010 dinihari sekitar pukul 03.45. Tama dianiaya oleh 4 orang tak dikenal di Duren Tiga, Jakarta Selatan setelah menyaksikan pertandingan sepakbola Piala Dunia di Kemang, Jakarta Selatan. Akibat penganiayaan tersebut, Tama menderita memar dan luka di beberapa bagian tubuh, seperti luka akibat benda tumpul di tangan dan luka bacokan di kepala. Ketika itu, ia pun harus menjalani perawatan di RS Asri, Jalan Duren Tiga, Jakarta.

Beberapa hari sebelum kejadian, kepada kawan-kawannya Tama mengungkapkan bahwa ia sempat dikuntit dan diteror sejumlah orang. Mengingat Tama adalah salah satu pelapor kasus dugaan rekening mencurigikan milik sejumlah Perwira Tinggi Polri ke KPK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, sehingga banyak pihak yang menduga kekerasan yang diterima Tama itu berkaitan dengan aktivitasnya.

Teror terhadap pejuang anti korupsi memang cukup menonjol belakangan ini. Beberapa waktu sebelum penganiayaan Tama, dan atau tidak lama setelah pemuatan tulisan mengenai rekening gendut oknum perwira Polri di Majalah *Tempo*, penyerangan dan aksi pelemparan bom molotov juga terjadi pada kantor majalah *Tempo* di Jakarta Pusat oleh sejumlah orang tak dikenal. Karena kedua kasus tersebut terkait dengan lembaga kepolisian, tak mengherankan jika ada yang menuding bahwa orang-orang yang melakukan

teror itu kemungkinan besar adalah oknum-oknum dari pihak kepolisian sendiri.

Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko, "Tempo dibom setelah menulis rekening gendut perwira Polri, dan Tama dibacok setelah melaporkan kasus rekening Polri ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."

Sebaliknya, tuduhan tersebut langsung dibantah Kapolri Bambang Hendarso Danuri. Ia mengatakan, bahwa itu merupakan taktik adu domba antara kepolisian dan Tempo. Hal senada juga diungkapkan Koordinator IPW (Indonesia Police Watch) Neta S Pane. Neta berargumentasi, bahwa menyorot bukanlah karakter dari kepolisian. IPW justru khawatir ada pihak tertentu yang mengadu domba Kepolisian, pers, dan LSM, karena kasus ini beriringan dengan laporan ICW serta pemberitaan Majalah Tempo soal dugaan rekening beberapa perwira Polri yang tak lazim.

Sementara itu, kekerasan itu sangat disesalkan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan. Mereka mengancam keras penganiayaan fisik terhadap aktivis ICW Tama Langkun atau aktivis prodemokrasi lainnya.

Tidak hanya aktivis, Presiden Yudhoyono juga menunjukkan simpatinya dengan cara menjenguk Tama ke RS Asri Sabtu (10/7/2010). Pada kesempatan itu, Presiden juga mengaku telah meminta Kapolri Bambang Hendarso Danuri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Di belakang Presiden SBY, beberapa tokoh nasional seperti Ketua MK Mahfud MD dan lain sebagainya juga bergantian hadir menjenguk Tama.

Sementara Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar yang juga menyesalkan aksi kekerasan tersebut berharap agal hal itu tidak menyurutkan perjuangan aktivis antikorupsi di Indonesia. Menurutnya, pemerintah mendukung upaya LSM untuk mengawasi program pemberantasan korupsi. Pendiri ICW Teten Masduki pun menegaskan, gerakan antikorupsi tak takut dengan teror ini. "Tujuan teror adalah untuk menciptakan rasa takut. Namun, saya tegaskan, kami tak takut," ujarnya. Ia menjamin, ICW dan juga gerakan antikorupsi lain akan terus melawan. "Ini malah akan menguatkan gerakan antikorupsi," katanya.

Perilaku korupsi yang telah membudaya di Indonesia menimbulkan kekhawatiran para aktivis antikorupsi. Dampak korupsi yang maha dahsyat karena dianggap sebagai faktor utama penyebab kemiskinan struktural dan kesenjangan sosial. Sebagaimana lazimnya sebuah perjuangan, tak ada yang tanpa resiko. Ancaman, intimidasi hingga teror percobaan pembunuhan menghantui hari-hari mereka yang tak lelah menyuarakan ketidakadilan untuk membela nasib rakyat kecil.

Selain terhadap ICW dan Tempo, teror yang sama juga sudah sering diterima LSM di sejumlah daerah. Tercatat, sejumlah intimidasi mulai dari perusakan, penembakan hingga pembunuhan telah diterima para aktivis. Seperti peristiwa yang dialami oleh Ketua LSM Masyarakat Pati Antikorupsi (Mapak) Fariq Nur Hidayat, dimana kediamannya dirusak oleh sejumlah orang tak dikenal.

Upaya percobaan pembunuhan juga dialami oleh seorang aktivis LSM Kelompok Pemantau Korupsi Daerah (KPKD) Probolinggo, Abdul Qodir alias Adeng yang saat itu rajin menyoroti kasus dugaan penyuntatan dana bantuan bencana alam puting beliung di Probolinggo. Adeng ditembak di kepalanya oleh orang tak dikenal pada 28 Maret 2009. Beruntung, peristiwa itu tak sampai merenggut nyawanya.

Nasib naas terjadi pada DR. IR. Oddy Manus MSc, seorang alumnus cendekiawan kelautan Jepang, yang juga merupakan Dosen Unsrat dan Wakil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Oddy terbunuh dengan sejumlah luka bacokan, jasadnya ditemukan pada tanggal 23 Desember 2006 setelah sebelumnya diculik pada tanggal 9 Desember 2006. Peristiwa sadis ini ditengarai ada kaitannya dengan aktivitas Oddy yang waktu hidupnya sangat getol membuka borok kasus korupsi balai benih ikan di Dinas Perikanan & Kelautan Sulut. ■



# Yusril Vs Hendarman

**Perseteruan antara Yusril dan Jaksa Agung Hendarman memasuki babak baru permasalahan hukum di Indonesia. Apa pengaruhnya terhadap presiden.**

**P**asca ditetapkannya, Yusril Ihza Mahendra menjadi tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), mantan Menteri Kehakiman dan HAM juga Mensesneg itu balik menuduh Hendarman Supandji telah menyalahi wewenang, karena jabatan Hendarman sebagai Jaksa Agung tidak sah. Yusril pun mengajukan uji materi UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan, khususnya mengenai validitas pasal 16 dan 22 terhadap pasal 1 ayat 3 dan 28d ayat 1 UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi tantangan Yusril, Jaksa Agung Hendarman meradang. Namun ia menegaskan, hal tersebut tidak sedikit pun memengaruhi langkah Kejagung untuk mengusut kasus dugaan korupsi senilai sekitar Rp 420 miliar itu.

Menurut kejaksaan, kasus ini berawal dari adanya program Sisminbakum di Kementerian Kehakiman dan HAM pada tahun 2000 silam. Sisminbakum adalah sistem di Direktorat Administrasi Hukum Umum (Dit AHU) yang digunakan untuk mengelola jasa hukum, berupa pemesanan nama perusahaan, pendirian dan perubahan badan hukum, pemeriksaan profit perusahaan di Indonesia, serta konsultasi hukum. Dengan mengakses laman [www.sisminbakum.com](http://www.sisminbakum.com), penguasaan badan hukum bisa dilakukan.

Sistem yang mulai beroperasi pada 4 Oktober 2000 itu diberlakukan melalui SK Menteri Nomor M01/HT/01/01/2000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra ketika itu. Berhubung ketika itu negara masih mengalami kesulitan keuangan tapi IMF dan reformasi mempersyaratkan

adanya kemudahan mendirikan perusahaan, maka Yusril menunjuk PT Sarana Rekatama Dinamika (PT. SRD) yang didirikan Hartono Tanoesoedibjo sebagai pelaksana.

Pengurusan melalui sistem ini dipungut biaya sebesar Rp 1.350.000. Sejak dibuka, sekitar 200 pemohon setiap hari selalu masuk melalui sistem ini. Seluruh uang biaya akses tersebut masuk ke rekening PT. SRD yang dikuasai Hartono.

Untuk pembagian hasil biaya akses tersebut, PT. SRD kemudian membuat perjanjian dengan Koperasi Pengayoman, -koperasi di Kementerian Kehakiman dan HAM. Pembagian disebutkan, 90% keuntungan kotor diperuntukkan bagi rekanan (PT SRD), dan sisanya (10%) untuk koperasi. Sebagai turunan dari perjanjian itu, koperasi kemudian membuat kesepakatan lagi dengan Dirjen AHU yang ketika itu dijabat oleh Romli Atmasasmita, dimana yang 10% tadi kemudian dibagi dua lagi dengan pembagian, 60% untuk Dit. AHU dan 40% untuk koperasi.

Perjanjian inilah yang kemudian menjadi dasar kejaksaan menjadikan Romli sebagai tersangka/terdakwa, dan Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan hukuman 2 dan 1 tahun penjara kepada Romli.

Romli yang sejak awal membantah adanya surat perjanjian itu telah mengadukan hal itu kepada polisi. Belakangan polisi telah menetapkan salah karyawan koperasi sebagai tersangka pemalsuan surat perjanjian itu. Romli sendiri juga telah mengadukan perampasan hak azasinya kepada Komnas HAM.

Hasil pemeriksaan BPK tidak menyatakan ada kerugian negara dalam Sisminbakum ini. Namun kejaksaan tampaknya berkeyakinan ada kerugian negara atas hitu-

ngan kejaksaan sendiri. Dengan dasar itu, Kejagung pun membidik orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi.

Dirjen AHU 2002, Romli Atmasasmita dibidik dan didakwa serta telah divonis Pengadilan Tinggi Jakarta dengan hukuman 1 tahun penjara serta membayar uang pengganti US\$ 2.000 dan Rp5 juta subsider 2 bulan penjara. Romli pun kasasi ke MA.

Syamsuddin Manan Sinaga, Dirjen AHU 2006-2008 juga sudah divonis pengadilan tinggi dengan hukuman 1 tahun penjara, serta membayar uang pengganti RP.344 milyar dan US\$13.000.

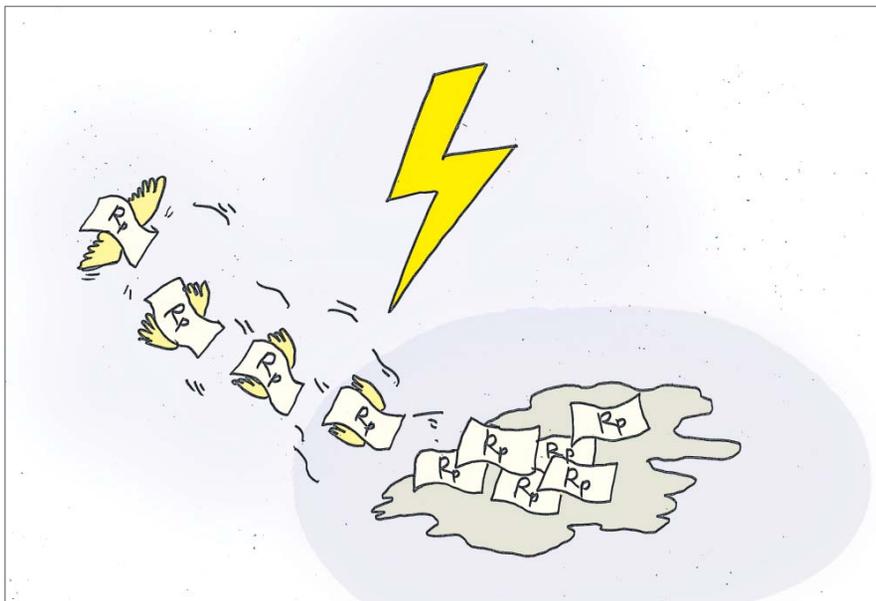
Sejak divonis bersalah, Yohannes Waruntu yang merasa diperalat Hartono dalam penempatan dirinya sebagai Dirut PT. SRD kemudian menuntut agar Yusril dan Hartono segera dijadikan tersangka. "Saya hanya boneka," katanya memberi alasan. "Saya tidak pernah menandatangani akta pendirian itu," lanjutnya. Menurutny, pendiri PT Sarana Rekatama adalah Gerard Yakobus, -Bendahara Partai Bulan Bintang ketika itu, dan adik dari Hartono yang bernama Bambang "Rudi" Rudianto Tanoesoedibjo.

Akhirnya, Yusril dan Hartono pun dijerat sebagai tersangka. Jaksa yakin, Yusril terlibat sejak awal perencanaan Sisminbakum. Namun, Yusril menganggap penetapan dirinya jadi tersangka itu bernuansa politis. Karena itu, ketika diperiksa oleh Kejagung pada 1 Juli dan 12 Juli 2010 lalu, Yusril menolak memberi keterangan. Dia bahkan menyebut, Hendarman Supandji telah menyalahi wewenang karena jabatannya sebagai Jaksa Agung tidak sah. Berkaitan dengan itu, Yusril pun mengajukan uji materi UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan, khususnya validitas pasal 16 dan 22 terhadap pasal 1 ayat 3 dan 28d ayat 1 UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Menanggapi tuduhan Yusril tersebut, secara pribadi Ketua MK Mahfud MD menilai, jabatan seorang Jaksa Agung memang bermasalah. Karena, ada dua pijakan UU dalam hal ini, yakni UU Kejaksaan yang menuntut jaksa agung adalah hakim karir dan UU Kementerian Negara yang menyebutkan jaksa agung setingkat menteri seperti Kapolri yang tidak memiliki masa pensiun.

Sementara pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin berpendapat tidak ada masalah dengan tidak dilantikannya Hendarman pada 20 Oktober 2009 saat pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu 2. "Masa jabatan jaksa agung tidak ikut kementerian negara. Sejak 2009, siapapun harus tunduk dengan UU Kementerian Negara. Kalaupun jaksa agung setingkat menteri tapi tak ada hubungan dengan durasi jabatan jaksa agung," paparnya. ■ BI

# Kenaikan TDL Bebani Rakyat



## Mengatasi masalah dengan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) jangan sampai menimbulkan masalah yang lebih besar.

Untuk menyehatkan ekonomi Indonesia, sebuah keputusan tidak populer dibuat pemerintah pada akhir Juni lalu, yakni melalui pengurangan subsidi listrik dengan cara menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk pelanggan dengan pemakaian di atas 900 VA (volt ampere) dengan besaran kenaikan antara 6 hingga 15 % sesuai dengan kategori pemakaian daya. Kenaikan itu berlaku mulai tanggal 1 Juli 2010.

Mengenai besaran kenaikan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, sesuai UU APBN, kenaikan TDL sebenarnya sudah disepakati 10%, namun karena 30 juta pelanggan dengan daya 450-900 VA tidak naik, maka kenaikan itu dibebankan kepada pelanggan di atasnya.

Soal menaikkan TDL ini, pemerintah mengatakan tidak gegabah, karena sudah memperhitungkan dampak ekonominya terhadap beban masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh bahkan mengatakan, kenaikan TDL di tengah kondisi kebutuhan energi dan kondisi PT PLN saat ini, merupakan pilihan terbaik.

Walau alasan pemerintah itu diakui ada benarnya, namun kenaikan ini tetap memicu polemik dan protes dari masyarakat. Walau tidak dikenakan terhadap pelanggan dengan pemakaian 450 - 900 volt ampere (VA) yang jumlahnya disebut mencapai 30 juta, namun dampak kenaikan ini diperkirakan akan tetap membebani masyarakat banyak. Karena seiring kenaikan TDL, harga barang-barang

termasuk bahan pokok secara otomatis akan mengalami kenaikan.

Dari sekian banyak protes, salah satunya disampaikan anggota DPR dari F-Hanura, Erick Satria Wardana. Menurutnya, keputusan pemerintah menaikkan TDL menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sensitivitas krisis. "Saat ini rakyat sedang menghadapi kesulitan ekonomi karena meroketnya harga-harga kebutuhan pokok akibat dampak psikologis kenaikan TDL. Namun dalam rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR, persoalan kenaikan TDL diabaikan dan sama sekali tidak dibahas," katanya kepada wartawan (15/7/2010).

Di samping kenaikan harga barang, pemutusan hubungan kerja (PHK) juga dikhawatirkan akan meningkat akibat makin besarnya biaya produksi industri.

Kontradiksi dengan keinginan pemerintah yang sebelumnya hendak menekan biaya produksi industri dalam negeri, agar produksinya mampu bersaing dengan produk dari luar. Kenaikan TDL ini justru membuat keinginan pemerintah itu semakin jauh dari harapan. Sebab pihak yang paling merasakan dampak kenaikan TDL kali ini adalah industri.

Tidak seperti perhitungan pemerintah yang menyebut kenaikan TDL industri hanya sekitar 15%, menurut perhitungan pengusaha yang tergabung dalam Forkan, Apindo, dan HIMPI kenaikan tarif justru bisa 60 sampai 90%.

Menanggapi hitung-hitungan para pengusaha itu, Direktur Utama PLN Dah-

lan Iskan mengatakan, formula hitungan itu memberatkan PLN karena belum termasuk PPN 10% untuk listrik dan pajak penghasilan (PPh) pengusaha atas bisnis yang dijalankan.

Besaran kenaikan TDL ini membuat banyak pengusaha yang mengeluhkan. Apalagi seperti dikatakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi, pada saat pembukaan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), awal tahun 2010, pemerintah sempat berjanji tidak akan menaikkan harga BBM dan listrik untuk melindungi industri dalam negeri.

Berkaitan dengan tingginya kenaikan serta adanya perbedaan cara penghitungan antara pemerintah dengan pengusaha, maka pihak pengusaha pun meminta agar realisasi tarif tersebut ditunda hingga pemerintah dan PLN buka-bukaan di depan para pengusaha soal formula perhitungan mereka.

Kalangan DPR, seperti Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis juga mendukung usulan penundaan kenaikan TDL di atas 10 persen. Menurutnya, jika ternyata rata-rata kenaikan TDL di atas 10 %, itu pelanggaran UU APBNP 2010. Maka, pemerintah harus mengembalikan dana subsidi dari selisihnya ke negara. Namun, jika diperlukan tambahan subsidi, bisa diambil dari dana yang sudah dialokasikan, dari efisiensi penggunaan anggaran, atau dari pengeseran pos anggaran.

Masih terkait dengan kekhawatiran atas dampak kenaikan TDL seperti disebut di atas, BPS meminta pemerintah mewaspadai dampak tidak langsung dari kenaikan TDL yang bisa memicu tingginya inflasi. Menurut Kepala BPS Rusman Heriawan, target inflasi 5,3 persen di akhir tahun 2010 dapat dikategorikan zona pesimis. Menurutnya, bulan Juli, Agustus, dan September merupakan bulan-bulan yang tidak bersahabat, inflasi cukup tinggi. Namun menurutnya, hal itu tergantung pengusaha untuk menentukan harga secara proporsional. Sementara itu, hentakan inflasi dalam dua tiga bulan yang melambungkan harga pangan dan kebutuhan lainnya juga diakui Gubernur BI Darmin Nasution. Kendati demikian, kenaikan inflasi yang akan terjadi menurutnya, masih dalam jangkauan proyeksi BI, yakni 5% plus minus 1%.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi kekhawatiran atas terjadinya PHK, meminta pengusaha untuk tidak menjadikan kenaikan TDL sebagai alasan menghentikan produksi serta merumahkan karyawan.

Di tengah protes berbagai pihak, pada tanggal 27 Juli 2010 Presiden SBY mendeklarasikan bebas pepadaman bergilir. Deklarasi dilakukan dari halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. ■ BI

# Menuju Afganistan yang Mandiri



KONFERENSI KABUL: Sekitar 70-an delegasi dari berbagai negara membicarakan masa depan keamanan Afganistan.

**Di tengah masih besarnya ancaman kelompok Taliban, perang saudara, dan minimnya dana, Pemerintah Afganistan bertekad mengambil alih keamanan dalam negerinya mulai 2014.**

**A**fganistan sedang melangkah satu tahap dalam kehidupan bernegara. Dalam Konferensi Kabul yang diikuti oleh 70-an delegasi, di antaranya 40 menteri luar negeri dan menteri senior di Kabul Afganistan, 20 Juli 2010 lalu, dibicarakan tentang masa depan tanggung jawab keamanan negara itu.

Seperti diketahui, akibat perang antar suku dan serangan Taliban kurang lebih sembilan tahun yang lalu, sehingga sejak beberapa tahun lalu hingga 2010 ini, tanggung jawab keamanan sebagian besar Afganistan dipegang pasukan internasional atau koalisi yang berjumlah 150.000 personel. Di antaranya 100.000 personel tentara AS, sedangkan sisanya adalah pasukan dari negara-negara lain anggota NATO.

Dari Konferensi tersebut diberitakan, Presiden Afganistan Hamid Karzai bertekad mulai tahun 2014 pasukan keamanan nasional negaranya yang bertanggung jawab atas semua operasi militer dan penegakan hukum di seluruh negerinya. "Saya tetap bertekad bahwa pasukan keamanan nasional kami akan bertanggung jawab atas seluruh militer dan operasi penegakan hukum di seluruh negara pada 2014, - lebih dari tiga tahun setelah waktu yang ditetapkan Presiden Barack Obama untuk menarik bala tentaranya," kata Karzai, seperti dikutip *Republika* (21/7).

Karzai menyatakan, Afganistan dan sekutunya memiliki musuh bersama. Namun, kemenangan akan datang jika rakyat Afgan diberikan tanggung jawab lebih dalam memerangi para pemberontak di perbatasan.

Sejalan dengan keinginan Presiden Ha-

mid Karzai, Sekjen PBB, Ban Ki-moon juga mengimbau pemerintah Afganistan untuk memikul lebih banyak tanggung jawab di bidang keamanan, pengelolaan dan pengembangan di negaranya.

Sebelumnya, Presiden AS, Barack Obama sudah pernah menyatakan, penarikan tentara AS dari Afganistan akan dimulai pada Juli 2011. Namun, dia menekankan bahwa jadwal penarikan itu sangat bergantung pada kondisi.

Sejalan dengan Obama, Sekjen Fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Anders Fogh Rasmussen juga mengatakan, sekutu tidak akan membiarkan Taliban menggulingkan Pemerintahan Afganistan. Karena itu, pengalihan kewajiban pasukan internasional ke pasukan keamanan nasional Afganistan masih akan tetap disesuaikan dengan situasi, bukan kalender. Penarikan akan dilakukan secara perlahan-lahan. Jadi, bilamana pasukan Afganistan mengambil alih, pasukan internasional tidak akan pergi, tetapi peranannya akan berubah secara bertahap menjadi pendukung.

Sementara Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton dari Kabul mengatakan, pengalihan kewajiban keamanan dari pasukan internasional ke pasukan nasional itu harus memiliki tenggat waktu. Menurutnya, AS akan terus berpartisipasi dalam aksi di Afganistan, namun tenggat waktu Juli 2011 menurutnya merupakan momen penting perlunya mentransfer tanggung jawab kepada Pemerintah Afganistan.

Pemerintah Inggris seperti dikatakan Menlu William Hague Hague juga mengatakan, keberadaan mereka di Afganistan

sangat tergantung pada kemampuan Afganistan sendiri. "Kami terikat pada kemampuan orang Afghanistan melakukan gerakan antara mereka dan keamanan dan itu butuh waktu. Tapi saya akan sangat terkejut jika itu lebih dari 2014," kata William kepada radio BBC, London.

Tekad pemerintah Afganistan seperti disebutkan di atas memang tidak diragukan lagi, tapi melihat kondisi keamanan, politik, ekonomi, dan sosial Afganistan sekarang ini, dimana pemerintah sedang berjuang membangun persatuan di tengah masih terjadinya serangan Taliban dan minimnya keuangan, sejumlah kalangan tetap mengkhawatirkan kemampuan pemerintah negeri itu untuk mengambil alih secara utuh tanggung jawab keamanan tersebut.

Namun untuk meyakinkan masyarakat internasional, pemerintah Afganistan berjanji akan menyelesaikan masalah gangguan keamanan dalam negeri dan memacu pertumbuhan ekonomi bila diberi kesempatan mengendalikan lebih besar lagi dana bantuan miliaran dollar AS yang diberikan para negara donor. Di samping itu, Karzai juga meminta agar para sekutu internasionalnya memberikan donasi lebih besar lagi. Seperti diberitakan, sejak tahun 2001 Afganistan diperkirakan telah menerima bantuan luar negeri sebesar US\$36 miliar. Namun karena diduga ada praktek korupsi, sehingga dampak bantuan tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan para donator.

Kini, hal-hal yang ingin segera diwujudkan dalam rangka pengambil-alihan tanggung jawab keamanan ini antara lain adalah mentransformasikan tiga organ dalam pasukan keamanan nasional menjadi lembaga nasional yang bisa dipercaya dalam memenuhi tugas konstitusi untuk menjamin integritas dan keamanan Afganistan. Kemudian, mengambil alih tugas dari pasukan asing yang ada di sejumlah daerah.

Untuk tugas ini, masyarakat internasional mungkin tidak perlu terlalu khawatir lagi. Karena selain menjaga keamanan, pasukan koalisi juga disebutkan sedang membantu Afganistan untuk membentuk pasukan keamanan sendiri yang tujuan akhirnya, membangun angkatan bersenjata Afganistan berkekuatan 171.000 personel ditambah 134.000 polisi pada akhir tahun 2011. Kesatuan inilah yang direncanakan akan bertanggung jawab atas keamanan seluruh negeri yang memiliki 34 provinsi itu jika tentara koalisi telah mundur. Intinya, masyarakat internasional mencoba menempatkan Afganistan menuju stabilitas. Apalagi jika keberadaan pasukan internasional di negara tersebut sudah ditarik kelak. ■ BS, JK

# Format Ideologi Ideal

**Kalau Generasi Muda Mathla'ul Anwar (Gema MA) menginginkan satu format ideologi yang ideal dalam menghadapi tantangan zaman harus merujuk pada ideologi negara. Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang mengemukakan hal itu dalam acara diskusi dan sharing Musyawarah Nasional (Munas) III DPP Generasi Muda Mathla'ul Anwar (Gema-MA) di Pusat Pengembangan Pemuda Nasional (PP-PON), Cibubur, Jakarta, Jumat 25 Juni 2010.**

**P**anitia meminta Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang untuk menjadi pembicara dalam rangkaian acara Munas tersebut. Panitia juga menetapkan tema diskusi, yakni: "Mencari Format Ideologi yang Ideal bagi Gema-MA Menghadapi Tantangan Zaman." Oleh sebab itu, kata Syaykh kalau Gema MA menginginkan satu format ideologi yang ideal dalam menghadapi tantangan zaman, harus merujuk pada ideologi (nilai-nilai dasar) negara dimana Gema-MA berpijak di atasnya.

Syaykh menjelaskan, pengertian ideologi merupakan suatu rangkaian konsep yang dijadikan asas (dasar) dalam mencapai tujuan hidup. Sehingga dalam kehidupan berorganisasi juga diperlukan ideologi. "Karena kita hidup di sebuah negara yang menjadi tempat di mana kita berada, maka selayaknya ideologi yang kita jadikan asas di dalam berorganisasi tidak lari dari ideologi negara," ujar Syaykh al-Zaytun.

Jadi, kata Syaykh Panji Gumilang, dapat disimpulkan format ideologi yang ideal bagi Gema-MA menghadapi tantangan zaman adalah lima asas yang dimiliki negara Indonesia. "Supaya kita tidak ragu, mari kita buka ideologi negara Indonesia. Karena sekarang ideologi negara kita menjadi ideologi terbuka, modern, tidak ada satu institusi pun yang berhak menafsirkannya secara tunggal.

Jadi, Gema-MA juga punya hak menafsirkan dan menerjemahkan nilai-nilai dasar negara Indonesia," kata Syaykh al-Zaytun. Di dalam UUD 45 disebutkan negara Indonesia berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. "Jadi di dalam konstitusi, kelima dasar itu tidak punya nama, maka saya lebih cenderung menamakannya sebagai nilai-nilai dasar negara Indonesia. Saya menyimpulkan bahwa lima dasar negara ini dalam satu kata At Taqwa yang akan saya jelaskan berikutnya. Saudara boleh urun rambung. Kalau setuju boleh, tidak setuju pun itu hak saudara," urai Syaykh al-Zaytun mengawali paparannya.

Inti uraian Syaykh al-Zaytun tersebut adalah sebagai berikut:

Pesan yang terkandung dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya terdapat satu diktum kalimat yang berbunyi "Hiduplah Indonesia Raya". Negara kita Indonesia Raya, hidup dan akan terus hidup serta tegak berdiri di atas dasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Bahwa nilai-nilai dasar negara Indonesia ini, sepenuhnya merupakan ajaran Ilahi, yang dapat berlaku untuk semua rakyat dan bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar negara ini merupakan ideologi modern, untuk masyarakat majemuk yang modern, yakni masyarakat Indonesia. Semuanya adalah manifestasi daripada taqwa.

Negara adalah sebuah wahana darma bhakti/pengabdian/ibadah. Maka pengabdian dalam sebuah negara dasarnya adalah taqwa. Kalau dianalogkan, negara analoginya adalah masjid, tempat sujud (pengabdian). Maka masjid itu harus didirikan di atas asas landasan taqwa.

"Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih." (QS At Taubah 108)

Kemudian, negara yang merupakan wahana aktifitas dan interaksi sesama warga (bergotong royong), maka segala aktifitas dan interaksi mereka (gotong royong) harus dilakukan di atas taqwa juga.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (QS Al-Maidah: 2)

# Gema MA



SYAYKH AL-ZAYTUN: Format ideologi ideal bagi Gema MA adalah lima dasar negara RI.

Karenanya, sebagai nilai-nilai dasar yang modern, juga menjadi ideologi yang dinamis; dimana watak ideologi dinamis itu adalah terbuka. Konsekuensinya, seluruh nilai yang terkandung di dalam konstitusi (UUD) negara sepenuhnya harus berlandaskan ideologi dan nilai-nilai dasar negara tersebut. Tafsir daripada nilai-nilai dasar negara yang baku sesungguhnya adalah konstitusi atau UUD negara. Karenanya, UUD menjadi tidak relevan bahkan tidak valid bila bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara.

Karena tafsir nilai-nilai dasar negara yang paling baku adalah konstitusi (UUD), maka jika individu, kelompok, lembaga non pemerintah maupun pemerintah yang bertindak, berlaku konstitusional, maka ia adalah penjunjung dan pengamal nilai-nilai dasar negara, harus dihormati oleh siapa pun warga bangsa ini.

## **Ketuhanan Yang Maha Esa**

Memahami substansi nilai-nilai dasar negara adalah menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara. Tatkala memahami Ketuhanan sebagai pandangan hidup, ini maknanya: mewujudkan masyarakat yang beketuhanan, yakni

masyarakat yang anggotanya dijiwai oleh semangat mencapai ridlo Tuhan/Mardlatillah, melalui perbuatan-perbuatan baik bagi sesama manusia dan kepada seluruh makhluk.

Karenanya, membangun Indonesia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa adalah membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridlo Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya.

Dari sudut pandang etis keagamaan, negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Dari dasar Ketuhanan Yang Maha Esa ini pula menyatakan bahwa suatu keharusan bagi masyarakat warga Indonesia menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan, dan masyarakat yang beragama, apa pun agama dan keyakinan mereka.

## **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Sejarah adalah wujud pengalaman manusia untuk berperadaban dan berkebudayaan, karenanya, peradaban, politik, dan kebudayaan



**SYAYKH AL-ZAYTUN:** *Hadapi tantangan zaman dengan hanya satu ideologi yang sama.*

adalah bagian dari pada kehidupan manusia.

Kemanusiaan, sangat erat hubungannya dengan ketuhanan. Ajaran Illahi menjadi tidak dapat diimplementasikan jika tidak wujud sikap kemanusiaan yang hakiki. Struktur pemerintahan tidak sepenting semangat perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab yang jauh daripada pendendam dan egoistik (ananiyah).

Demokrasi yang paling menyeluruh sekalipun akan membawa sengsara, jika rakyat tidak memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan beradab (jujur), apapun sistem pemerintahan yang ditempuh, tanpa semangat kemanusiaan yang adil dan beradab sengsara jua ujungnya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab memerlukan kesetiaan pada diri ketika menjalani kehidupan, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebuah semangat dan kegigihan mengajak masyarakat agar kembali ke pangkal jalan dan membangun kembali revolusi bathin masing-masing, mendisiplinkan diri dengan baik, untuk menemukan kendali dan penguasaan diri.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu kemampuan untuk menyeimbangkan antara kemakmuran lahiriyah dengan kehidupan ruhaniyah.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah semangat mempersiapkan generasi penerus yang mampu melihat lebih dari kepentingan diri sendiri serta memiliki perspektif yang jelas untuk kemajuan masyarakatnya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan, sebagai asas kehidupan. Sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yakni manusia yang berperadaban. Manusia yang berperadaban tentunya lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, dan lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, yang mengenal hukum. Hidup dengan hukum dan peraturan adalah ciri masyarakat berperadaban dan berkebudayaan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah semangat membangun pandangan tentang kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih.

Kemanusiaan yang adil dan beradab menimbulkan semangat universal yang mewujudkan sikap bahwa semua bangsa dapat dan harus hidup dalam harmoni penuh toleransi dan damai.

Kemanusiaan yang adil dan beradab akan menghantar kehidupan menjadi bermakna, karena dicapai dengan berbakti tanpa mementingkan diri sendiri demi kebaikan bersama.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu sikap revitalisasi diri, untuk memupuk dinamisme kreatif kehidupan, yang menghantarkan seseorang menjadi selalu dinamis, selalu sensitif dan peka pada gerak perubahan dan pembaharuan.

Revitalisasi diri sebagai buah kemanusiaan

yang adil dan beradab, tidak terbatas bagi pemeluk agama tertentu siapa pun dengan agama apa pun dapat melakukannya. Semakin teguh seseorang menempuh kemanusiaan yang adil dan beradab, semakin rendah hati, dan semakin teguh keyakinannya semakin murah hati pula. Dalam hal ini, misi tulen agama adalah untuk memupuk pembentukan sifat dan menggalakkan usaha menguasai diri, yakni toleran dan damai.

**Persatuan Indonesia**

Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian yang telah bersatu. Persatuan Indonesia adalah suatu landasan hidup bangsa atau sistem, yang selalu mementingkan silaturahmi, kesetiakawanan, kesetiaan, dan keberanian.

Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Indonesia wujud dan hidup untuk mewujudkan kasih sayang sesama bangsa maupun antarbangsa.

Persatuan Indonesia, bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dengan dunia luar. Suatu upaya untuk mengimbangi kepentingan diri dengan kepentingan bangsa lain, atau dalam tataran yang lebih mendalam antara individu bangsa dan alam sejadat, yang merupakan suatu ciri yang diinginkan sebagai warga dunia.

Dalam jangka panjang, prinsip persatuan Indonesia harus menjadi asas ruhaniah suatu peraturan-peraturan dan struktur membangun satu orde antarbangsa yang adil. Persatuan Indonesia harus mampu menanamkan pemikiran terbuka dan pandangan jauh bagi bangsa Indonesia, sebab hanya mereka yang

berpandangan jauh dan berpikiran terbuka yang dapat mendukung aspirasi ke arah internasionalisme maupun globalisme.

Persatuan Indonesia seperti ini, akan menghantar rakyat Indonesia memiliki kebanggaan yang tulus tentang identitas mereka sebagai warga negara maupun warga dunia. Pandangan dan sikap seperti ini tidak akan melenyapkan ciri-ciri unggul suatu bangsa, malahan akan dapat memantapkan ciri-ciri unik sebuah masyarakat bangsa, yakni masyarakat bangsa yang sadar terhadap tanggung jawab global, bersatu dalam mewujudkan persatuan universal, masing-masing menyumbangkan keistimewaannya.

Persatuan Indonesia seperti ini akan mampu menyingkirkan permusuhan internal bangsa, sebab pencapaiannya tidak melalui kekuatan militer, melainkan melalui tuntutan ilmu, dan peradaban yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Persatuan Indonesia yang berpegang pada prinsip bahwa kemajuan kebudayaan dapat menyamai nilai-nilai universal, sehingga dapat menjadi kekuatan yang dapat mengangkat harkat martabat rakyat untuk menjadi warga negara dan seterusnya warga dunia yang baik.

**Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Suatu landasan yang harus mampu menghantar kepada prinsip-prinsip republikanisme, populisme, rasionalisme, demokratisme, dan reformisme yang diperteguh oleh semangat keterbukaan, dan usaha ke arah kerakyatan universal.

Prinsip-prinsip kerakyatan seperti ini, harus





Syaykh dan rombongan sebelum acara diskusi dan sharing Gema MA.

menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia meyakini potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan. Yakni kerakyatan yang selalu memberi nafas baru kepada bangsa dan negara dalam menciptakan suatu kehidupan yang penuh persaingan sehat.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan adalah kerakyatan yang dipimpin oleh pendidikan yang mumpuni. Sebab pendidikan merupakan prasyarat untuk menyatukan rohaniah. Pendidikan adalah tonggak utama makna daripada hikmah kebijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan akan mewarnai kerakyatan yang penuh harmoni, toleransi dan damai, jauh daripada sikap radikalisme apatah lagi terorisme.

Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan, mampu menciptakan interaksi dan rangsangan interdependensi antarmanusia dalam lingkungan bangsa yang multikultural dan majemuk. Sebab manusia berpendidikan akan selalu menghormati suatu proses dalam segala hal.

Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan menjadi pedoman kerakyatan, sebab ia merupakan cara yang paling lurus dan pasti, menuju ke arah harmoni, toleransi dan damai. Pendidikanlah yang memungkinkan kita selaku rakyat suatu bangsa dapat bersikap toleran atas wujud kemajemukan bangsa.

Hikmah kebijaksanaan menampilkan rakyat berfikir pada tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa, dan membebaskan diri daripada belenggu pemikiran berazaskan kelompok dan aliran tertentu yang sempit.

Karenanya membangun hikmah kebijaksanaan adalah membangun pendidikan, dan itulah hakekat membangun kerakyatan yang berperadaban yang kaya akan kebudayaan, yakni kerakyatan yang terhindar dari saling curiga dan permusuhan.

### Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial

Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah merupakan tujuan dari cita-cita bernegara dan berbangsa, menyangkut keilmuan, keikhlasan pemikiran, kelapangan hati, peradaban, kesejahteraan keluarga, keadilan masyarakat dan kedamaian.

Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik yang setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Dengan mewujudkan segala usaha yang berarti yang diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat, sehingga memiliki pendirian dan moral yang tegas.

Mewujudkan suatu keadilan sosial, juga berarti mewujudkan azas masyarakat yang stabil yang ditumbuhkan oleh warga masyarakat itu sendiri, mengarah pada terciptanya suatu sistem teratur yang menyeluruh melalui penyempurnaan pribadi anggota masyarakat, sehingga wujud suatu cara yang benar bagi setiap individu untuk membawa diri dan suatu cara yang benar untuk memperlakukan orang lain.

Karenanya, mewujudkan suatu keadilan harus menjadi suatu gerakan kemanusiaan yang serius, dan sungguh-sungguh dilakukan oleh rakyat, dengan metoda dan pengorganisasian yang jitu sehingga tujuan mulia ini tidak berbalik menjadi paradoks dan kontradiktif yakni menjadi gerakan pemerkosaan terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Ini pemaknaan dari nilai-nilai dasar negara yang kami sampaikan untuk menjadi landasan kiprah kita di dalam mencari format ideologi yang ideal bagi Gema-MA menghadapi tantangan zaman. Saudara, tantangan zaman sekarang dan ke depan itu hanya beda bentuk saja, hakikatnya sama. Maka cara menghadapinya itu dengan cara satu ideologi yang sama. Coba kita masukkan ideologi ini dengan perjuangan Mathla'ul Anwar. Demikian Syaykh al-Zaytun AS Panji Gumilang.

(Al-Zaytun, 14 Rajab 1431 H, 25 Juni 2010 M)



Syaykh AS Panji Gumilang didampingi Ketua Umum GEMA-MA, Son Haji Ujaji saat melakukan diskusi dengan GEMA-MA di Gedung PP PON, Cibubur, 25 Juli 2010.

# Dialog Syaykh Al-Zaytun dengan Gema MA

**Diskusi bertema: “Mencari Format Ideologi yang Ideal bagi Generasi Muda Mathla’ul Anwar (Gema MA) Menghadapi Tantangan Zaman,” diisi dialog antara Syaykh al-Zaytun AS Panji Gumilang dengan peserta Musyawarah Nasional (Munas) III DPP Generasi Muda Mathla’ul Anwar (Gema-MA) di Pusat Pengembangan Pemuda dan Olah Raga Nasional (PP-PON), Cibubur, Jakarta, Jumat 25 Juni 2010, malam.**

Selepas Syaykh Panji Gumilang menyampaikan paparannya, Ketua Umum Gema MA Son Haji Ujaji, yang bertindak sebagai moderator membuka sesi tanya-jawab (dialog). Berikut petikan dialog tersebut:

**Gema MA:** Peserta dari Sukabumi mengawali pertanyaan dengan mengemukakan keberhasilan

Syaykh memimpin lembaga pendidikan Al-Zaytun. Pertanyaannya, bahwa manusia itu memiliki asas menuju taqwa, harusnya pendidikan juga harus membawa manusia kepada taqwa. Cuma permasalahannya, sistem pendidikan kita ini justru menjauhkan manusia dari taqwa. Contohnya, waktu pertama kali masuk sekolah itulah pertama kali hancur nilai-nilai kemanusiaannya. Misalnya, nyontek. Jadi seperti apa konsepnya? Pendidikan yang seperti apa? Pertanyaan kedua, berkaitan dengan gerakan ekonomi. Model ekonomi apa yang kita pilih, ekonomi neolib atau kerakyatan? Kemudian disusul penanya dari Kalimantan Selatan yang juga menyinggung masalah ekonomi dan negara federal.

**Syaykh:** Yang kita bicarakan organisasi. Ideologi negara harus dijadikan ideologi oleh organisasi. Kemudian salah satu platformnya di antaranya adalah bidang ekonomi. Kita tidak menentukan bentuk ekonomi apa, apakah kerakyatan atau kapitalis, itu tidak penting. Yang penting, ada gerakan ekonomi yang mampu menopang gerakan organisasi. Saya berikan contoh, tadi bagaimana Cheng Ho memasukan ide-ide kemudian mengislamkan Indonesia, itu dari gerakan ekonomi. Gerakan ekonomi itu maknanya kita mampu menghidupi diri kita. Banyak caranya, tidak harus darimana memulainya. Dibuat dulu bahwa di organisasi ini punya platform, satu di antaranya adalah urusan ekonomi.

Urusan ekonomi itu banyak cara, Kalimantan itu masih bisa dibuat satu gerakan ekonomi yang mandiri. Contohnya, penangkalan pemanasan glo-



Nasrullah, mahasiswa Universitas Mathla'ul Anwar Banten, saat mengajukan pertanyaan kepada Syaykh.

bal. Di mana-mana dianjurkan menanam. Kemudian ujungnya setelah menanam bagaimana? Kan tidak ada follow up. Akhirnya, hari ini menanam satu juta, tahun depan kehilangan seratus juta batang yang besar karena menanam satu juta yang kecil, satu tahun ke depan seratus juta pohon yang hilang. Oleh sebab itu, dari sini kita mengadakan koperasi bersama. Dari satu sisi saja, membuat penghijauan lingkungan, ditata sendiri, ditunggu lima tahun, itu kita sudah bisa menjual karbon, itu harganya mahal.

Itu belum bicara kayunya, bisa menghasilkan oksigen dan dibeli oleh negara-negara yang merusak oksigen. Dunia membeli hutan yang kita buat. Bagaimana dengan bibit? Indonesia ini sumber nutfah, nabati yang tidak kurang-kurangnya. Nah, kalau kita bergerak ke sana, ini saja satu periode sudah bisa membeli kapal terbang. Jadi dari Indramayu ke sini tidak 6 jam. Kita bisa 15 menit naik helikopter. Itu dari usaha itu, dari usaha pembibitannya saja. Coba bayangkan, trembesi itu dijual berapa? Padahal sangat gampang melakukan pembibitan trembesi. Pembibitan jati juga sangat gampang.

Maksud saya, bidang ekonominya seperti itu di antaranya. Kemudian mengadakan koperasi warga MA, bagaimana menyuplai pangannya, bagaimana warga ini menghidupi diri melalui koperasinya. Di negara-negara maju sampai hari ini kok masih berkoperasi, sekalipun koperasi sudah barang usang tetapi masih dilakukan orang. Jadi gerakan ekonomi, bukan bentuk ekonomi. Masalah, berbicaralah tentang ekonomi, ekonomi itu penting.

Orang mukmin yang mampu, jauh lebih baik daripada yang tidak mampu. Maka masuklah organisasi ini membahas ilmu dan ekonomi, agar bisa khasanah. Nah, itulah yang saya sebut gerakan ekonomi, bukan bentuk ekonomi. Mau disebut kapitalis, kerakyatankah, terserah. Tapi kita harus berbicara untuk ekonomi, berbuat untuk ekonomi

menopang kehidupan organisasi. Gerakan ekonomi, jadi ada usaha untuk mendapatkan sesuatu untuk menopang organisasi yang berjalan di kaderisasi, pendidikan, dakwah dan ekonomi.

**Gema MA:** Peserta dari Banten, Nasrullah dari Universitas MA. Mencari ideologi yang tepat bagi Gema MA jika bicara tentang Pancasila, saya rasa sudah usang. Lihat saja ideologi yang digunakan oleh partai politik, jarang kita lihat dasarnya Pancasila. Demokrat saja dasarnya Nasional Relijius. Jadi kalau Gema masih memakai asas Pancasila, saya kira usang, ketinggalan. Asas tetap yang lama. Paling strategi gerakan yang kita ubah, bagaimana strategi pendidikan, dakwah dan ekonomi, itu saja. Sudah cape bicara Pancasila, sekarang sudah tidak ada manusia yang Pancasila, SBY saja tidak, dia mungkin demokratis. Jadi bagaimana strategi gerakan generasi muda ke depan?

**Syaykh:** Saudara, kalau hari ini Saudara memandang usang kepada nilai-nilai dasar negara Indonesia, *na'udzubillah min dzalik*. Ketuhanan YME kok usang? Kemanusiaan yang adil dan beradab kok usang? Kerakyatan kok usang? Persatuan Indonesia kok usang? Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia kok usang? Ini satu pertanyaan besar bagi bangsa besar ini.

Mungkin kalau saudara beri nama Pancasila, menjadi usang. Kalau begitu, jangan dinamai. Mengapa? UUD-nya saja tidak menamai, kemudian preambule tidak menamai. Satu persatu disebut nilai-nilai dasar negara, sangat jitu. Siapa yang berani menentang dasar sebuah negara, memang kalau sudah dinamai umpamanya karonjok, nggak tau isinya emas namanya slepak. Lah koq dibenci.

Saudara, siapa yang berani mengatakan tauhid al ulu'iyah ini usang? Saya tidak berani. Maka kalau disebut misalnya Cheng Ho, nggak tau kalau Cheng Ho ini menyebarkan tauhid di Indonesia. Adapun

partai lain yang mendirikan dengan dasarnya sendiri, itu serahkan haknya dia. Kita mengajak pada lima dasar, nilai ini kita pegang. Maka saya gambarkan MA itu Anwar, Tauhid al uluhiyah.

Saudara, di dalam nilai dasar tidak ada kesatuan, tapi persatuan. Persatuan sudah ada, maka tadi kalau menginginkan negara Kalimantan federal. Mungkin kalau diilhami oleh persatuan tadi. Mungkin timbul itu karena menafsirkan persatuan, Boleh-boleh saja kalau ide. Kalau lebih dari ini, silahkan ada hak demokrasi tadi. Kalau dianggap usang tapi kalau isinya *na'uszu bilah*. Kalau disebut nama, memang. Karena dulu sudah menjadi tidak enak didengar. Karena dulu tidak modern, dan hanya satu yang bisa menafsirkan.

Inilah yang jadi asas gerakan organisasi kita. Jangan lepas dari itu. Adapun temanya tadi, kader, dakwah, pendidikan, ekonomi, itu boleh saja. Jadi saudara sebaiknya jangan sebut namanya tapi pertahankan substansinya. Kalau cuma namanya, burung beo juga bisa. Kalau asas Islam, kan terbalik. Mestinya Islam mencari asas. Islam itu didirikan di atas lima asas. Nah, kalau sekarang Islam dijadikan asas, kan diinjek-injek. Asas Islam, terbalik itu. Islam mencari asas, maka hadist nabi, Islam ditegakkan di atas asas lima.

Sekarang membumikan MA. Ayo kita bumikan, bahkan jangan hanya dibumikan, terkadang di bumi, laut dan udara. Bagaimana caranya? Ayo kita bentuk. Generasi muda kita ini hendaknya memiliki media massa yang enak dibaca. Setiap bulan kalau bisa. Kalau tidak bisa, dua pekan sekali. Kalau kurang, sepekan sekali. Ayo kita buat. Itu modalnya nggak besar. Hari ini saudara punya niat, besok kita jalankan. Potensi MA dari Sabang sampai Merauke itu ada, bukankah itu sumber kalau kita buat yang bagus, tampilan dan isi bagus, modalnya murah.

Jadi masukkan semua kegiatan MA yang ada di Indonesia. Kalau setiap bulan kita buat katakanlah 200 muka. Satu tahun sudah berapa, 12 x 200. Kalau saudara sanggup, besok kita buat, apa susahnyanya. Saudara pelaksananya, pusat yang mendanai.

Ambil saja 10% dari 3 juta anggota MA, 300 ribu ambil saja 10% dari itu satu bulan kita keluarkan 300ribu. Mulai mencetak, kalau itu habis 500ribu, habis, 1000ribu, habis, 3000ribu, biaya gampang. Sekarang ini tidak ada yang cash. Modal sebesar-besarnya untung sebesar-besarnya.

**Gema MA:** Herawati dari Univ. MA Banten. Kalau bicara teori, saya pikir betul semuanya sangat baik. Namun apa artinya segudang teori itu kalau lagi-lagi selalu dimentahkan satu kenyataan. Bicara keadilan sampai hari ini koruptor masih bisa bebas ketika ada yang namanya konspirasi dan sebagainya. Kemudian kesejahteraan, masih banyak tetangga sekitar kita hanya karena tidak punya uang tidak bisa berobat. Contohnya, di Pandeglang, seorang penderita kanker ganas bernama Farhan tidak bisa dibawa ke RS Cipto.

Lantas sejauh ini dengan keberhasilan bapak di bidang pendidikan dengan berdirinya lembaga pendidikan Al Zaytun. Kalau bicara pengabdian bahwa bapak disebutkan tulen MA. Kenapa harus mendirikan Al Zaytun, kenapa tidak MA lebih dikembangkan? Sayang sekali kalau orang secerdas

bapak malah membumikan MA-nya. Bahkan sangat miris ketika MA yang berdiri bersama organisasi yang lain sampai hari ini universitasnya masih ada satu, masih di Pandeglang, beda dengan Muhammadiyah. Artinya, kita harus introspeksi diri bahwa kita hanya romantisme sejarah saja, hanya bangga dengan sejarah, sementara realitasnya seperti ini.

**Syaykh:** Teori dan praktek beda, dimana-mana sering terjadi itu. Yang sekarang kita berharap, jangan cerita orang lain, kita ini sedang bercerita tentang organisasi MA yang berlandaskan nilai-nilai dasar itu. Bisakah kalau ada problem sosial itu kita rebug menyelesaikannya. Yang dimaksud, jangan ngeritiki pemerintah terus. Kerja kita nggak habis-habis kritik pemerintah terus. Sekarang MA yang sudah sekian lama harusnya mampu menyumbang yang kanker tadi. Jangan terus bilang pemerintah nggak nyumbang, ya memang mungkin nggak nampak, tapi sekarang kita yang organisasi ini mampukah sedikit memberikan?

Jadi saya mengajak organisasi kita ini aktif untuk seperti itu menanggulangi banyak hal itu. Belum punya uang? Ayo bergerak di ekonomi, kalau sekarang ini teorinya bagus, prakteknya susah, yang dicontohkan praktek pemerintah. Kita mulai, jangan sampai kita ini mengkritik orang saja. Kita belum pernah memulai betapa banyak kasus-kasus, problem sosial di Banten, pernahkah uluran tangan dari MA? Belum, karena belum ada gerakan ekonominya.

Mengapa Al-Zaytun yang didirikan bukan MA? Saudara, perjalanan sejarah bisa bergerak. Apa salahnya Al-Zaytun ini hanya sebuah pendidikan bukan organisasi. Maka tatkala pengurus besar pernah datang ke sana kita tawarkan ayo bersamasama.

■ BI/ms



Herawati, mahasiswi Universitas MA Banten, ketika berdialog dengan Syaykh.

# Gema Kader Mathla'ul

Syaykh al-Zaytun Panji Gumilang kepada Generasi Muda Mathla'ul Anwar (Gema MA) mengungkap sejarah perjuangan Mathla'ul Anwar (MA)<sup>1</sup> untuk mendorong para kader Gema MA menjadi kader MA dan kader bangsa yang berintegritas tinggi dan memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang masing-masing.



**M**enurut Syaykh al-Zaytun, Mathla'ul Anwar (MA) jauh sebelum berdiri secara legal — legalnya adalah 1916 — sepuluh tahun sebelumnya sudah wujud namun belum legal, maksudnya, belum diresmikan oleh penguasa Hindia Belanda pada waktu itu. Jadi tahun 1906, MA sudah berdiri, itu bisa dibaca di buku *The New World of Islam*.

Tokoh (kiyai) agen perubahan, yang antara lain tokoh muda bernama KH Raden Mas Abdurahman Jamal<sup>2</sup> yang berasal dari daerah yang jauh dari kota, Janaka, (yang orang Hindu sangat menghormatinya karena Janaka itu Satrio Wirotomo), pulang dari Mekah bergabunglah dengan tokoh yang datang dari Menes, kemudian meletakkan dasar-dasar dari pesantren yang ghairu madrasah menjadi madrasah bahkan cenderung kepada madrasah bukan pesantren.

<sup>1</sup> **Mathla'ul Anwar** sebuah organisasi masyarakat yang berorientasi pada pendidikan dan dakwah. Berdiri pada 10 Ramadhan 1334H/10 Juli 1916 di Kampung Kananga, Menes, Didirikan oleh KH Mas Abdurrahman bin KH Mas Jamal bersama beberapa kiyai lainnya, antara lain: KH Tubagus Muhammad Sholeh, KH Entol Muhammad Yasin, Kiai Tegal, KH Abdul Mu'thi, Kiyai Soleman Cibinglu, KH Daud, Kiyai Rusydi, Kiyai Entol Danawi, dan KH Mustaghfiri. Alamat Kantor Pengurus Besar Mathla'ul Anwar saat ini: Jalan Al Amanah, Kavling Polri No.1, Jelambar Jakarta Barat. Telp/Fax 021 5658880. (Sumber: [unmabanten.ac.id](http://unmabanten.ac.id))

<sup>2</sup> **KH Raden Mas Abdurahman Saleh Abdurahman Jamal**, salah satu ulama yang berjasa dalam dunia pendidikan di Banten dan Indonesia. Dia tokoh muda, sepulang dari Mekkah mendirikan Mathla'ul Anwar bersama kiyai sepuh lainnya. Lahir tahun 1882 di Kampung Janaka (Gunung Aseupan), Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang dan wafat 1943. (Muhammad Ijzen, penulis buku berjudul *KH Mas Abdurrahman Ulama Besar Kharismatik Dari Tutugan Gunung Aseupan*). Sumber lain menyebut, ulama ini lahir sekitar tahun 1875 dan wafat 16 Agustus 1944 dan dimakamkan di Cikaliung Sodong, Kecamatan Saketi, Pandeglang atau sekitar Lokasi Universitas Mathlaul Anwar (UNMA). (M Nahid Abdurahman, penulis buku berjudul *KH Abdurrahman Pendiri Mathlaul Anwar*). Sementara menurut buku *'Dirosah Islamiyah I Sejarah dan Khittah MA'* yang diterbitkan Pengurus Besar Mathla'ul Anwar, disebutkan dia lahir tahun 1868 dan wafat tahun 1943. (Pusat Data Tokoh Indonesia)

“Jangan kita gambarkan sekolah zaman dulu seperti zaman sekarang, jauh sekali. Zaman dulu, belum semua sekolah bisa memegang buku. Itu masih haram. Sekolah menulis masih haram, belum bisa dilakukan,” kisah Syaykh Panji Gumilang, yang pernah mengabdikan sebagai guru Perguruan Mathla'ul Anwar di Menes, Pandeglang. Dia menuturkan yang mula-mula mengadakan sekolah pada 1899 yaitu di Tebuireng, mulai duduk pakai bangku, berbuku, kemudian berkembang ke Kenanga. “Menes belum pakai buku waktu itu karena belum datang agen perubahan. Lalu datanglah KH Raden Mas Abdurahman Saleh Abdurahman Jamal mengajak semuanya untuk melegalkan hal ini supaya bisa bergerak di tataran Hindia Belanda,” tutur Syaykh Panji Gumilang.

Menurut Syaykh Panji Gumilang, namanya juga cukup luar biasa. Bukan Mathla'ul Nur, tapi Mathla'ul Anwar<sup>3</sup>. Anwar itu plural, jamak. “Kita punya sekarang ini lima nilai dasar, jangan-jangan sejak dulu sudah mengarahnya ke sana yakni nur tauhid uluhiyah, nur insaniah, nur addaulah, nur arro'iyah, nur al-ijma'iyah. Jadi namanya Mathla'ul Anwar. Sumber tempat terbitnya nur-nur yang kemudian nur ini dijadikan landasan oleh negara Indonesia. Itu tafsiran saja,” jelas Syaykh Panji Gumilang.

Adapun tujuan didirikannya Mathla'ul Anwar ini adalah agar ajaran Islam menjadi dasar kehidupan bagi individu dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disepakati untuk menghimpun tenaga-tenaga pengajar agama Islam, mendirikan madrasah, memelihara pondok pesantren dan menyelenggarakan tablig ke berbagai penjuru tanah air yang pada saat itu masih dikuasai oleh pemerintah jajahan Belanda. Pemerintah kolonial telah membiarkan rakyat bumi putra hidup dalam kebodohan dan kemiskinan.

Syaykh menuturkan, bahwa MA telah menjadi suatu madrasah ataupun pesantren yang modern pada zamannya. Ada murid yang belajar duduk, ada papan tulis, kapur, ada buku, ada kitab rujukan. “Pada saat itu sudah mengajar putra-putri. Bayangkan, sampai sekarang ini saya masih gamang untuk menggabungkan satu kelas putra dan putri, tapi kita hadap-hadapkan saja, ini kelas putra dan ini kelas putri, berhadap-hadapan, supaya bisa mengungkapkan rasa senangnya.

“Padahal, KH Abdurahman sudah berani menggabungkan kekuatan putra dan putri, betapa modernnya,” ungkap Syaykh al-Zaytun. Dibimbing sampai perjalanan masa kini, menurutnya, kalau kita perhitungkan atau kita

<sup>3</sup> Mathla'ul Anwar, secara literalistik berarti terbitnya cahaya-cahaya (nur-nur, jamak) atau terpancarnya pencerahan.

# Anwar

perhatikan Mathla'ul Anwar pada saat itu tema perjuangannya adalah pendidikan dan kemudian ditambah dakwah. Sesungguhnya itu satu, pendidikan dan dakwah itu satu.

Maka ke depan, saran Syaykh Panji Gumilang, mesti ditambah tema perjuangan MA dan Generasi Muda MA, di samping pendidikan dan dakwah harus ada gerakan ekonomi untuk menopang dakwah. Tanpa itu, menurut Syaykh, tidak punya landasan yang kuat. Artinya, nanti ke sana ke mari kita tidak punya landasan yang kuat. Bagaimana tidak, di dalam hadist rasul itu ada nasehat "carilah ilmu sampai ke negeri China", dan itu dipraktikkan oleh Rasulullah.

Walaupun belum disepakati oleh sejarawan, urai Syaykh, itu Mak Ci atau Pak Ci dari Nabi Muhammad dari pihak ibu, kuburannya ada di China bagian selatan. Walaupun belum disepakati oleh sejarawan. Namun risalah Muhammad sudah mengembang dari sejak khalifah Usman tahun 651, itu menerjemahkan *utlubul ilma walau bi sin* sampai dengan *almansur* pada *khilafah abasiyah* itu ada ekspedisi ataupun tukar menukar diplomasi antara tahun 651-715 itu selama 49 kali.

Betapa hebatnya, perdagangan sudah masuk ke negeri China, tatkala Persia masih baik dengan Arab. Dia, orang-orang Arab, khalifah Usman dan selanjutnya ingin menggunakan jalur sutera (jalan darat dari China, Turki sampai ke Eropa). Tapi, tatkala Persia sudah mulai bergerak menghadang, dari jalur keramik (jalur yang melalui laut), semuanya dulu landasan ekonominya kuat sehingga tidak pernah bersandar.

Dan supaya diingat juga, tatkala Islamisasi Indonesia, orang China punya peranan besar. "Saya contohkan juga pada MA. MA itu kerjasamanya dengan tokoh China yang masih ada keturunannya H Siddiq. Kalau ingin tahu, Madrasah MA Pusat di Menes itu tanah wakafnya dari China muslim yang ada di Menes sana. H siddiq orang kaya, berarti pendirian-pendirian seperti itu ada gerakan ekonomi, pendidikan dan dakwah. Nah oleh sebab itu, kalau kita ingin ke depan itu bisa menjawab tantangan zaman, ya generasi muda ini menjadi organisasi kader yang temanya pendidikan, dakwah, ekonomi. Tanpa itu nggak jelas nanti," kata Syaykh Panji Gumilang, berkaitan dengan Tema Munas: "Revitalisasi Organisasi Generasi Muda Mathla'ul Anwar (Gema-MA) Menghadapi Tantangan Zaman".

Maka, menurut Syaykh al-Zaytun, membangun organisasi ini adalah membangun kesejahteraan sosial. Membangun kesejahteraan sosial adalah, menghindari kemiskinan, menghindari kekurangan kemampuan pendidikan, menghindari kekurangan kemampuan kesehatan,



KH Raden Mas Abdurahman Saleh Abdurahman Jamal, pendiri Mathla'ul Anwar (dok MA)

menghindarkan kekurangan kemampuan tempat tinggal yang layak.

Selanjutnya, kata Syaykh, nanti organisasi MA dan pemudanya bicara bagaimana untuk hukum, bagaimana melindungi warga dari ketidakadilan hukum. Maka harus dibentuk lembaga advokasi warga MA, dan itu baru bisa dilakukan kalau memiliki kader yang kompeten dalam hukum. "Pendidikan harus mempunyai kader kompeten dalam keguruan maupun kedosenan. Kesehatan harus mempunyai kader kompeten dalam kesehatan, persiapkan dokter-dokter. Kemudian untuk menghadapi gerakan sosial harus punya pekerja sosial dan sebagainya. Itu kalau kita masuk kepada organisasi kader. Zaman sekarang moral dan mental selalu tidak mantap. Diperlukan psikolog, kita perlu punya kekuatan yang kompeten dalam bidang psikologi. Akhirnya, semua itulah yang membangun organisasi," kata Syaykh Panji Gumilang.

Menurutnya, itu yang akan membawa

organisasi pemuda MA menjadi organisasi yang bermasa depan. Kemudian pemuda di dalam jenjang ke depan jangan terus putus, tetapi harus mampu menduduki posisi di PB MA, sebagai induk organisasi. “Jangan sampai nanti ini sudah bagus, lalu lepas, tidak terkoordinir oleh organisasi induknya. Misalnya, ketua umum Gema MA sekarang, kemudian menjadi pengurus bahkan ketua umum PB MA, kemudian yang lain-lain juga nanti akan seperti itu. Jadi rekrutmen dan penempatan kader itu jelas, jangan sampai nanti kader diambil dari sana-sini. Nanti mata rantainya tidak menyambung,” kata Syaykh.

Dia pun menegaskan bahwa tugas dari Gema MA, menjadikan organisasi ini sebagai organisasi kader. Demikian juga MA, posisinya sebagai organisasi kader. Sehingga kala duduk di MA, dia memahami perjalanan negara. Karena tadi ideologinya harus menjadi ideologi negara yang dia ada di situ. Misalnya, syaykh memberi gambaran, kita berpikir negara kita ini republik yang dipimpin oleh presiden. Indonesia sistem pemerintahannya presidensial. Kalau kita mencari contoh presidensial jangan pernah

melihat Saudi Arabia, ndak ketemu karena di sana bukan republik, tidak presidensial.

“Mungkin saudara kaget, kalau presidensial tengok Amerika, itu presidensial yang tulen. Jadi kalau mau nyontoh presidensial, contohhlah Amerika. Mungkin sakit kita, sakit hati, jengkel, mengapa kok Amerika, bukan Saudi Arabia? Nah, kalau mencontoh presidensial dengan Saudi sama saja mentafsirkan orang dengan topeng monyet, nggak ketemu, memang mirip tapi bukan. Harus mencontoh mana yang presidensial, paling tidak pada negara republik,” jelas Syaykh al-Zaytun.

Nah untuk itu, imbau Syaykh al-Zaytun, kita harus menghindarkan diri dari fanatisme yang buta. Dikit-dikit larinya ke kiblat Saudi. Kita punya nilai dasar yang sanggup menata Indonesia. Jadi presidensial, republik, demokrasi.

Menurut Syaykh Panji Gumilang, Islam dari awal mengenal republik, mengenal kebebasan rakyat, sehingga masuk ke seluruh penjuru, termasuk Indonesia. Dan sejarah mencatat, yang melakukan islamisasi di Indonesia secara merata ternyata bukan hanya orang Arab. “Orang Arab berdagang sambil berdakwah, tapi yang betul-



THE CHENG HO TREASURE SHIP, penjelajah dunia (haytom.biz)

betul itu justru Cheng Ho<sup>4</sup>. Sekitar tahun 1405 masuk ke Asia Tenggara, antara lain pulau Jawa, untuk mengadakan islamisasi,” tuturnya.

Cheng Ho adalah tokoh yang wafat di usia 62 di tahun 1433, anak seorang Haji Ma Hasyim asalnya dari Yunnan. Begitu Yunnan diserang oleh pasukan Ming, maka orang tua dari Cheng Ho meninggal. Cheng Ho umur 11 tahun diangkat oleh Dinasti Ming kemudian dibesarkan jadi kader menjadi tokoh yang paling terkenal di dunia, menjadi tokoh angkatan laut sampai menyebar ke Indonesia. Menata Indonesia. Bedug yang ada di mesjid itu dibawa oleh Cheng Ho. Karena apa? Bedug hanya ada di China. Islam dikembangkan oleh Cheng Ho sampai ke pelosok.

Begitu pula seorang muslim China di Menes, Pandeglang bernama H Siddiq, juga berperan dalam pengembangan agama Islam di daerah Banten. Dia mewakafkan tanah untuk didirikan madrasah di Cimanying Menes.

Kedua tokoh muslim China yang berperan dalam pengembangan agama Islam tersebut, menurut Syaykh al-Zaytun, sekaligus menunjukkan bahwa gerakan organisasi jika



**CHENG HO**, penyebaran agama Islam (edu2000.org)

tidak melandaskan diri kepada ekonomi, akan lemah. Maka, dia menyarankan, kalau boleh ditambahkan organisasi kader, dengan orientasi pendidikan, dakwah dan ekonomi atau kalau mau disingkat pendidikan ekonomi dan organisasi kader. “Sebagai organisasi kader, angkatan muda MA mestinya dijenjangkan sehingga kita tidak kehabisan pemimpin di organisasi pusatnya,” kata Syaykh al-Zaytun.

■ BI/crs-ms

<sup>4</sup> **Cheng Ho** (1371-1433) adalah seorang pelaut Tiongkok terkenal yang melakukan beberapa penjelajahan ke berbagai penjuru dunia, termasuk kepulauan Indonesia antara tahun 1405 hingga 1433. Dia penjelajah dengan armada kapal terbanyak sepanjang sejarah dunia yang pernah tercatat. Dia seorang kasim Muslim dan kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok (berkuasa tahun 1403-1424), kaisar ketiga dari Dinasti Ming. Nama aslinya adalah Ma He, juga dikenal dengan sebutan Ma Sanbao, berasal dari provinsi Yunnan. Ketika pasukan Ming menaklukkan Yunnan, Cheng Ho ditangkap dan kemudian dijadikan orang kasim. Dia berasal dari suku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han, namun beragama Islam. Nama Arabnya Haji Mahmud Shams. Dia mengunjungi kepulauan Indonesia sebanyak tujuh kali. Antara lain: ke Samudera Pasai, dia memberi lonceng raksasa “Cakra Donya” kepada Sultan Aceh, yang kini tersimpan di museum Banda Aceh; Tahun 1415, dia berlabuh di Muara Jati (Cirebon), dan menghadiahkan beberapa cinderamata khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon, di antaranya sebuah piring yang bertuliskan ayat Kursi yang kini masih tersimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Cheng\\_Ho](http://id.wikipedia.org/wiki/Cheng_Ho))



# Tabung Gas Meledak, Salah Siapa?

**Pemerintah atau Pertamina termasuk masyarakat harus memeriksa diri mengapa insiden ledakan tabung gas makin marak belakangan ini.**

Ibu Irene merupakan salah seorang yang sangat ketakutan akibat banyaknya peristiwa meledaknya tabung gas akhir-akhir ini. Sejak pemerintah pada tahun 2007 menganjurkan masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan untuk menggunakan elpiji melalui program konversi energi dari minyak tanah ke gas, sudah puluhan kali terjadi peristiwa ledakan tabung gas, khususnya tabung isi 3 kg yang merenggut puluhan nyawa manusia dan menghancurkan harta benda.

Pada semester pertama tahun 2010 saja misalnya, terjadi 35 kasus ledakan akibat bocornya tabung elpiji 3 kg yang sedikitnya menewaskan 14 orang, melukai 45 orang, serta merusak sekitar 40 bangunan. Bahkan untuk bulan Juni saja, telah terjadi 8 kasus kebocoran tabung gas 3 kg, 18 kasus untuk tabung 12 kg dan 1 kasus untuk tabung 50 kg. Peristiwa tersebut di antaranya, ledakan tabung gas di Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan (18/6/2010) yang mengakibatkan meninggalnya dua orang penghuni rumah, yakni Yadi (20) dan Sugiarto (21), serta menghancurkan tiga rumah.

Tidak lama sesudah itu, persisnya pada 24 Juni 2010, empat rumah dan sepuluh lapak pedagang di kawasan Poncol, Senen, Jakarta Pusat hangus terbakar akibat ledakan tabung gas. Dari Kota Bogor, ledakan yang sama juga menyebabkan dua orang luka bakar. Di Kota Malang, Jawa Timur, ledakan tabung gas juga menyebabkan Mudjiono yang sudah berusia 85 tahun mengalami luka-luka.

Tidak hanya tabung gas ukuran 3 kg, tabung gas berukuran 12 kg juga ikut meledak di sebuah rumah makan di Jalan Pramuka Raya, Jakarta (26/4/2010), dengan satu orang luka bakar.

Kejadian ledakan tabung gas selama inilah yang membuat ibu Irene selalu ketakutan jika hendak memasang tabung gas baru serta menyalakan kompor gas di rumahnya. Karena ketakutannya itu, kini setiap mengganti tabung baru, ibu Irene selalu minta bantuan pemilik warung untuk sekalian memasang tabung gasnya, walaupun untuk itu dia biasanya kerap memberikan uang tambahan kepada pemilik warung. Ketakutan yang hampir sama mungkin dialami masya-

rakat lainnya juga pasca ledakan-ledakan tabung gas belakangan ini.

Untuk mencari penyebab ledakan tabung gas, pemerintah disebut telah membentuk tim untuk penanggulangan tabung bermasalah di bawah pimpinan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono. Tim beranggotakan kementerian/ lembaga lintas sektoral, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Negara PP dan PA, Kementerian Tenaga Kerja, Pertamina dan Polri. Namun, jaminan yang bisa meyakinkan masyarakat belum ada. Bahkan terkadang membuat bingung masyarakat awam.

Pemerintah misalnya, sempat menyebut bahwa aksesoris tabung gas, seperti selang, katup, dan regulator-lah yang banyak tidak layak pakai. Terlebih setelah Badan Standarisasi Nasional menunjukkan data-data, bahwa hanya 66% katub tabung yang memenuhi standar. Untuk kompor, hanya 50% yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), sedangkan regulator hanya 20% yang sesuai dengan SNI. Dan hampir 100% selang tabung elpiji tidak memenuhi standar karena hanya memiliki umur pakai enam bulan, tidak sesuai dengan yang tertera yakni untuk satu tahun.

Dirjen Minyak dan Gas, Kementerian ESDM, Evita Legowo misalnya menyebutkan, dari semua kecelakaan selama ini, hasil identifikasi timnya menyimpulkan bahwa sumber masalah justru tidak ada dari tabung. "Dari identifikasi Polri dan kami, dari semua kecelakaan sampai hari ini, tabungnya utuh. Jadi soal tabung sebenarnya masih oke," kata Evita di Jakarta, (25/6/2010). Pendapat yang hampir sama juga dinyatakan Sekretaris Menkokesra, Indroyono. Menurutnya, kalau tabung gas yang menjadi penyebab awalnya, pasti sudah terpantau sejak awal.

Sementara itu, Dirjen ILMTA Kementerian Perindustrian, Anshari Bukhori mengaku dari pemeriksaan yang dilakukan lembaganya, memang ditemukan adanya tabung gas yang tidak sesuai SNI karena menggunakan bahan baja tipe tertentu. Kantor berita *Antara* (24/6/2010) juga melaporkan, bahwa tabung gas bermasalah juga ditemukan dari Temanggung, Jawa



**BOM WAKTU:** Tabung gas menjadi kecemasan semua

Tengah. Sedikitnya 800 tabung gas elpiji kemasan 3 kg di agen elpiji PT Kebon Arum Group diduga merupakan tabung tidak berstandar. Secara fisik agak sulit memang membedakan tabung yang asli dan yang palsu. Namun menurut Direktur Utama PT Kebon Arum Group, pengujian dapat dilakukan dengan cara menimbang. Tabung rusak lebih tipis dari tabung asli dan beratnya kurang dari lima kilogram. Dan jika dimasukkan ke dalam air, tabung yang bocor akan mengeluarkan gelembung udara. Kebocoran kebanyakan terjadi pada bagian sambungan dan rusak pada katub (pentil). Dalam hal ini, ia mengaku pihaknya telah menukarkan langsung kepada Pertamina sebanyak 650 tabung dari 800 tabung bermasalah

Namun demikian, Anshari Bukhori membantah bahwa penyebab utama terjadinya ledakan gas akibat tabung gas. Karena menurutnya, kekuatan tekanan tabung gas mencapai 130 atmosphere sementara tekanan gas hanya 7,5 atmosphere. Ia mengatakan, ledakan hanya bisa terjadi jika ada kebocoran hingga gas terkumpul di ruangan dan ada api yang memicu ledakan. Karena itulah sehingga kebocoran selang dan regulatorlah diduga sebagai penyebab utama ledakan tabung gas.

Berdasarkan penjelasan di atas, peristiwa ledakan tabung gas selama ini diduga tidak terlepas dari kelalaian masyarakat sendiri. Ledakan misalnya pernah terjadi karena korban diduga lupa mematikan kompor minyak yang diletakkan berdekatan dengan tabung gas. Sehingga, ketika



...a pihak karena jika tidak waspada sewaktu-waktu bisa meledak.

ada bocoran gas, api pun cepat menyala dari kompor minyak yang menyala di sampingnya. Selain itu, tidak adanya ventilasi di ruang dapur juga diduga memperbesar kemungkinan terjadinya ledakan. Sebab, jika ada bocoran gas, gas tersebut akan tetap bertahan di ruang dapur. Sehingga ketika ada percikan api, kebakaran yang memicu ledakan pun cepat terjadi.

Kebocoran sendiri, selain akibat selang dan regulator yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia, distribusi elpiji secara ilegal di beberapa tempat seperti di Bekasi, Surabaya dan Medan juga diduga ikut memicu. Seperti diberitakan, Mabes Polri telah membongkar sindikat penyuntikan tabung di Bantargebang, Bekasi. Ketika itu, Polisi berhasil menangkap beberapa pelaku dan mengungkap praktik ilegal berupa menyuntik gas dari tabung 3 kg (bersubsidi) ke tabung 12 kg (non-subsidi) yang menurut Kepala Pusat

Laboratorium dan Forensik Polri Brigjen (Pol) Budiono juga berpotensi membuat bocornya tabung gas sehingga memicu terjadinya kebakaran hingga ledakan. Disparitas harga gas bersubsidi dengan gas tanpa subsidi diduga telah memancing tindak kriminalitas itu.

Untuk mengantisipasi meluasnya insiden akibat tabung gas, belakangan pemerintah secara berangsur akan menarik 9 juta tabung gas 3 Kg yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) dari 45 juta tabung yang beredar saat ini. Penarikan dilakukan melalui stasiun-stasiun pengisian gas dengan cara mengganti tabung kosong tidak ber SNI dengan yang ber SNI.

Di samping itu, sejak 6 Juli pemerintah juga mengaku sudah menarik jutaan selang, regulator, dan katub tabung elpiji 3 kg yang tidak memenuhi SNI serta

mempersiapkan komponen pengganti yang baru. Namun, kebijakan ini pun menjadi dianggap memberatkan masyarakat. Karena, aksesoris pengganti itu harus dibeli sesuai dengan harga pabrik di Stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) atau agen mitra PT Pertamina.

PT Pertamina sendiri disebut akan meningkatkan sosialisasi keamanan penggunaan elpiji serta melakukan pengawasan terhadap penerapan standar operasi elpiji di instalasi dan SPBE. Menurut Vice President Komunikasi PT Pertamina, Basuki Trikora, langkah itu dimaksudkan agar pemakai lebih mudah mengetahui penggunaan elpiji secara aman, termasuk memasang label peringatan.

Selain itu, pengawasan penerapan standarisasi operasi elpiji ketika mengisi tabung dan mendistribusikannya satu per satu di instalasi elpiji Pertamina dan SPBE juga ditingkatkan. Mulai dari penanganan atau pemindahan tabung elpiji, menurunkan tabung elpiji dari mobil truk pengangkut ke gudang, dan bagaimana cara menumpuk tabung-tabung elpiji di wilayah lapangan tabung elpiji. Semuanya harus berdasarkan prosedur standarisasi. Jika ada agen atau SPBE yang terbukti tidak melakukan standarisasi, akan diberi sanksi berupa penghentian operasi sementara.

Untuk korban kecelakaan akibat penggunaan tabung gas sendiri, Menkokesra Agung Laksono mengatakan, PT Pertamina akan menanggung biaya pengobatannya dengan pembiayaan melalui sistem asuransi. Rumah dan perabot rumah yang rusak juga akan diberikan ganti rugi dengan pengantian maksimal Rp 100 juta. Sejauh ini, pihak Pertamina mengaku telah mengeluarkan dana Rp 2 miliar lebih. Di antaranya untuk dana santunan Rp 25 juta per orang untuk korban meninggal serta untuk penggantian rumah dan perangkat rumah tangga.

Sementara itu, untuk menghindari kebocoran, seperti dikatakan Direktur Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Arya Rezavidi (2/7/2010), BPPT mengusulkan perbaikan desain kompor gas yang terintegrasi dengan tabung gas untuk mengurangi titik sambungan yang harus dikontrol konsumen. Biaya produksi kompor gas terintegrasi itu juga menurutnya akan lebih murah, yaitu sekitar Rp 70.000, sedangkan kompor gas model lama mencapai Rp 84.000.

Belajar dari pengalaman kejadian selama ini, masyarakat hendaknya tidak hanya menunggu kebijakan pemerintah. Sebagai konsumen, hendaknya turut aktif mengantisipasi terjadinya peristiwa yang sama pada diri masing-masing dengan memeriksa lebih seksama tabung gas dan aksesorisnya, juga menghindari sumber api di sekitar tabung gas, serta menyediakan ventilasi di ruang dapur. ■ **HB, MS**

SNI 1591:2008  
Katup Tabung Baja LPG

SNI 7369:2007  
Regulator Tekanan Rendah

SNI 1452:2007  
Tabung Baja LPG

SNI 06-7213-2006  
Selang Karet

SNI 7368:2007  
Kompor Gas Satu Tungku



# Pro Kontra Pemindahan Ibukota

**Kota Jakarta kini mengalami banyak beban dan dilema seperti kemacetan, banjir, beban penduduk, urbanisasi, kerusakan ekologis hingga potensi gempa. Kondisi Jakarta yang seperti itu membuat munculnya wacana untuk memindahkan Ibukota Indonesia dari Jakarta ke daerah lain. Nama kota Palangkaraya menjadi pilihan yang dianggap ideal untuk menggantikan Jakarta sebagai ibukota negara.**

**W**acana pemindahan ibukota sebenarnya sudah muncul sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kala itu Bung Karno mengusulkan Palangkaraya sebagai pengganti Ibukota Jakarta. Wacana pemindahan ibukota kembali terdengar setelah Ketua DPR Marzuki Alie, yang mengakui bahwa dirinya yang pertama kali melontarkan wacana pemindahan ibukota, menyarankan agar Ibukota Indonesia dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan cara itu pembangunan pun merata. “Dari timur ke tengah, dari barat ke tengah,” kata Marzuki.

Pro dan Kontra pun bermunculan menanggapi ide pemindahan ibukota tersebut. Bagi mereka yang kontra, seperti Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan yang menaksir ongkos pemindahan ibukota negara ke wilayah lain sangat besar. Lembaga ini menyarankan dilakukan pengkajian mendalam jika ingin pemindahan diwujudkan. “Pindah itu implikasinya luas.” Rusman menyarankan agar pemerintah pusat membenahi wilayah DKI Jakarta lebih dulu sebelum memutuskan memindahkan ibukota. Salah satu caranya adalah tak memusatkan pembangunan mal di Jakarta. “Banyak mal hanya akan menarik lebih banyak pendatang,” kata dia.

Pendapat kontra lainnya datang dari

arsitek perkotaan Marco Kusumawijaya menilai, wacana pemindahan ibukota ke Palangkaraya adalah sebuah mimpi besar yang tidak menyelesaikan masalah. Menurut dia, pemindahan ibukota sebagai salah satu upaya pemerataan adalah pemahaman yang salah. Selain memakan waktu lama, kata dia, pemindahan ibukota akan membutuhkan biaya tidak sedikit. Menurut Marco, dana sebesar itu akan lebih menguntungkan jika dipakai membenahi Jakarta.

Ada juga pihak yang setuju jika Jakarta, kota tempat diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, tidak lagi menjadi ibukota. Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari, mengatakan bahwa sejak awal Jakarta memang tidak ideal untuk menjadi ibukota negara. Karena itu, sejak era kemerdekaan, Bung Karno sudah memunculkan wacana pemindahan ibukota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di era Orde Baru, muncul usul lokasi lain, yakni di Jonggol.

Peneliti LIPI Siti Zuhro mengatakan pemindahan ibukota harus menjadi starting point untuk menata ulang daerah dengan mengoptimalkan otoda dan sentralisasi. Salah satunya dengan membuka cluster-cluster ekonomi baru. Sehingga, tidak hanya menjadikan Jakarta sebagai kota yang “menggoda” bagi masyarakat. “Jakarta terlanjur salah urus dari rezim ke rezim. Kini kita mengharapkan ada wajah baru,” katanya.

Adapun pemilihan kota Palangkaraya sebagai pengganti Jakarta sebagai Ibukota Indonesia, menurut Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Achmad Nurmandi adalah karena dari sisi geopolitik, geologi, dan geografis cukup strategis. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Kalimantan Tengah, Hamdani, juga mengatakan “Jaraknya 1 jam terbang ke Jakarta. Kira-kira sama seperti Jakarta – Surabaya. Ia juga menyebutkan bahwa Palangkaraya juga memiliki lahan yang luas, mencapai 2.678,51 km<sup>2</sup>. Kalimantan sendiri seluruhnya 15 juta hektar atau 1,5 kali pulau Jawa. “Masih banyak hutan lebat,” beber Hamdani.

Namun tentu saja memindahkan ibukota suatu negara tidaklah semudah yang dibayangkan. Hamdani mengakui proses pemindahan ibukota membutuhkan kemauan politik bersama. DPR dan pemerintahan harus merevisi dulu UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan sehubungan pemindahan ibukota negara tersebut adalah soal anggaran. Achmad Nurmandi berpendapat biaya untuk pembangunan Palangkaraya menjadi kota yang siap menjadi pusat pemerintahan dengan menyediakan berbagai infrastruktur, baik bangunan maupun jalan, diperkirakan mencapai Rp 100 triliun,” katanya. Ia mengatakan, dana Rp 100 triliun itu lebih sedikit atau lebih hemat dibandingkan biaya untuk mengatasi permasalahan Jakarta saat ini seperti kemacetan, banjir, dan berbagai masalah lain. “Jumlah Rp 100 triliun itu bisa dicicil selama 10 tahun dari APBN untuk membangun ibukota baru,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.

Masalah potensial lainnya yang bisa muncul adalah, seperti diungkapkan Achmad Nurmandi, satu hal yang perlu diantisipasi jika Palangkaraya menjadi Ibukota Indonesia, yakni kesiapan penduduk lokal. “Penduduk lokal harus disiapkan dan jangan sampai terpinggirkan. Jadi, semua harus disiapkan secara matang,” katanya.

Bagaimana tanggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai wacana pemindahan ibukota ini? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersilakan semua pihak mengkaji kemungkinan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi Jakarta yang macet dan potensi gempa menjadi pertimbangan wacana pemindahan ini. “Presiden menganggap diperlukan pemikiran yang matang dan komprehensif dalam mengkaji perpindahan ibukota,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai. ■

# Teknologi Meminimalis Meledaknya Tabung Gas

Mengurangi sumber titik kebocoran, solusi atasi ledakan tabung gas

**R**angkaian peristiwa ledakan tabung gas 3 kilogram yang terjadi belakangan ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Selain faktor human error (kesalahan manusia) ledakan juga disebabkan oleh kualitas dari selang dan regulator yang belum terjamin. Diperkirakan, persambungan antara tabung gas dan kompor menjadi penyebab utama ledakan. Kebocoran gas yang terakumulasi dalam jumlah banyak dan dalam ruangan tertutup yang kemudian tersulut api merupakan penyebab ledakan. Jadi, bukan dari tabung.

Menurut data Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), dalam dua tahun terakhir sejak 2008 hingga Juli 2010 telah terjadi 189 ledakan elpiji. Di antaranya, 61 kasus terjadi pada 2008, 50 kasus pada 2009 dan 79 kasus pada 2010. Sehingga dikhawatirkan dapat menjadi bom waktu. Padahal, harapan untuk konversi minyak tanah ke tabung gas khususnya 3 kilogram ini adalah untuk mengurangi beban rakyat miskin yang rata-rata berpenghasilan rendah. Dengan asumsi perbandingan 1 liter minyak tanah sama dengan 0,57 kg gas elpiji. Namun dengan kejadian ini, bukan untung yang diperoleh, tapi kerugian. Selain kehilangan nyawa dan kerugian materil, juga menjadi tekanan mental bagi masyarakat akibat senantiasa was-was akan terjadinya ledakan.

Sebagai sebuah lembaga pemerintah yang memiliki kompetensi dalam kajian teknologi, Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi (PTKKE) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) belakangan mencoba mengkaji penyebab utama terjadinya ledakan. Menurut Direktur BPPT Arya Rezavidi, ada tiga faktor pemicu meledaknya tabung gas, yakni kebocoran antara katup (valve) dengan regulator, antara regulator dengan selang dan antara selang dengan kompor.

BPPT pun menawarkan desain baru untuk mengatasi timbulnya ledakan tabung gas yang diakibatkan sumber masalah yang ditemukan tersebut. Bila dibandingkan dengan model tabung gas yang sedang beredar, bentuk tabung gas 3kg dan kompor buatan BPPT ini diyakini jauh lebih aman.

Pembuatannya pun diinspirasi dari bagaimana mengurangi faktor kesalahan manusia. "Ide dasar dari desain kami adalah bagaimana mengurangi faktor human



**DESAIN BARU:** Kompor gas buatan BPPT lebih terintegrasi untuk meminimalisir titik kebocoran pemicu ledakan.

error yang rentan terjadi. Kami membuat desain tabung gas langsung terintegrasi dengan kompor. Kosumen hanya perlu memasukan regulator yang tersambung dengan burner (pembakar) ke dalam tabung dengan cara memutar, persis seperti memutar baut," kata Arya Rezavidi.

Selain itu, pemilihan material yang digunakan juga menjadi pertimbangan utama, karena dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi panas hasil pembakaran gas di atas 53 persen. Untuk kepala pembakar (burner) pada kompor dibuat dari bahan kuningan supaya tahan lama dalam kondisi panas. Kualitasnya jauh lebih tahan dibandingkan dengan kepala pembakar dari besi, untuk jangka waktu lima tahun. Kompor juga dilengkapi dengan alat pengatur besar-kecilnya api yang bisa diputar. Sedangkan yang dari besi, lebih mudah karatan, sekaligus juga bisa mengurangi efisiensi panas yang dihasilkan. Kualitas api biru yang dihasilkan menunjukkan kualitas pembakaran yang hampir sempurna menunjukkan keseimbangan antara gas dan oksigen. Beda dengan kepala pembakar yang rusak, api akan berwarna merah. Selain itu, ketebalan pelat tabung juga berpengaruh terhadap daya tahan tabung. Untuk desain baru ini, tabung gas dirancang untuk menahan tekanan 110 bar.

Desain tabung gas ini menurut Arya,

sebenarnya telah ditawarkan jauh-jauh hari sejak diterapkannya program konversi gas. Tapi ada keraguan berbagai kalangan pada saat itu. Karena posisi kompor yang dinilai terlalu dekat dengan tabung gas dikhawatirkan bisa menyulut api yang bisa menimbulkan ledakan. Namun, karena tabung gas sudah didesain untuk tekanan 110 bar dalam desain baru ini, maka dengan rancangan hitungan kekuatan tersebut (110 bar), diperhitungkan akan bisa mencegah terjadinya ledakan. "Kami jamin ini aman karena tabung gas ini tahan sampai 50 bar, artinya katup gas akan terlepas jika tekanan lebih dari itu," kata Arya Rezavidi.

Beda dengan desain yang sedang ada di pasaran yang memiliki tiga persambungan yang semuanya memiliki resiko kebocoran. Dalam desain baru ini menjadi lebih terintegrasi. Titik persambungan yang ada dibuat seminimal mungkin. Bagian pembakaran atau kepala kompor langsung disambungkan ke tabung gas melalui regulator. Dengan menghilangkan fungsi regulator dan slang, kebocoran diperkirakan akan berkurang hingga 30 persen.

Cara penggunaannya pun praktis tinggal menyiapkan tabung gas, kemudian pasang alat pembakar tepat di atas tabung tersebut, lalu masukkan badan kompor yang terbuat dari lempengan besi sebagai penyangga alat masak. Sedangkan pemasangan alat pembakar ke katup tabung gas dilakukan dengan cara diputar. Dengan demikian, pengguna hanya mengontrol satu titik saja. Tabung gas ini dirancang mampu menahan beban lebih dari 25 kilogram.

Saat ini BPPT sedang melakukan penyempurnaan desain. Agar dalam distribusinya ke masyarakat mudah dilakukan dan bisa ditumpuk-tumpuk di pangkalan-pangkalan tabung yang ditunjuk. Untuk meningkatkan kenyamanan para pengguna, tabung juga dilengkapi dengan alat deteksi kebocoran. Dan yang tak kalah penting, untuk meningkatkan keamanan penggunaannya melalui pencegahan dini terjadinya kembali ledakan, sosialisasi yang baik harus ditingkatkan.

Untuk desain baru tersebut, BPPT menawarkan desain paket kompor dan tabung gas elpiji 3 kg seharga Rp 180.000. Harga ini lebih murah 10-20% dari harga paket lama. Kini, penggunaan kompor masak desain baru BPPT ini tinggal menunggu kebijakan dari pemerintah. ■ **HB, MJK**



**MENINJAU PAMERAN:** Tolu Sukidjo mencoba senapan angin saat mengunjungi stand mitra binaan JR di PRJ 2010.



**GALERI:** Ny.Badariah Suhada di antara madu hutan liar.

# Kepedulian Membangun Ekonomi Mikro

**Persaingan di era perdagangan bebas semakin tajam dan terbuka. Berbagai jurus perlu digunakan dalam memenangkan pertempuran merebut peluang pasar. Kuncinya, saling peduli dan membangun sinergi.**

**P**erdagangan bebas yang bergulir selama ini, bukan peluang seperti hitungan matematika. Sebaliknya, sebuah gurita yang mengancam ke berbagai sudut kota dan desa di Indonesia, bagaikan air bah yang sulit dibendung apalagi menghindari. Dari merk terkenal sampai yang aspal (asli tapi palsu) juga produk China yang murah meriah dan barang kualitas rendah membanjiri pasar Indonesia.

Pertanyaan muncul. Apa kekuatan kita di medan "pertempuran" merebut *market share* yang ada. Jawabannya adalah saling peduli, di antaranya seperti yang dilakukan PT Jasa Raharja (Persero). Sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang asuransi dan pelaksana UU 33 dan 34 tahun 1964. Kepedulian Jasa Raharja (JR) memajukan usaha mikro cukup menonjol dibanding yang lain. Bantuan modal maupun bantuan manajemen modern yang diberikan JR, menjadikan perusahaan yang dibantu berpeluang besar untuk tumbuh.

Pengucuran dana dan kemitraan yang dijalin Jasa Raharja dengan pengusaha kecil sejak 1992, merupakan bukti perhatian perusahaan ini turut mengangkat harkat dan martabat ekonomi kerakyatan menjadi usahawan sukses. Permen BUMN No. Per.05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN pada aspek usaha kecil, BUMN peduli dan bina lingkungan, juga menjadi pedoman pelaksanaan kemitraan JR selama ini.

Data PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) JR tingkat pusat me-

nunjukkan, dari tahun 2009 s/d semester 1 tahun 2010 saja, perusahaan ini telah menyalurkan dana sekitar Rp 16.574.388.381. Sementara dari tahun 1992 sampai triwulan ke-2 tahun 2010 sudah Rp 376.773.697.008,- dana disalurkan kepada 54.365 unit mitra binaan/ usaha kecil yang tersebar di 33 provinsi.

Menurut H. Tolu Sukidjo, Kepala Divisi Keuangan JR, komitmen JR adalah membantu dan berusaha membesarkan melalui penambahan modal atau meningkatkan manajemen. Seperti pelatihan, marketing maupun menyertakan dalam pameran. Baik tingkat nasional maupun skala internasional dengan fasilitas dari JR. Prinsipnya, setiap perusahaan yang dibantu diharapkan dapat berkembang maju.

Kemitraan dan bina lingkungan diarahkan di sekitar kegiatan operasional JR yang tersebar di 33 provinsi yang berada di wilayah kerja di 28 kantor cabang JR se-Indonesia. BUMN peduli sifatnya nasional dan disesuaikan dengan kepentingan nasional. "Kita berharap, agar usaha mikro yang mendapat bantuan mampu menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru, semakin kompetitif, dan siap menghadapi persaingan global," tutur H Tolu.

## Senapan dan Madu

Masyarakat penerima bantuan kemitraan sendiri mengaku sangat banyak terdorong oleh program JR. Ade Supriyatna, pengusaha pembuat senapan angin yang merupakan salah satu penerima bantuan kemitraan dari JR mengaku, bisa meraih keberhasilan, bahkan mampu memba-

ngun show room yang presentatif seperti sekarang ini, tidak lepas dari bantuan modal JR sebesar Rp 20 juta yang diterima pada 2005, kemudian bantuan kedua sebesar Rp 25 juta. Ade mengatakan, bahwa pinjaman kedua terwujud setelah pertama dilunasi.

Menurut pemilik PD Pipik Putra yang beralamat di Jatinarong-Sumedang, Jawa Barat ini, kini usahanya makin berkembang dan pesanan pun semakin banyak. Hal tersebut diakuinya berkat ikut pameran yang disponsori JR. "Jasa Raharja bukan sekadar memberi pinjaman. Tapi ada yang lebih bernilai dan tidak bisa diukur dengan uang, yaitu adanya pelatihan, marketing, seminar dan fasilitas penyertaan pameran tingkat nasional dan internasional," kata Ade didampingi Asep Koordinator PKBL JR cabang Jawa Barat.

Hal senada diungkapkan Ny Badariah Suhada, pengusaha madu hutan liar yang berdomisili di Satria Bekasi. Pengusaha yang mengawali usahanya sejak tahun 2009 dari buah perjalanan panjang suaminya, Suhada, yang melakukan penelitian selama beberapa tahun terhadap keunggulan madu hutan liar, dia mengakui perhatian JR yang luar biasa.

"Adanya bantuan JR yang diterima Februari 2010, pertama memperkuat permodalan dan adanya pemberian fasilitas pameran selama Pekan Raya Jakarta 2010. Ini yang belum pernah kami dapatkan dari yang lain. Juga sebagai bukti membesarkan mitra binaan, luar biasa perhatian JR. Diibaratkan, diberi kail dan umpan sekaligus. Dengan fasilitas promosi dari JR, usaha berkembang dan makin dikenal," jelasnya.

Kini, pelanggan madu asli hutan liar jualannya, seperti madu Pelawan, madu Rempodong, madu Kamper, dan madu bunga Lating yang masing-masing memiliki khasiat yang berbeda tapi dengan tujuan yang sama, yakni menjaga kesehatan dan membangun vitalitas tubuh agar selalu prima. Pelanggan, diantaranya kalangan artis, seperti Opick, Alex Komang, Slamet Raharjo, Iwan Fals, Novia Kolopaking dan lainnya. ■ RI



# JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

[www.jasaraharja.co.id](http://www.jasaraharja.co.id)

PERJALANAN  
JAUH  
MAUPUN DEKAT,  
DILINDUNGI  
ASURANSI  
KECELAKAAN

Lingkup Jaminan :

**UU No.33 Tahun 1964**

1. Bagi setiap penumpang yang sah dari alat angkutan umum baik darat, laut/sungai/penyeberangan, maupun udara.
2. Bagi setiap penumpang kendaraan umum dalam atau tidak dalam trayek (trayek tetap dan trayek tidak tetap tapi berizin/kendaraan dalam trayek insidental).
3. Memberikan jaminan ganda kepada penumpang kendaraan bermotor umum (bus) yang berada di dalam kapal penyeberangan
4. Dalam hal penumpang alat angkutan umum yang mayatnya belum ditemukan. Maka santunan diberikan setelah adanya keputusan tetap dari pengadilan.

Lingkup Jaminan :

**UU No.34 Tahun 1964**

1. Bagi setiap korban yang ditabrak oleh kendaraan bermotor alat angkutan lalu lintas jalan dan kereta api.
2. Bagi korban tabrakan dua kendaraan bermotor atau lebih dalam posisi benar (kecuali korban kecelakaan tunggal tidak termasuk yang dijamin).
3. Bagi korban kasus tabrak lari, untuk kasus seperti ini terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran terjadinya kecelakaan.



**SMS Center :**  
**0812-10-500-500**

# Kapasitas Lintas, Optimalkan Pelayanan

Modernisasi prasarana dan sarana perkeretaapian perlu saling memperkuat. Bila optimalisasi pelayanan sebagai tujuan.

Seperi kota metropolitan lain di Indonesia, kota Medan, Sumatera Utara semakin padat oleh pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitas bisnisnya. Untuk mengimbangi mobilitas warga itu, transportasi massal seperti kereta api semakin dibutuhkan. Menyadari hal tersebut, belakangan peremajaan prasarana perkeretaapian pun makin menggeliat di kota ini.

Tahun 2009, merupakan revolusi perubahan menuju modernisasi prasarana kereta api di Sumatera Utara. Disebut demikian, karena pada tahun 2009-lah bantalan beton mulai menggusur bantalan kayu yang terbentang semakin luas. Selanjutnya, tahun 2010 merupakan babak baru pembangunan prasarana KA dengan menggunakan R54 dan bantalan beton sepanjang 26,4 km. Yakni pada lintas Kisaran-Banyumanik sepanjang 21,4km dan lintas Tebing Tinggi-P Siantar sepanjang 5 km. Pemasangan bantalan beton dan R54 dilakukan bulan Agustus secara bersamaan.

Pertanyaan muncul, apakah dengan sisa waktu 4 bulan ini pembangunan sepanjang 26,4 km bisa diselesaikan? Sementara bahan yang diperlukan, seperti bantalan beton dan R54 baru datang akhir bulan Juli. Menjawab pertanyaan tersebut, E Silaen, Kasatker Sumatera Utara, optimis pekerjaan itu selesai tepat pada waktunya. "Saya yakin target tercapai, semua persiapan sudah dilakukan, bantalan beton dan track jenis R54 buatan China. Bahan datang, siap dipasang," ungkapnya yakin.

Setiap batangan R54 sepanjang 25m nantinya akan disambung menjadi 150m melalui las master mix. Kemudian baru dipasang dan seterusnya. Pengelasan menghasilkan rel yang rata dan berbeda dengan las biasa (las sambung). Tujuannya, agar pengguna jasa kereta api merasa lebih nyaman.

Sebelumnya, kata Silaen, pihaknya menduga hanya rel 42 bekas bongkaran dari Jawa yang digunakan di Sumatera Utara. Tapi, ternyata diberi R54, yang jauh lebih baik. Dari situ, perhatian pemerintah tampak semakin baik. Namun, perhatian lain, dimana di sebagian besar track menggunakan R25, R33, dan R38. Ini berpengaruh terhadap tingkat kecepatan kereta.

Menurut E Silaen, yang menjadi pertimbangan pembangunan prasarana di lokasi Kisaran-Tanjung Balai, tidak lepas dari tingginya frekuensi perjalanan KA yang mencapai 6 kali per hari. Dan perkembangan terbaru menunjukkan, pengguna jasa kereta api, baik angkutan barang dan



E. Silaen, Kasatker Perkeretaapian Sumut

penumpang semakin berimbang. Padahal dominasi angkutan barang sebelumnya jauh lebih besar.

Bantalan beton idealnya menggunakan R54 atau minimal R42 seperti yang ada di Jawa. Namun kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, semisal, bantalan beton dan R33 dan R38, akan berimbas pada tingkat kecepatan kereta yang maksimum hanya 50km per jam. Tapi jika menggunakan bantalan beton dan R42, kecepatan mampu dipacu antara 60-70km per jam. Dan jika menggunakan bantalan beton dan R54, kecepatan kereta bisa mencapai 90-100 km per jam.

Pembangunan track dan persinyalan elektrifikasi (otomatis) di stasiun Belawan bagaikan satu kesatuan. Namun ada kendala lain yang muncul. Bila turun hujan, di seputar stasiun itu terjadi gandingan air. Maka dilakukan penataan melalui peninggian track dan penambahan dari 3 menjadi 4 emplasemen. Termasuk drainase ditingkatkan kapasitasnya.

"Persinyalan elektrifikasi diawali di sta (stasiun) Medan, sta Tebing Tinggi tahun (2009), sta Belawan (2010). Dan diharapkan, 2011 elektrifikasi otomatis terpasang

juga di sta Rantau Prapat dan sta Kisaran. Semua persinyalan yang di produksi PT LEN itu sesuai dengan standar yang berlaku universal. Ini sesuai usulan kita," kata Silaen.

"Alokasi anggaran 35 persen peningkatan persinyalan dan 65 persen pembangunan track dan peningkatan jembatan, hal ini seiring rencana PT. KA mengoperasikan lok CC, pengganti loko BB dengan daya angkut lebih besar, ini perlu penyesuaian prasarana," ungkapnya.

## Alternatif

Satu hal yang tentu saja berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian bagi ibukota provinsi Sumatera Utara ini. Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur lalu lintas perdagangan terpadat di Indonesia, baik barang maupun jasa yang tidak hanya bersifat domestik tetapi juga internasional telah mendorong kota Medan tumbuh sejajar dengan kota-kota besar lainnya.

Menurut Silaen, kalau dilihat, Pelabuhan Belawan sudah terlalu padat. Seperti menimbunnya berbagai barang komoditi impor dan ekspor. CPO sebagai komoditi andalan Sumatera Utara misalnya, tidak mungkin lagi menggunakan pelabuhan Belawan. Karena itu, perlu pelabuhan alternatif. Pilihan itu adanya di Kuala Tanjung. Jika itu terjadi, di lokasi ini dimungkinkan untuk membangun jalur kereta api melalui stasiun Bandar Tinggi, - sekitar 25 km ke Kuala Tanjung atau 98 km dari Medan. Lokasinya yang strategis, menurut Silaen perlu dipertimbangkan.

Prasarana dan sarana kereta api makin memadai, sesuai konsep pengembangan perkertaapian perkotaan untuk mengurangi tingkat kemacetan seperti di Medan. Perlu dukungan semua pihak, kata Silaen, seperti PT INKA yang selama ini pemasok kereta. Dimana kereta Sri Lelawangsa diantara produk INKA yang menjadi salah satu primadona pengguna jasa kereta api di Medan dan sekitarnya. ■ RI



KRD-E SRI LELAWANGSA: Salah satu produk INKA saat melintas di atas bantalan beton dan rel 42.

## Zulkifli Zaini Dirut Bank Mandiri

**R**apat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Mandiri (5/7/2010) memutuskan Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama Bank Mandiri yang baru, menggantikan Agus Martowardojo yang dilantik menjadi Menteri Keuangan sejak 20 Mei 2010. Sebelum menduduki orang nomor satu di bank pelat merah tersebut, Zulkifli menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Operasi di bank yang sama.

Di Bank Mandiri, pria kelahiran 1956 ini juga pernah

menjabat sebagai Direktur Commercial Banking dan berbagai jabatan strategis lainnya, seperti sebagai team leader in credit risk management, vice president and division head of government relationship management, group head of retail risk management, serta senior executive vice president of distribution networks.

Di dunia perbankan sendiri, sarjana lulusan Institut Teknologi Bandung 1980 dan peraih master of business administration (MBA) bidang keuangan dari Universitas Wash-

ington, AS pada 1994 ini memulai karirnya di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) pada tahun 1983, hingga kemudian Bapindo melebur menjadi Bank Mandiri. Di Bapindo ia menempati posisi mulai dari account officer, staff of banking and finance services, head of project finance, deputy branch manager, dan terakhir branch manager. Dengan tugas yang baru sebagai Dirut Bank Mandiri ekarang ini, Zulkifli Zaini akan melanjutkan program transformasi yang telah dicanangkan sebe-



lumnya, menjadikan Bank Mandiri sebagai salah satu bank terdepan di Asia Tenggara pada tahun 2014 dan salah satu top 3 bank pada akhir 2020. Sebelum di perbankan, ayah dua orang anak ini pernah bekerja di Wiratman and Associates pada tahun 1980. ■

## Mahfud MD Kangen dengan SBY

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof DR Moh Mahfud MD bercerita tentang hubungannya dengan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam buku terbarunya yang diluncurkan di gedung Mahkamah Konstitusi (6/7/2010). Dengan judul "On The Record, Mahfud MD di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi". Berisikan tentang kiprah dan pengalamannya selama memimpin MK. Selain itu, dalam buku tersebut ia juga mengungkapkan hubungannya dengan SBY yang awalnya informal menjadi sangat formal sejak ia menjabat sebagai hakim konstitusi. "Saya dulu sering bertelepon, SBY orangnya hangat, ngomong yang santai-santai," katanya. Namun setelah ia menjadi hakim sekarang sudah tidak lagi saling bertelepon dan bercanda gurau. "Sebenarnya saya kangen dengan SBY tentang masa itu, bergurau saat ketemu," kenang pria kelahiran Sampang, Madura 13 Mei 1957 ini. ■



## Jakob Oetama Seni Budaya Harus Tumbuh Subur

Dalam perayaan puncak peringatan HUT Kompas yang diiringi dengan pementasan drama musikal "Diana, Rahasia Hatiku" di Balai Sidang, Senayan, Jakarta 7 Juli 2010 lalu. Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama mengatakan, peringatan hari ulang tahun ke-45 Kompas harus digunakan sebagai momentum untuk memelihara dan menumbuhkan subur seni budaya Nusantara. Ia mengatakan pementasan drama musikal ini, semacam obsesi Kompas untuk mengasah nilai mengenai seni budaya. Karena menurut pria kelahiran 1931 ini, penggalian seni budaya tersebut adalah hal yang sangat penting. Media harus memainkan peranannya secara kritis konstruktif untuk memberikan masukan dan membentuk sikap masyarakat. "Salah satu syarat demokrasi adalah kebebasan menyatakan pendapat dan kritik disertai pemahaman tentang persoalan yang ada," ujarnya. ■



## Martha Tilaar Dapat Penghargaan UNGC

Pengusaha di bidang kecantikan Martha Tilaar kembali menerima penghargaan dari dunia internasional, yakni penghargaan Outstanding Award for Contribution 2000-2010 dari United Nations Global Compact (UNGC). UNGC bentukan mantan Sekjen PBB Kofi Annan pada 26 Juli 2000 di New York itu adalah merupakan lembaga non-profit yang memberikan penghargaan kepada pebisnis yang di-

anggap konsisten mengintegrasikan antara bisnis dengan sepuluh prinsip UNGC di bidang tenaga kerja, hak asasi manusia, dan anti korupsi.

Martha Tilaar terpilih dari 8 ribu pemimpin perusahaan, institusi, lembaga pendidikan, dan LSM. "Saya dipilih di antara giant-giant, di antara perusahaan-perusahaan besar dunia. Saya semut yang menggigit giant," kata wanita yang mengaku tak menyangka akan

mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan itu sendiri diterimanya saat menghadiri ulang tahun ke-10 UNGC di Hotel Marriott Marquis New York, AS, 24-25 Juni 2010 lalu. "Saya merasa diperhatikan, dihargai. Tapi terus terang penghargaan ini juga merupakan beban, karena saya harus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya," katanya. Seperti diketahui, wanita kelahiran 1937 ini juga



diangkat sebagai Duta Pendidikan dan Pelatihan untuk Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melatih para perempuan di penjara. ■



**FAKTA:** Lebih dari 21 persen atau sekitar 62 juta penduduk Indonesia merupakan perokok.

# Mengapa Masih Harus Merokok?

**Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin. Kalimat di atas adalah sebuah peringatan, tertulis dan terpampang secara jelas di setiap bungkus rokok yang secara resmi dinyatakan produsen rokok.**

**P**ihak produsen sangat sadar bahwa merokok dari aspek kesehatan sama sekali tidak ada manfaatnya. Merokok sangat berbahaya dan dapat menimbulkan ragam penyakit. Sering diibaratkan, merokok sama halnya mengakhiri hidup secara pelan-pelan dan menyakitkan pula. Lalu mengapa orang-orang masih harus merokok? Masyarakat Indonesia membakar uang lewat rokok Rp 90 triliun lebih setiap tahun.

Bagi perokok, peringatan itu -sekali pun dibaca dan dipahami artinya, tidak menjadi penghalang untuk membeli rokok. Baginya merokok sudah merupakan kebutuhan. Saat sarapan pagi atau selepas makan, seolah-olah masih ada yang kurang kalau tidak merokok. Baru merasa

plong apabila asap rokok diisap dalam hingga masuk ke rongga paru-paru dan kemudian dikeluarkan lewat mulut atau hidung atau mungkin secara bersamaan. Bahkan banyak yang tidak bisa bekerja dengan baik, jika rokok tidak nempel dicelah-celah bibirnya.

Bagi pihak-pihak tertentu, daya tarik rokok itu luar biasa. Perokok ulung, mungkin berhenti saat tidur, saat makan, dan saat mandi. "Lebih baik makanan dikurangi sedikit, daripada rokok tidak ada", menjadi sebuah filosofi bagi perokok. Itulah sebabnya, berhenti merokok tidak semudah membalik telapak tangan. Saat sakit atau selama proses penyembuhan, bisa saja tidak merokok, tetapi setelah sehat kebiasaan merokok seakan otomatis kambuh kembali.

Pemerintah juga menyadari bahaya yang ditimbulkan rokok. Atas dasar itu, dikeluarkan berbagai peraturan yang intinya anggota masyarakat dilarang merokok di tempat-tempat umum. Bahkan di sejumlah instansi pemerintah tidak ada lagi ruangan bagi perokok. Pemda DKI Jakarta misalnya, telah mengeluarkan Perda yang isinya antara lain mendenda perokok Rp 50 juta atau subsidier enam bulan kurungan penjara jika tertangkap tangan merokok di tempat yang dilarang.

Sesungguhnya, perokok pun tahu dan paham akan bahaya yang ditimbulkan rokok yang diisap. Tetapi, itu tadi, karena untuk pihak-pihak tertentu, merokok sudah menjadi kebutuhan. Hidupnya seakan hampa tanpa rokok. Paling aneh, ada orangtua yang tetap merokok padahal sedang bermain dengan anak-anaknya yang masih balita. Jika dilarang, malah marah-marah. "Saya sangat sulit memulai aktivitas tanpa merokok. Bagi saya merokok dapat mendatangkan ketenangan untuk bekerja. Tanpa rokok pikiran rasanya kurang terbuka," kata Moh Igbal yang mengaku sejak usia 15 tahun sudah merokok dan terus dilakukannya hingga kini dia mendekati usia 56 tahun. Dia mengaku tidak pernah berniat berhenti merokok dan dia juga mengaku tidak pernah mengeluhkan kesehatannya karena merokok. Justru, kalau tidak merokok dia merasa terganggu.

Memang, argumentasi yang diungkapkan Igbal itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah representasi umum, tetapi jumlah perokok di Indonesia tetap tinggi. Bisa saja di kalangan orangtua atau mereka yang berusia lanjut-karena berbagai alasan, berhenti merokok. Tetapi jumlah perokok pemula jumlahnya lebih banyak, sehingga total jumlah perokok tetap tinggi. Larangan-larangan yang dikeluarkan pemerintah tidak mampu mengurangi jumlah perokok.

Sebuah data menyebutkan, lebih dari 31 persen atau kira-kira 62 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan perokok dan menjadi pelanggan fanatik pabrik rokok. Jika sudah dicap sebagai pelanggan fanatik, tentu larangan apa pun akan 'dilanggar'. Kebiasaan merokok seakan telah menjadi budaya di berbagai bangsa di belahan dunia, termasuk Indonesia. Ironis memang, tetapi itulah yang terjadi di negeri ini. Pabrik rokok tetap mengeluarkan produknya dan laris. Kebun tembakau tetap menjadi pilihan petani karena pasarnya terjamin. Tak dapat dimungkiri, industri rokok menjadi sebuah lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Mulai dari pemanfaatan lahan tembakau, petani, pabrik pupuk, tenaga kerja di pabrik hingga penjual. Industri rokok juga mengisi devisa Negara. Namun Kementerian Kesehatan menyebutkan dampak positif yang disumbangkan industri rokok kepada Negara, tidak berimbang dengan dampak negatifnya.

Sebuah data menyebutkan, perokok di seluruh dunia 47 persen pria dan 12 persen wanita dengan berbagai jenjang usia. Banyak kriteria perokok, seperti perokok sangat berat, sedang dan ringan. Perokok berat, bila 21-30 batang/hari, perokok sedang 11-21 batang/hari, perokok ringan, tidak lebih dari 10 batang per hari.

Berdasarkan data tahun 2004, Indonesia adalah Negara ke-6 penghasil tembakau dunia setelah China, Brazil, India, Amerika Serikat dan Turki. Tetapi sesungguhnya, penggunaan tembakau di Tanah Air telah menyebabkan 70 persen kematian akibat penyakit paru kronik dan emfisema. Data sensus nasional tahun 2001, menyebutkan tembakau menyebabkan lebih dari 5 juta kasus kesakitan dan 400 ribu di antaranya berakhir dengan kematian.

Organisasi kesehatan dunia (WHO) memperkirakan, tahun 2020 penyakit yang ditimbulkan bahaya tembakau/rokok akan menjadi masalah kesehatan utama terbesar dan menyebabkan 8,4 juta kematian setiap tahun. Diperkirakan separuh kematian tersebut akan terjadi di Asia karena tingginya peningkatan penggunaan tembakau.

Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin dan karbon monoksida. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, sehingga membuat darah tidak mampu mengikat oksigen.

#### Terus Meningkat

Bagi masyarakat Indonesia, merokok sudah menjadi bagian dari perilaku. Tiap tahun, konsumsi tembakau terus meningkat. Jika tahun 1970-an, hanya 33 miliar batang rokok per tahun, maka tahun 2006 menjadi 230 miliar batang rokok bahkan setelah tahun 2006 jumlahnya diperkirakan semakin meningkat. Itu artinya, anggota masyarakat Indonesia melakukan pembakaran uang lewat rokok sekitar Rp 90 triliun tiap tahun. Prevalensi merokok

di kalangan orang dewasa meningkat dari 26,9 persen tahun 1995 menjadi 35 persen pada tahun 2004. Tahun 2006, hasil survey the Jakarta Global Youth mengatakan lebih dari sepertiga pelajar (37,3%) merokok. Anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Lebih mengejutkan lagi, tiga di antara 10 pelajar atau sekitar 30,9 persen menyatakan kali pertama merokok pada usia di bawah 10 tahun.

Dari hasil penelitian, seorang anak yang sempat mencoba merokok, maka dalam waktu singkat akan terjadi ketergantungan dan tidak berdaya untuk melepaskan diri dari kecanduan. Banyaknya iklan-iklan rokok yang menyesatkan, semakin memperburuk situasi. Dalam arti, anak-anak pemula akan larut dalam iklan itu dan menjadi perokok aktif.

Pusat pengendalian Penyakit di Amerika Serikat menyatakan bahwa asap rokok mengandung sekitar 60 zat penyebab kanker. Berbagai gangguan kesehatan pada anak dapat dipicu oleh asap rokok. Kaum usia lanjut, penderita asma serta yang mengalami gangguan jantung juga sangat rentan terhadap asap rokok. Artinya, asap rokok yang diembuskan perokok (perokok aktif) juga bisa menimbulkan gangguan kesehatan kepada orang yang tidak perokok (perokok pasif).

Saatnya berhenti merokok, sebab merokok tidak hanya merugikan atau membahayakan diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda yang bisa saja itu anak, istri, suami, orangtua, mertua atau anggota keluarga lainnya. Sudah pasti, merokok adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mengorbankan uang, kesehatan, kehidupan sosial, pahala, persepsi positif dan lainnya lagi. Dengan kata lain, merokok sama halnya melakukan kegiatan untuk mengakhiri hidup secara pelan-pelan tapi pasti.

WHO menyebutkan, setiap satu jam tembakau rokok membunuh 560 orang di seluruh dunia. Kalau dihitung satu tahun, terdapat 4,9 juta kematian di dunia yang disebabkan tembakau rokok. Maka bersyukurlah Anda jika tidak merokok, karena Anda adalah yang pandai. Jika Anda mau dan serius, pasti Anda dapat berhenti merokok, sekalipun Anda sudah tergolong perokok sangat berat.

Ada sebuah anekdot: Sejumlah dokter ahli melakukan riset di beberapa rumah sakit besar terhadap pasien dewasa yang rawat inap. Hasilnya 90 persen pasien itu adalah yang tidak merokok. Karena diliputi keheranan, lalu dokter-dokter ahli itu berkumpul dan menganalisa hasil survey. Ternyata, para perokok, begitu terkena serangan penyakit, tidak dapat bertahan hingga ke rumah sakit, tapi langsung mati. Anda mau pilih yang mana.



**PEROKOK BERAT:** Lebih baik makanan dikurangi sedikit, daripada rokok tidak ada.

■ HS

# Keluar dari Jurang Depresi

**Kemampuan mengelola perasaan dapat menghindari Anda dari bahaya depresi. Depresi diketahui meningkatkan risiko demensia hingga 50%. Gangguan mental ini diperkirakan akan menjadi penyebab utama masalah penyakit dunia pada tahun 2020.**

**S**udah sebulan terakhir Anisa (44 tahun) tidak nafsu makan. Ia juga mengeluh susah tidur dan mudah jenuh. Anisa kehilangan gairah untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Wanita yang bekerja di sebuah salon itu pun tampak lebih banyak termenung dan tidak dapat berkonsentrasi saat melayani tamu salon. Dua minggu terakhir, ia pun tidak berangkat kerja seperti biasa, hanya berdiam diri di kamar kosnya yang sempit.

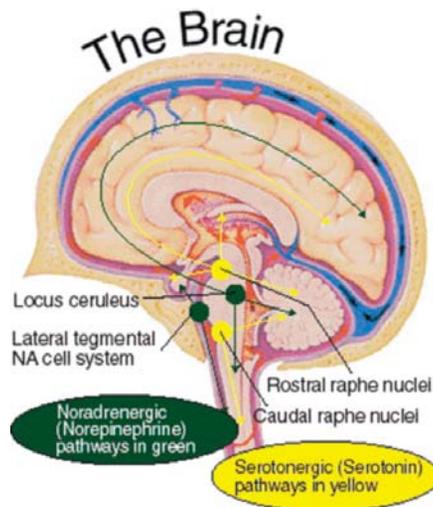
Untungnya, Yohana, salah seorang saudaranya, datang melihat keadaan Anisa. Tubuh Anisa lemah, pandangannya juga sesekali kosong. Saat ditanya apakah sudah makan, Anisa mengaku sudah beberapa hari tidak makan dan minum. “Kepalaku pusing sekali dan aku tidak bisa tidur,” keluhnya kepada Yohana.

Melihat kondisi demikian, Yohana segera mengambil tindakan. Dia membawa Anisa ke rumah sakit untuk dirawat. Tujuannya untuk memulihkan kondisi tubuhnya yang lemah dan kondisi kejiwaannya yang sakit. Dari keterangan Yohana diketahui bahwa Anisa baru mengalami perceraian dengan suaminya. Masalah itu membuat Anisa terus merasa bersalah dan menghakimi dirinya. Setelah berkonsultasi dengan dokter, Anisa diketahui mengalami depresi.

Gejala depresi di antaranya, kehilangan minat, merasa tidak berguna, merasa gagal, penyesalan yang berlebihan, putus asa, lebih banyak berdiam diri, dan tidak bergairah bekerja. Siapa saja dapat mengalaminya karena depresi tidak mengenal batas usia, jenis kelamin, kedudukan, suku, maupun ras.

Depresi merupakan gangguan mental yang paling banyak menimbulkan beban disabilitas (ketidakmampuan untuk terlibat dalam aktivitas penting). Semakin tinggi tingkat depresi seseorang, makin besar juga beban disabilitas yang dialaminya. Depresi dapat meningkatkan morbiditas (kesakitan), mortalitas (kematian), risiko bunuh diri, serta berdampak pada penurunan kualitas hidup pasien dan keluarga.

Berbagai penelitian menunjukkan, pa-



sien dengan gangguan depresi merasakan adanya keluhan fisik dan gangguan mental. Keluhan fisik pasien seperti malas makan dan susah tidur. Selain itu, depresi membuat daya tahan tubuh menurun. Akibatnya, berbagai jenis penyakit pun muncul. Penyakit fisik yang sering dialami penderita depresi adalah gangguan pencernaan (gastritis), gangguan pembuluh darah, asma, dan konstipasi (sembelit).

Menurut Dr. Metta Desvini, Sp. KJ, depresi itu muncul akibat ketidakseimbangan neurotransmitter (zat penghantar dalam sistem syaraf) seperti serotonin (neurotransmitter yang mengatur perasaan), norepinefrin (neurotransmitter yang mengatur energi interest), dan dopamine (neurotransmitter yang mengatur minat) di berbagai bagian otak.

Dokter yang merawat Anisa di rumah sakit ini dengan sabar mendengarkan Anisa curhat dan memberikan saran dalam mengatasi masalah. “Tak semudah membalik telapak tangan memang, tapi kamu dapat mengikisnya sedikit demi sedikit. Diskusikan dengan keluarga besarmu langkah selanjutnya yang harus ditempuh,” kata Dr. Metta bijak.

Pada kasus Anisa ini, karena sudah komplikasi maka penyakit fisik yang menyertai depresi juga harus diatasi.



**TATAPAN KOSONG:** Depresi merupakan gangguan me 2020.

Demikian juga dengan depresinya. Ia juga dirawat oleh dokter spesialis penyakit dalam. Dr. Lukman Ali Husin, SpPD memberikan obat-obatan agar Anisa kembali nafsu makan dan dapat tidur. Ini penting mengingat sejak sakit, Anisa jarang makan yang menyebabkan berat badannya turun drastis.

Faktor-faktor penyebab depresi sangat beragam, antara lain genetik (keturunan), biologis, kepribadian, dan psikososial. Sebuah studi menunjukkan, anak kandung dari orangtua yang menderita depresi berisiko lebih tinggi mengalami depresi walaupun diasuh oleh orangtua angkat yang tidak depresi. Besarnya risiko berkisar 50 persen sampai 75 persen. Oleh karena itu, deteksi dini pada anak sangat diperlukan.

Secara biologis, konsumsi berbagai zat kimia seperti alkohol dan obat-obatan juga bisa menimbulkan gejala depresi, apalagi bila penggunaan alkohol tersebut sudah dalam tahap kecanduan. Kepribadian paranoid dan pesimis sangat rentan mengalami depresi daripada mereka yang memiliki tipe kepribadian lain. Masalah psikososial juga dapat memicu timbulnya depresi, seperti kehilangan anggota keluarga, putus dengan pacar, kehilangan pekerjaan, tekanan lingkungan, terkena bencana alam, beratnya beban hidup, dan lain sebagainya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan, depresi akan menjadi penyebab utama masalah penyakit dunia pada tahun 2020. Saat ini, tercatat 121 juta



ental. WHO memperkirakan depresi akan menjadi penyebab utama masalah kematian dunia pada tahun

penderita depresi di dunia. Dari jumlah itu 5,8 persen laki-laki dan 9,5 persen perempuan. Namun, hanya sekitar 30 persen penderita depresi yang mendapatkan pengobatan yang cukup, sekalipun telah tersedia pengobatan depresi yang efektif. Ironisnya, mereka yang menderita depresi berada dalam usia produktif, yakni pada usia kurang dari 45 tahun.

“Tidak semua depresi harus diobati karena ada depresi yang sembuh tanpa diterapi terutama kasus depresi ringan. Artinya, depresi hilang seiring dengan perjalanan waktu. Tetapi untuk kasus depresi yang tidak bisa sembuh sendiri, diperlukan terapi. Lamanya terapi sangat bervariasi. Ada yang hanya hitungan minggu, bahkan ada yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk proses penyembuhan,” jelas Dr. Metta yang sehari-harinya praktek di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur.

Terapi depresi terdiri dari konseling, psikoterapi dan terapi farmakologi (dengan pemakaian obat antidepresan),

dukungan kelompok, serta terapi kognitif. Terkadang, para penderita depresi memerlukan rawat inap di rumah sakit. Rawat inap dilakukan pada pasien yang kurang mendapat dukungan dari lingkungan, walaupun derajat depresi yang dialaminya tergolong ringan.

Konseling yang dilakukan antara psikiater dan pasien merupakan langkah awal untuk mencari akar permasalahan dalam diri pasien. Hal ini penting sebelum diberi pengobatan kejiwaan yang lain. Psikiater tak hanya mendengar tetapi juga memberikan masukan, nasehat sebagai upaya membantu pasien memecahkan masalah.

Obat yang umumnya diberikan pada penderita depresi adalah antidepresan golongan serotonin norepinefrin reuptake inhibitor (SNRI). Cara kerja obat ini menghambat reuptake/pengambilan serotonin dan norepinefrin. Penelitian oleh Wyeth Pharmaceutical menunjukkan, golongan obat SNRI dapat memper-tahankan keseimbangan sejumlah zat kimia dalam otak yakni serotonin dan

norepinefrin, sehingga mencegah kekambuhan dan dan berulangnya depresi. Obat ini juga bekerja dengan cepat. Dengan dosis sekali sehari, efeknya telah dapat dirasakan oleh pasien setelah empat hari penggunaan.

Tujuan terapi depresi adalah meningkatkan kualitas hidup pasien, mengurangi atau menghilangkan gejala, mengembalikan peran dan fungsi dalam keluarga dan masyarakat, mengurangi risiko kekambuhan, serta mengurangi risiko kecacatan atau kematian.

Keberhasilan terapi didukung oleh pasien, dokter, obat, dan masyarakat. Kendala pada pasien biasanya berupa ketidakpatuhan mengonsumsi obat. Dokter yang kurang mengenali gejala depresi juga bisa memberi pengaruh yang tidak baik pada hasil terapi. Masalah pada obat biasanya menyangkut efektivitas, efek samping, kemudahan, dan harga obat. Sedangkan pada masyarakat atau lingkungan adalah karena mitos, kepercayaan, dan stigma bahwa depresi identik dengan sakit jiwa.

Seperti yang dirilis *Jurnal Neurologi* pada Juli 2010, depresi diketahui meningkatkan risiko demensia (alzheimer akut) hingga 50%. Penderitanya menjadi mudah lupa/pikun. Menurut Robert Wilson, psikolog dan ahli saraf dari pusat kesehatan Rush University di Chicago, depresi dapat mengubah kondisi otak secara mendasar. Seperti diketahui, otak merupakan pusat perasaan, emosi, dan pikiran.

Penelitian yang melibatkan orang-orang dewasa-tua di sebelah selatan Chicago ini dipantau selama tiga tahun. Hasilnya 350 orang menderita demensia, yang sebagian besar disebabkan depresi. “Depresi mengasosiasikan beberapa perubahan struktur otak. Akibatnya, depresi membuat seseorang lebih rentan terkena demensia ketika ia sudah tua,” jelas Wilson.

Oleh karena itu, kemampuan mengelola perasaan perlu diasah agar tidak mudah mengalami depresi. Seseorang dengan daya tahan mental tinggi kurang memiliki risiko untuk menderita depresi. Jagalah kondisi fisik Anda agar tetap sehat karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, serta mendalami ajaran agama yang berperan menimbulkan rasa damai. ■ DGR

Kenali gejala depresi sejak awal dan berusaha untuk menolong diri Anda sendiri. Anda dapat mencoba langkah-langkah berikut :

1. Bersikap realistis, jangan terlalu idealis.
2. Bila tugas atau pekerjaan yang menggantung, bagilah tugas-tugas itu dan buat prioritas. Lakukan tugas yang memang bisa Anda kerjakan.

3. Jangan memendam sendiri masalah Anda atau hanyut dengan perasaan sedih Anda.
4. Cobalah curhat pada orang yang Anda percayai. Hal ini akan membuat perasaan lebih nyaman dan ringan.
5. Ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang bisa membuat hati Anda senang, misal berolahraga, nonton film, atau ikut dalam

aktivitas sosial.

6. Berusahalah untuk selalu berpikir positif.
7. Jangan ragu dan malu untuk meminta bantuan pada keluarga atau teman-teman saat merasa cemas, stres.
8. Periksa diri ke psikiater untuk mendapat terapi lebih lanjut agar tidak jatuh ke dalam jurang depresi.



Drs.H.Hamim Mulyana, M.Si, Sekda Purwakarta.

## Bersihkan Purwakarta dari Pejabat Arogan

**Semua pegawai harus melayani dengan baik dan menjadi suri teladan. Termasuk kepada wartawan, harus diberi ruang dan waktu untuk melaksanakan tugasnya.**

Sudah menjadi komitmen Pemda Purwakarta akan merespon dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat tentang adanya pelayanan dan perilaku buruk pegawai jajaran birokrasi. "Jika ketahuan terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang dilakukan seseorang pegawai, sekda akan segera mengklarifikasi, jika terbukti seorang pejabat berbuat tidak baik dalam melaksanakan tugas, akan diserahkan ke dewan kehormatan kepangkatan pegawai untuk dikaji dan dinilai sanksi yang akan dijatuhkan," demikian disampaikan Drs. H. Hamim Mulyana, M.Si, Sekda Purwakarta kepada wartawan *Berita Indonesia* ketika berbincang di ruang kerjanya perihal maraknya tindakan arogansi pejabat dalam pelayanan publik akhir-akhir ini. Menurutnya, semua pegawai di bawahnya harus melayani dengan baik dan menjadi suri teladan. Termasuk kepada wartawan, harus diberi ruang dan waktu untuk melaksanakan tugasnya.

Akhir-akhir ini, arogansi pejabat terhadap masyarakat, LSM, maupun wartawan sering terjadi di lingkungan Pemkab Purwakarta. Pada bulan Juni 2010 lalu misalnya, seorang kepala bidang di Inspektorat berlaku arogan kepada wartawan *Jatiluhur TV* dengan ucapan dan ancaman ketika mengkonfirmasi tentang

buruknya penanganan listrik masuk desa di salah satu dusun di daerah itu. Pejabat tersebut mungkin merasa tidak senang saat wartawan melontarkan pertanyaan kritis yang bersifat kontrol sosial. Pada puncaknya, 51 orang wartawan yang tergabung dalam PWI Purwakarta bersama beberapa LSM meminta klarifikasi dan pertanggung jawaban pejabat bersangkutan hingga mendapat penanganan pihak Pemda.

Pada 14 Juli 2010 wartawan *Berita Indonesia* ini juga mendapat perlakuan buruk dari Kabid Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi saat wawancara seputar syarat-syarat kerja perusahaan. Dimana dalam proses perizinannya ada indikasi mengalirnya uang siluman yang membebankan pihak pengusaha. Satu contoh, dalam proses penerimaan tenaga kontrak di perusahaan yang berada di wilayah Kab Purwakarta, ada indikasi perusahaan harus membayar uang siluman lebih dulu kepada oknum tertentu sebesar Rp 25.000 kali jumlah tenaga kontrak yang diterima, agar izin dikeluarkan Disnakertrans. Jika bayaran itu dikabulkan, imbalan bagi perusahaan sudah barang tentu ada pengurangan syarat-syarat yang harus dilaksanakan perusahaan, yang pada akhirnya akan merugikan tenaga kerja yang diterima.

Contoh lainnya, tentang KKB yang disetujui Disnakertrans yang mengatur kode etik sekitar 400 perusahaan serta 60 ribu orang karyawan. Kenyataan, lebih memihak kepada perusahaan dan merugikan karyawan. Seperti KKB di PT Dada Indonesia, -perusahaan garment yang mempekerjakan sekitar 7.000 perempuan disetujui Kadisnakertrans tertanggal 16 Februari 2010, dalam BAB XII Pasal 59 tentang pemberian uang jasa atau penghargaan bagi karyawan yang mengundurkan diri diatur sbb; diberi uang pisah bagi yang bekerja 3 tahun kurang dari 6 tahun sebesar Rp 385 000. Dibandingkan dengan UU NO 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Kepmenakertrans Nomor Kep 48/MEN/IV/2004 tentang PKB, di sana tidak ditemukan angka Rp 385 000. Yang tertulis adalah, bagi yang bekerja 3 tahun kurang dari 6 tahun, berhak mendapat 1 bulan gaji pokok.

Mencoba membandingkan kedua ketentuan di atas. Upah dari karyawan rendah hingga tingkat manajer jelas berbeda-beda. Namun dalam KKB disebutkan mendapat uang pisah yang sama. Tentu ini jelas tidak profesional dan sarat indikasi kolusi dengan pejabat pemberi izin. Menyikapi berbagai persoalan itulah hingga salah seorang Kabid Disnakertrans Purwakarta mengucapkan kata tidak senonoh kepada wartawan, keluar dari topik wawancara.

Berusaha mengayomi bawahannya, Sekda Drs H Hamim Mulyana M.Si menyampaikan minta maaf atas sikap bawahannya dan berjanji akan mengoreksi secara menyeluruh aparat birokrasi di bawahnya. Kepada wartawan, dia mengharapkan agar terus bekerja secara profesional. Dia menjamin, wartawan profesional akan selamanya mendapat atensi positif dari pemerintah daerah.

Titov Firman, SH, Plt Kadisnakertrans juga menyampaikan meminta maaf karena secara utuh masih mendalami tugas bidang tenaga kerja, sementara secara teknis bawahannya memahami apa yang terjadi di lapangan. Dengan alasan itulah penjelasan itu diserahkan ke bawahannya, namun sebagai pejabat baru di lingkungan tenaga kerja, sangat menerima masukan maupun laporan yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam membangun tatanan hubungan kerja industrial yang semakin baik di Kabupaten Purwakarta.

Sementara Staf ahli bidang pemerintahan Drs Idar PK, M.M mengatakan, bukan zamannya lagi pegawai mengandalkan power, kekuasaan, kekerasan maupun pelecehan. Hal-hal seperti itu menurutnya harus dilaporkan dan disidik karena dalam UU Transparansi, seorang birokrasi harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tugas dengan baik. ■ BND/AMIR

# Menjamu Benua, Menyongsong Erau 2010

**S**etelah Beluluh dilakukan terhadap Sultan Kutai dan Putra Mahkota menjelang pelaksanaan pesta adat Erau, seperti biasanya, digelar satu ritual lagi oleh pihak Kesultanan Kutai, yakni upacara adat yang dinamakan Menjamu Benua. Kali ini, upacara Menjamu Benua digelar di tiga tempat di wilayah kota Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kaltim, yaitu satu, di Kepala Benua yang berada di ujung Kelurahan Mangkurawang. Kedua, di Tengah Benua yang berada di Kelurahan Panji, tepatnya di dermaga depan Museum Mulawarman, dan terakhir atau ketiga di Buntut Benua yang berada di Kelurahan Timbau, -sekitar 200 meter dari Jembatan Kartanegara.

Untuk memulai upacara Menjamu Benua, para pelaksana upacara yang terdiri dari 7 orang Belian dan 7 orang Dewa meminta restu kepada Sultan Kutai H Adji Mohd Salehoeddin II di rumah kediamannya. Sultan juga menyerahkan pakaian sehari-harinya berupa selembur baju, sepotong celana panjang, selembur sarung dan sebuah kopiah. Kemudian barang-barang itu dibawa dan disertakan dalam upacara Menjamu Benua. Dalam upacara Menjamu Benua, turut pula disajikan aneka penganan khas Kutai.

Rombongan Belian dan Dewa kemu-



Salah satu adegan dalam pesta adat Erau.

dian berangkat menuju Kepala Benua untuk memulai ritual. Selanjutnya, pakaian sehari-hari Sultan Kutai yang telah diserahkan sebelumnya kemudian diletakkan di atas sebuah anca bambu bersama sejumlah sesaji yang terdiri dari satu potong ketan ukuran besar, satu potong ketan hitam ukuran kecil, 7 buah ketan berikut telur rebus, 7 macam kue khas

Kutai, satu ayam panggang dan seekor ayam hidup. Tujuan dari upacara adat Menjamu Benua ini menurut Koordinator Seksi Sakral Kesultanan Kutai, Awang Imaluddin, adalah untuk memberitahukan kepada makhluk gaib dan memohon kepada Tuhan agar diberikan keselamatan serta kelancaran selama berlangsungnya pesta adat Erau pada Minggu (11/7).



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

*Mengucapkan Selamat*

**HARI JADI PURWAKARTA KE-179**

(20 Juli 1831 - 20 Juli 2010)

Dan

**HARI JADI KABUPATEN PURWAKARTA KE-42**

(12 Juli 1968 - 12 Juli 2010)

*MEGEUHKUN JALAN KA CAI,  
NYAANGAN POEKNA PEUTING  
"DIGJAYA PURWAKARTA"*

**H.DEDI MULYADISH**  
BUPATI PURWAKARTA

**Drs. H. DUDUNG B. SUPARDI, MM**  
WAKIL BUPATI PURWAKARTA

**Drs.H.HAMIM MULYANA, MSi**  
SEKRETARIS DAERAH



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

*Mengucapkan Selamat*

**HARI JADI PURWAKARTA KE-179**

(20 Juli 1831 - 20 Juli 2010)

Dan

**HARI JADI KABUPATEN PURWAKARTA KE-42**

(12 Juli 1968 - 12 Juli 2010)

*SEMOGA PEMBANGUNAN PURWAKARTA  
BERKARAKTER SEGERA TERWUJUD  
"DIGJAYA PURWAKARTA"*

Ketua  
**UCOK UJANG WARDI**

Wakil Ketua  
**R.DEDDY HERAWAN, S.SAp**

Wakil Ketua  
**HASANUDIN, S.Sos**

Wakil Ketua  
**DADANG BURHANUDIN**

Sekretaris  
**Drs.M.SYACHRUL KOSWARA, MM**



Sebuah pesawat komersial di Bandara Juwata Tarakan.

## Naik Pesawat Murah

Setelah Bandara Juwata Tarakan dapat didarati pesawat berbadan besar, harga tiket turun drastis. Tahun depan, ditargetkan bakal mampu melayani kargo internasional.

**W**ajah Nai Josua Tampubolon tampak sumringah, satu hari bulan Juni 2010 lalu. Ia baru saja pulang dari agen perjalanan untuk membeli tiket pesawat bagi dia dan putranya yang baru berusia enam bulan. Perempuan beranak satu yang ikut suaminya yang bekerja di sebuah perkebunan kelapa sawit di Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur ini memang mau berangkat ke Medan. “Saya tak menyangka harga tiket pesawat terbang semurah ini sekarang. Jauh lebih murah dari tahun lalu,” ujarnya membandingkan. “Padahal saat-saat liburan sekolah seperti sekarang, biasanya harga tiket pesawat dari dan ke Tarakan bisa melonjak dua sampai tiga kali lipat,” lanjut wanita kelahirannya Duri, Riau, 24 tahun silam ini.

Apa yang dikatakan Nai Josua itu memang benar. Tapi, itu beberapa waktu lalu. Setelah panjang landasan pacu (*runway*) Bandara Juwata Tarakan ditingkatkan dari 1.850 meter menjadi 2.500 meter, perubahan jumlah penerbangan pun terjadi ke kota terbesar di wilayah perbatasan Malaysia ini.

“Bandara Juwata Tarakan sekarang sudah mampu didarati pesawat berbadan besar dan lebar, seperti Boeing 737 seri 900 atau Airbus seri A330. Kalau sebelumnya kita hanya melayani pesawat kecil

dengan jumlah *seat* (tempat duduk) terbatas. Sekarang kita mampu melayani pesawat besar dengan jumlah penumpang lebih banyak,” kata Husni Djau, Kepala Bandara Tarakan dalam jumpa pers di depan 32 orang wartawan lokal dan pusat, Selasa 29 Juni 2010.

Terkait harga tiket, tingginya harga tiket selama ini menurut Husni, dipicu terbatasnya pesawat. Tapi, setelah pesawat berbadan besar yang mampu mengangkut penumpang lebih banyak dapat mendarat di Tarakan, kondisinya berbalik. “Sebagai bukti, pesawat berbadan besar seperti Lion Air Seri 737 900ER sudah melakukan penerbangan perdana Jakarta – Balikpapan – Tarakan, Mei lalu,” ujarnya.

Bahkan, mantan Kabandara Djalaludin Gorontalo, Sulawesi ini berani menargetkan, pada tahun 2012 nanti wajah Bandara peninggalan *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)*, -perusahaan tambang minyak di Tarakan, sebelum Pertamina ini akan berubah total. “Kita siap melayani kargo internasional. Kita juga akan membangun tower, gedung radar, gedung operasional, dan fasilitas lainnya. Lahannya sudah dipersiapkan,” kata Husni Djau. Tentu, tidak itu saja. Pembangunan terminal seluas 900 ribu M2, sekarang terus dikerjakan.

Hingga kini, keberadaan Bandara Ju-

wata Tarakan di Wilayah Utara Kalimantan Timur, jika dibandingkan dengan bandara Tawau, Sabah Malaysia Timur, yang dapat ditempuh hanya dengan waktu 20 menit dari Tarakan, masih jauh ketinggalan. Padahal, Tawau, hanya setingkat kota Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember Jawa Timur. Itu sebabnya, jika rencana pengembangan Bandara Juwata dapat terealisasi, Husni Djau optimis roda perekonomian di daerah ini akan berputar lebih cepat.

Memang, tidak mengherankan bila Bandar Tawau dipilih oleh masyarakat di wilayah Utara Kaltim jadi bandara keberangkatan ke luar negeri. Sebab ongkos pesawat jauh lebih murah dari Tawau ketimbang melalui Balikpapan atau Surabaya, sebagaimana dikatakan beberapa warga Tanjung Selor, Bulungan yang berangkat ke daratan China, kepada wartawan *Berita Indonesia*, SL Pohan, di Tarakan.

Berdasarkan penelusuran *Berita Indonesia*, harga tiket pesawat dari Tawau memang jauh lebih murah, dan ditunjang pelayanan serta kenyamanan bepergian. Itu sebabnya, masyarakat berharap Bandara Juwata Tarakan dapat membuka kembali jalur penerbangan Tarakan – Tawau. Namun, seperti diungkapkan suami dari Hj Muly Kuku ini, kepastiannya masih menunggu kabar dari Kuala Lumpur.

Hingga sekarang, pihak Bandara Juwata Tarakan sendiri, belum memperoleh kabar. Padahal, pihak perwakilan penerbangan Malaysia Airline System (MAS) wings di Jakarta sudah melakukan penajakan. Hasilnya pun sudah dilaporkan ke MASwings di Kuala Lumpur. Tapi, untuk mengetahui kepastian apakah MASwings tersebut membuka jalur penerbangan Internasional Tarakan Indonesia – Tawau Malaysia, nampaknya masih panjang.

Makanya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian mendesak, pihak Bandara Juwata Tarakan sendiri menawarkan kepada perusahaan penerbangan yang menggunakan pesawat ATR 72 di Kaltim. Tersebutlah seperti Kalstar, Trigana, dan Lion Air. Namun, sepertinya ada kekhawatiran perusahaan penerbangan lokal ini melayani Tarakan-Tawau jika nantinya bersaing dengan perusahaan MASwing yang memiliki pesawat baru, tiket murah, dan dengan pelayanannya yang terjamin pula.

Sementara Husni Djau sendiri bersama Kepala Perwakilan Kantor MASwing di Tarakan belum lama ini sudah berangkat ke Tawau untuk menanyakan keseriusan penerbangan milik Malaysia itu terbang ke Tarakan. “Kita sudah memperoleh lampu hijau dari perusahaan tersebut. Makanya kami mendesak percepatan surat ijinnya,” katanya. Ia berharap, realisasinya bisa dalam waktu dekat.

■ SLP



Ramli Simanullang SH (kiri) dan kepala sekolah SMA N 2 Bapak Gordon Simarmata S.Pd

## Berprestasi di Tengah Kesederhanaan

Dengan sarana dan prasarana pendidikan yang sangat sederhana, SMA N 2 Dolok Sanggul raih juara II dan III olimpiade tingkat Provinsi Sumatera Utara di bidang biologi, TIK, dan fisika.

**M**inimnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan ternyata tidak selalu membuat sebuah sekolah menjadi minim prestasi. Dengan semangat belajar dan mengajar yang tinggi, kekurangan tersebut ternyata bisa sedikit tertutupi. Seperti diperlihatkan SMA Negeri 2 Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumut. Dengan semangat belajar dan mengajar yang cukup tinggi, sekolah yang hanya dilengkapi fasilitas sangat terbatas ini mampu meraih prestasi yang cukup membanggakan.

Seperti sudah dilaporkan majalah ini edisi sebelumnya, SMA yang baru berdiri beberapa tahun ini berhasil meraih juara I se Kabupaten Humbahas di bidang mata pelajaran teknologi informatika komunikasi

(TIK), fisika, dan biologi. Dan yang terbaru, juga meraih juara I di bidang olah raga dan desain. Bahkan di olimpiade se Provinsi Sumatera Utara pada bulan Juni lalu, sekolah yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Gordon Simarmata S.Pd ini bisa meraih juara II dan III di bidang biologi, TIK, dan fisika.

Menanggapi prestasi tersebut, Simarmata kepada wartawan *Berita Indonesia* Parasian Manalu mengaku hal itu tidak lepas dari tingginya semangat siswa siswinya, pengorbanan para staf pengajar, serta besarnya dukungan dari Komite Sekolah.

Tapi di tengah kebanggaan atas prestasi tersebut, Simarmata sangat menyayangkan kurangnya fasilitas di sekolah tersebut. Seperti disaksikan *Berita Indonesia*, ruang kelas di sekolah ini baru ada 4 ruangan. Meja belajar masih seadanya,

papan tulis yang tanpa meja, kursi dari plastik, serta sarana dan prasarana penunjang pendidikan minim lainnya.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Simarmata memang mengaku sudah mengajukan permohonan pengadaan mobiler sekolah ke Dinas Pendidikan Humbahas agar dapat dianggarkan dalam tahun ini.

Sementara itu, Ramli Simanullang, SH sebagai Ketua Komite sekolah ini menyebutkan, permohonan mobiler sekolah tersebut sudah diterima oleh dinas terkait. Dan menurut konfirmasi yang Ramli dapat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbahas, Drs. Pensus Sihombing, mobiler tersebut rencananya akan dialokasikan pada bulan September tahun ini. Dengan prestasi SMAN 2 ini, Pensus Sihombing yang memang sangat peduli pada dunia pendidikan itu mengaku merasa terpacu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Humbahas.

Kini, realisasi dari mobiler sekolah itu sangat ditunggu masyarakat, khususnya oleh pelajar SMAN 2. Kelak dengan ditingkatkannya fasilitas sekolah ini, mereka optimis prestasi yang semakin baik juga akan mereka raih. "Kami sangat bangga sekolah di sini. Kami sangat senang kalau pemerintah hendak membantu sekolah kami ini," kata para siswa berharap. ■ PM

## Pasangan Gagah-Derry Diperiksa Panwaslukada

Dituding memalsukan dukungan warga, bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Depok, Jawa Barat, Gagah Sunu Soemantri dan Derry Drajat harus berurusan dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Depok, Rabu (7/7/2010).. Tuduhan itu didasari atas laporan Asti Ediawan yang merasa namanya dicatut serta tanda tangannya dipalsukan. Asti yang wartawan harian media lokal *Monitor Depok* ini memprotes penggunaan KTP-nya dalam berkas dukungan, karena ia merasa tak pernah memberikan dukungan dimaksud.

Seperti diberitakan, pasangan Gagah dan Derry ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Depok periode 2011-2016, dari jalur independen. Untuk itu, mereka telah menyerahkan berkas dukungan ke KPU Depok, Kamis (24/6). Sebagai persyaratan calon independen, pasangan calon minimal harus mengumpulkan dukungan sebanyak 45.319 orang. Gagah dan Derry sendiri sebenarnya sudah mengumpulkan dukungan 52.108 orang, namun yang diakui oleh KPU Kota Depok hanya 41.907. Dengan begitu, mereka masih kekurangan

dukungan 3.412 suara lagi. Untuk menambah jumlah dukungan tersebut, KPU Depok masih memberikan waktu hingga 5 - 18 Agustus 2010 kepada pasangan ini.

Kembali terkait kasus KTP dan tanda tangan yang diduga palsu, pasangan ini mengaku belum bisa memastikan siapa pihak yang bisa disalahkan. Sebab, pengumpulan tanda tangan itu menurut mereka, dilakukan oleh para relawan, sehingga mereka tidak bisa melakukan pengontrolan satu per satu.

■ BI

# Palembang Juara Umum Popda XI Sumsel

**K**ota Palembang tampil sebagai juara umum pada Pekan Olahraga Daerah (Popda) XI Sumatera Selatan yang berlangsung sejak 26 Juli - 2 Agustus lalu. Menggeser Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sebagai juara bertahan. Popda XI yang diikuti 1.249 atlet dari 14 kab/kota se-Sumsel (minus OKU Selatan) ini memperebutkan 458 medali dari 12 cabang olahraga yakni: Atletik, basket, bulutangkis, panahan, silat, renang, sepakbola, sepak takraw, senam, tenis, tenis meja, dan voli.

Sukses kontingen Palembang sebagai juara umum semakin lengkap karena dari cabang sepakbola, mereka juga berhasil meraih emas setelah mengalahkan kesebelasan Kabupaten Muba lewat adu penalti (4-3) di Stadion Bumi Sriwijaya (2/8/2010). Dengan kemenangan itu, atlet Palembang menunjukkan dominasi pada Popda dengan total perolehan medali: 46 emas, 38 perak, dan 39 perunggu. Sedangkan Kabupaten Muba berada di posisi ke-



Wagub Sumsel Eddy Yusuf mengalungkan medali emas pada kesebelasan Palembang.

dua dengan 42 emas, 30 perak, dan 22 perunggu. Di tempat ketiga, diraih OKU Timur dengan 14 emas, 15 perak, dan 22 perunggu.

Secara keseluruhan, Popda XI Sumsel berlangsung baik. Acara penutupan dimeiahkan atraksi band sekolah SD Negeri 220 Palembang, SD Negeri 2 Sukajadi Banyuasin, SD Negeri Kenten Laut, dan SMP Negeri 51 Palembang yang sangat menghibur 2.000 penonton yang hadir dalam acara penutupan tersebut.

## 226 Anak Ikut Festival PAUD

Anak sebagai aset berharga bagi keberlangsungan bangsa telah memotivasi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar Festival Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Musi Banyuasin 2010 pada 29 Juli 2010. Melalui acara ini, PAUD diharapkan dapat menjadi bagian dari proses untuk mencetak generasi penerus yang cerdas, tangguh dan berwawasan luas. Menurut Ketua Pelaksana Kegiatan yang juga Kepala Dinas Pendidikan Nasional Muba, H Apriadi, festival ini diikuti 226 anak pendidikan usia dini dari 11 kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan pelantikan pengurus HIMPAUDI (Himpunan Pengasuh Anak Usia Dini) Kabupaten Muba periode 2010-2014 oleh Bupati selaku pembina HIMPAUDI Kabupaten Muba. Juga serah terima gedung PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Muba kepada Ketua HIMPAUDI Muba yang diwakili Ketua Dharma Wanita Kabupaten Muba.

Sementara itu Bupati Musi Banyuasin, H. Fahri Azhari, ST menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini dan berjanji akan mengagendakan acara tersebut setiap tahunnya.

## TURUT BERDUKA CITA

Atas meninggalnya:

### Zulkarnain, SE

(Putra Wakil Bupati Banyuasin, Drs. A Rahman Hasan)

Pada tanggal 4 Agustus 2010

Pukul 05.00 WIB

*Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah SWT*

dari:

**Pemerintah Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur**

Bupati

**H. Herman Deru, SH**

Wakil Bupati

**H.M. Cholik, MD**

**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  
Kabupaten Banyuasin**

**Ir. H. Firmansyah**

Kepala Dinas

**Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya  
Kabupaten Banyuasin**

**Ir. Zulkarnain**

Kepala Dinas



**PALANG PINTU:** Sebuah tata cara pernikahan adat Betawi yang hampir punah dihidupkan kembali.

# Menjaga Budaya Betawi dari Globalisasi

**Beberapa upaya pelestarian budaya Betawi terus dilakukan Pemerintah, seperti membuka cagar budaya, Festival Palang Pintu, dan pendaftaran budaya Betawi sebagai budaya warisan dunia.**

**E**ra tahun 80 hingga 90-an warga Jabodetabek, khususnya warga Ibukota Jakarta, mungkin tidak ada yang tidak mengetahui seni budaya ondel-ondel dan lenong sebagai seni budaya leluhur Betawi, suku bangsa penduduk asli Ibukota Jakarta. Namun sebaliknya, di era millenium ketiga ini, mungkin hanya tinggal sedikit orang yang mengenal dan mengetahui soal seni tersebut. Demikian juga halnya dengan budaya Betawi lainnya, kini banyak yang hampir punah seiring perkembangan zaman.

Sebagai ibukota negara, Jakarta yang menjadi pusat perkembangan modernisasi, pusat pembauran sekaligus menjadi pusat perubahan, memang mendapat tantangan ekstra besar dalam pelestarian budaya ini. Seperti dikatakan Ketua III Badan Musyawarah Betawi DKI, Beky Mardani, pelestarian kebudayaan Betawi merupakan permasalahan yang cukup kompleks. Karena, tantangan yang dihadapi bukan hanya pengaruh budaya nasional tapi juga internasional.

Seperi disebutkan di atas, di samping sudah bergeser dari fungsi awal, semakin banyak kebudayaan Betawi yang tidak dapat dinikmati masyarakat saat ini. Seni pertunjukan ondel-ondel misalnya, seni dengan boneka besar setinggi dua meter

lebih ini sebenarnya awalnya difungsikan sebagai penolak bala atau gangguan roh halus yang gantayangan. Belakangan, ondel-ondel biasa digunakan untuk menambah semarak pesta-pesta rakyat seperti peresmian gedung baru atau untuk penyambutan tamu terhormat. Kini, seni ini bahkan semakin jarang digelar walau pada pesta rakyat sekalipun.

Seni pertunjukan khas Betawi lain yang dulu sangat terkenal namun kini hanya sesekali ditampilkan adalah Lenong. Lenong merupakan teater tradisional Betawi yang diiringi musik gambang kromong, musik khas Betawi. Lakon atau skenario lenong umumnya mengandung pesan moral, seperti menolong yang lemah, membenci kerakusan dan perbuatan tercela.

Pada mulanya, kesenian ini dipertunjukkan dengan mengamen dari kampung ke kampung. Pertunjukan diadakan di lapangan terbuka tanpa panggung. Ketika pertunjukan berlangsung, salah seorang aktor atau aktris mengitari penonton sambil meminta sumbangan secara sukarela. Dalam perkembangannya, lenong mulai dipertunjukkan atas permintaan pelanggan dalam acara-acara di panggung hajatan seperti resepsi pernikahan. Di awal kemerdekaan, teater rakyat ini pun menjadi tontonan panggung. Namun seperti seni budaya lainnya, lenong kini

sudah semakin jarang digelar.

Sebagai suku yang terbuka, beberapa budaya Betawi juga dipengaruhi budaya luar. Musik Betawi misalnya, sudah dipengaruhi budaya Tionghoa. Hal tersebut dapat ditemukan pada penggunaan alat musik khas Tionghoa seperti *tehyang*, *kongahyang*, dan *sukong*.

Tidak hanya seni budaya musik dan tari yang terancam tergerus akibat arus globalisasi. Tapi juga budaya lain seperti pertanian, arsitektur, serta tata cara pernikahan yang disebut Palang Pintu. Kawasan Condet misalnya, daerah yang dahulu dikenal sebagai penghasil salak dan duku, serta wilayah pemelihara terakhir bangunan khas Betawi, kini kondisinya terabaikan. Budaya Palang Pintu juga sedikit banyak telah mengalami pengerusan.

Pemprov DKI Jakarta sendiri sebenarnya telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah menetapkan Festival Palang Pintu sebagai festival tahunan yang dilaksanakan di Jalan Kemang Raya. Selain itu, belum lama ini cagar budaya Betawi juga dibuka di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di objek wisata yang bersetting perkampungan Betawi itu, segala macam hal yang identik dengan kebudayaan Betawi, mulai dari seni pertunjukkan seperti tari topeng dan Lenong, adat pernikahan, beragam panganan khas seperti kerak telur, bir pletok serta Roti Buaya yang sering dijadikan hantaran dalam upacara pernikahan, juga dapat ditemui di sini.

Tak ketinggalan seni bela diri, silat Betawi juga ditampilkan di tempat ini. Dalam rangka memperkenalkan kesenian Betawi pada generasi muda, kursus tari tradisional Betawi juga diadakan di sana. Dan untuk program berkelanjutan, pemerintah DKI juga akan memasukkan seni budaya Betawi ke dalam kurikulum sekolah.

Baru-baru ini, upaya melestarikan seni budaya Betawi juga dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dengan usaha mematenkan seni budaya Betawi sebagai warisan budaya negara Indonesia, khususnya kota Jakarta. Sebagai langkah awal, Pemprov DKI telah mendaftarkan seni tari Lenong Betawi kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu warisan tak benda yang diakui secara internasional. Setelah lulus seleksi nasional, kemudian akan diajukan menjadi salah satu kebudayaan yang akan didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda pada United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Selain tari Lenong, tari topeng Betawi juga ikut didaftarkan. Tetapi karena tari topeng juga didaftarkan oleh provinsi lain, maka tari itu didaftarkan menjadi tari topeng nasional, bergabung dengan tari topeng dari daerah lainnya. ■ **MRA**



**JUARA BARU:** Tim Spanyol sedang merayakan pesta kemenangan juara piala dunia.

# Spanyol Menoreh Sejarah

**Untuk pertama kalinya, Spanyol berhasil mengangkat Trofi Piala Dunia 2010. Trofi yang diperoleh di “Benua Hitam” itu sekaligus mematahkan mitos bahwa Eropa hanya bisa juara di benuanya.**

**P**artai puncak perhelatan pesta sepakbola Piala Dunia 2010 yang berlangsung di Afrika Selatan 11 Juni-12 Juli lalu, mencatatkan sejarah baru. Untuk pertama kalinya, Spanyol berhasil tampil sebagai juara setelah mengalahkan Belanda 1-0 di final yang dilangsungkan di stadion Soccer City Stadium, Johannesburg. Spanyol mencatatkan diri sebagai negara kedelapan yang pernah menjadi juara sejak Piala Dunia diselenggarakan pada tahun 1930. Tujuh negara sebelumnya yang bergantian mengangkat trofi piala yakni Uruguay (2), Italia (4), Jerman (3), Brasil (5), Inggris (1), Argentina (2), dan Prancis (1).

Gol tunggal kemenangan Spanyol tercipta pada menit 116 atau empat menit sebelum pertandingan usai pada babak kedua pertambahan waktu, lewat tendangan Andres Iniesta. Belum lama sebelumnya, tim Belanda dipaksa bermain sepuluh pemain akibat dihukumnya John Heitinga dengan kartu kuning kedua

(kartu merah), yang memaksanya harus keluar lapangan. Hukuman itu sekaligus menjadi awal petaka bagi Giovanni van Bronckhors dan kawan-kawan, hingga tetinggal 1-0. Dan menguburkan impian Belanda untuk merengkuh sebagai juara dunia 2010 yang telah dinantikan sejak 32 tahun. Tim ‘orange’ sebelumnya pernah menjadi finalis pada tahun 1974, namun kalah dari Jerman Barat. Kemudian pada tahun 1978, namun kalah dari Argentina.

Spanyol yang kerap memperagakan teknik ‘taka tiki’, yang mempertontonkan sepabola indah, kompak, rapi dan terorganisir dalam setiap melakukan pergerakan, membuat Belanda sulit menembus pertahanan Spanyol. Penguasaan lini tengah dengan passing dinamis dan cerdas disertai terobosan kreatif, sekaligus menjadi ciri khas negeri Matador tersebut membuat tontonan jadi atraktif dan menarik. Belanda dalam pertandingan dibuat kesulitan sehingga kerap mengandalkan passing-passing jauh, untuk

mencegah Spanyol melakukan operan-operan pendek. Namun itu pun bisa dipatahkan Spanyol.

Belanda sebenarnya sempat diunggulkan karena dalam babak penyisihan grup meraih kemenangan sempurna dalam enam pertandingan. Namun keberuntungan sepertinya belum berpihak untuk lolos menjadi juara. Saat pertandingan antara Spanyol dan Belanda berlangsung, dua peluang yang dimiliki oleh Belanda tidak bisa maksimal dimanfaatkan. Yang menurut sang pelatih, Bert van Marwijk, bisa menghasilkan gol lewat aksi Arjen Robben yang tinggal berhadapan-hadapan dengan kiper Iker Casillas. Namun gagal dieksekusi dengan baik.

Berbeda dengan Spanyol, pada saat partai pembukaan awal sempat juga tersandung dan kalah dari Swiss 1-0. Namun evaluasi cepat yang dilakukan sang pelatih Vicente Del Bosque membuat tim yang dijuluki ‘Lam Furia Roja’ segera bangkit, hingga 2 pertandingan sisa dibabak fase pertama mereka memenangkan seluruhnya. Juara Eropa 2008 tersebut akhirnya mendapatkan tempat utama di final, setelah mereka berhasil mengalahkan Jerman 1-0. Mereka bertemu Belanda di final, yang sebelumnya

menang atas Uruguay (3-2). Uruguay merupakan satu-satunya perwakilan dari benua Amerika yang lolos ke semifinal setelah tim unggulan Argentina takluk di bawah Jerman (4-0) dan Brasil dikalahkan Belanda (1-2), di perdelapan final.

Keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010 ini menjadi bertambah istimewa, sebab sejak ikut berpartisipasi di Piala Dunia, ini adalah kali pertama bagi tim besutan Vicente Del Bosque itu mencapai final. Prestasi tertinggi yang pernah diraih hanya sebagai tim terbaik keempat di Piala Dunia 1950. Sebagai pelatih yang profesional, Vicente Del Bosque juga sedikit mengomentari permainan tim Belanda yang menurutnya juga bagus. "Belanda bermain bagus. Maksud saya, ini memang pertandingan keras, tetapi itu adalah bagian sepak bola. Saya pikir, di final ini kami melihat sepak bola menyerang. Kedua tim melakukan tekanan," kata Del Bosque.

Sukses yang diraih Spanyol kali ini, sekaligus menyamai rekor Jerman yang berhasil menyandingkan gelar juara Eropa dan Piala Dunia secara beruntun. Jerman merebut juara Piala Dunia 1974 setelah dua tahun sebelumnya menjadi kampiun Eropa. Spanyol sendiri datang ke Afrika Selatan dengan predikat juara Euro 2008 dan menjadi Juara Dunia 2010.

Meski Spanyol menjadi juara dunia, dilihat dari kolektifitas gol yang dihasilkan, di PD kali ini Spanyol hanya mampu mencetak delapan gol dari tujuh pertandingan, sekaligus merupakan jumlah gol termiskin yang dipegang oleh peraih juara dalam sejarah Piala Dunia. Rekor terburuk sebelumnya dipegang Italia dengan 11 gol di Piala Dunia 1938 (empat pertandingan), Inggris pada Piala Dunia 1966 (empat pertandingan) dan Brasil di Piala Dunia 1994 (tujuh pertandingan). Namun demikian, Spanyol menjadi tim pertama yang mampu memenangkan Piala Dunia setelah kalah pada pertandingan pembuka, yakni saat ditekuk Swiss.

Setelah Spanyol dan Belanda berbagi posisi. Jerman dalam perebutan juara ketiga, juga berhasil mengulang sukses kembali seperti Piala Dunia 2006 di negeri mereka sendiri. Tim yang diarsiteki Joachim Loew ini berhasil mengalahkan Uruguay dengan skor 3-2. Sementara Uruguay hanya puas di posisi empat,

belum bisa mengulang kembali sejarah untuk menjadi juara dunia ketiga kalinya setelah sebelumnya menjadi juara dunia pada tahun 1930 dan 1950.

Meski hanya di urutan keempat, sedikit untuk menghibur, salah satu pemain andalan Uruguay yang sudah malang melintang bermain di Benua Eropa, Diego Forlan, terpilih menjadi pemain terbaik Piala Dunia 2010. Mantan pemain Manchester United yang ikut mengantarkan Uruguay menjadi satu-satunya tim dari Benua Amerika masuk semifinal, ini mendapat dukungan 23,4 persen dalam pemilihan "Bola Emas" yang diselenggarakan FIFA yang juga melibatkan para pewarta. Ia mengalahkan saingannya Wesley Sneijder dari Belanda dan David Villa dari Spanyol, yang masing-masing berada di posisi dua dan tiga dengan dukungan 21,8 persen, dan 16,9 persen, walaupun sama-sama mencetak lima gol.

Sedangkan pemain muda terbaik jatuh ke tangan Thomas Mueller dari Jerman, yang juga mengumpulkan lima gol dan berhak atas 'Sepatu Emas'. Pria 20 tahun ini dinilai tampil sangat impresif dan melakukan tiga assist dalam mencetak gol sekaligus menjadi gol penentu. Jumlah assist tersebut mengungguli Forlan, Sneijder, dan David Villa.

Selain Forlan dan Thomas Mueller, pemain Spanyol Iker Casillas juga terpilih menjadi kiper terbaik. Mistar gawang yang dijaganya selama turnamen berlangsung, hanya kebobolan dua gol saat melawan Swiss dan Cili. Atas prestasi tersebut Iker Casillas berhak mendapatkan sarung tangan emas "Golden Gloves". Penyelamatan gemilang yang dilakukannya saat berhadapan dengan pemain Belanda Arjen Robben membuatnya pantas untuk mendapatkan sarung tangan emas tersebut. Selain itu, Spanyol juga mendapat satu tambahan gelar lagi, yakni sebagai tim Fair Play. Yang juga pernah didapatkan di PD 2006 Jerman, bersama Brasil. Kali ini Spanyol mendapatkan poin tertinggi, 889 poin berdasarkan sistem poin komite fair play FIFA.

Dengan keberhasilan Spanyol menjadi juara di Piala Dunia 2010, mereka juga berhak atas hadiah uang sebesar 30 juta dollar AS atau Rp 271 Miliar dari FIFA. Ditambah bonus dari Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF), sekitar 600.000 euro

atau Rp 7 miliar setiap pemain. Sedangkan Belanda yang di posisi runner up menerima hadiah uang sebesar 24 juta dollar AS atau Rp 216 miliar. Jerman di peringkat ketiga, 20 juta dollar AS atau Rp 180 miliar. Uruguay di tempat keempat, 18 juta dollar AS atau Rp 172 miliar.

Semua tim yang meramaikan turnamen ini juga mendapat hadiah FIFA. Brasil, Ghana, Paraguay, dan Argentina yang lolos ke perempat final mendapat 18 juta dollar atau Rp 162 miliar. Sedangkan yang lolos ke babak 16 besar seperti Inggris dan Portugal diberi kucuran dana US\$ 9 juta (Rp 81 miliar). Tak ketinggalan tim yang hanya mampu bertahan di penyisihan grup seperti Perancis dan Italia, juga mendapatkan US\$8 juta atau Rp 72 miliar.

Sementara itu, dari segi penyelenggaraan, Piala Dunia 2010 Afrika Selatan dianggap sukses dalam jumlah penonton. Meski jarak yang ditempuh cukup jauh, antusiasme penonton PD 2010 Afrika Selatan menjadi yang terbanyak ketiga setelah di Piala Dunia 1994 Amerika Serikat (3,59 juta) dan Jerman di Piala Dunia 2006 (3,36 juta) penonton. Jumlah penonton di Afrika Selatan untuk 61 pertandingan saja mencapai 2.997 juta dengan rata-rata penonton mencapai 49.134 orang per pertandingan. Pencapaian tersebut menurut juru bicara FIFA Nicolas Maingot, menggambarkan kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Namun, diperkirakan jumlahnya tidak melebihi jumlah penonton di AS dan Jerman.

Terkait dengan adanya anggapan selama ini bahwa tim-tim dari Benua Eropa hanya bisa menjadi juara di benuanya sendiri, maka dengan kemenangan Spanyol ini anggapan itu pun terpatahkan sejak dua finalis PD 2010 Afrika Selatan ini berasal dari benua Eropa (Spanyol dan Belanda) yang akhirnya dimenangkan oleh Spanyol.

Sementara itu, negara-negara dari Benua Amerika telah membuktikan diri bisa sebagai juara di luar benuanya. Brasil misalnya, pada tahun 1958 pernah memermalukan Swedia yang merupakan wakil dari Eropa. Demikian juga pada Piala Dunia 2002 di benua Asia, yakni saat Korea Selatan dan Jepang jadi tuan rumah, Brasil mengalahkan Jerman di final. ■ SAN

**Daftar tuan rumah dan juara Piala Dunia Dari masa ke masa:**

PD 1930 : Uruguay - Uruguay	PD 1966 : Inggris - Inggris	PD 1990 : Italia - Jerman Barat
PD 1934 : Italia - Italia	PD 1970 : Meksiko - Brasil	PD 1994 : Amerika Serikat - Brasil
PD 1938 : Perancis - Italia	PD 1974 : Jerman Barat - Jerman Barat	PD 1998 : Perancis - Prancis
PD 1950 : Brasil - Uruguay		PD 2002 : Korea Selatan & Jepang - Brasil
PD 1954 : Swiss - Jerman Barat	PD 1978 : Argentina - Argentina	PD 2006 : Jerman - Italia
PD 1958 : Swedia - Brasil	PD 1982 : Spanyol - Italia	PD 2010 : Afrika Selatan - Spanyol
PD 1962 : Cili - Brasil	PD 1986 : Meksiko - Argentina	

# Chris John Nyaris Gantung Sarung Tinju

Pertarungan Chris John melawan Fernando Saucedo diundur hingga November.

**P**erebutan gelar tinju kelas bulu WBA antara juara bertahan Chris John melawan penantanginya Fernando Saucedo yang berada di peringkat 15 sedianya dilakukan di Grand Ballroom Pacific Place Jakarta, 26 Juli 2010. Namun pertarungan tersebut diundur menjadi bulan November 2010 karena Chris John mengalami retak tulang iga saat melakukan latihan tanding.

Dalam jumpa pers di Hotel Ritz Carlton, Sudirman (15/7/2010), Chris John mengungkapkan cedera yang dialaminya awalnya dianggap hanya cedera biasa. Namun secara tidak sengaja pada 12 Juli, ketika sedang berlatih sepakbola untuk sekadar pemanasan, petinju kelahiran Banjarmasin ini mengerang kesakitan karena tulang rusuk kanannya tersenggol.

Dari pemeriksaan di RS Sahid Sahirman, diketahui bahwa rusuk kanannya mengalami retak. Ia pun diharuskan istirahat total selama enam minggu. "Sebenarnya saya masih berharap bisa bertanding, namun apa boleh buat saya disuruh harus istirahat," kata Chris John menje-

laskan yang dialaminya.

Melihat keadaan itu, istri Chris John, Anna Maria Megawati, dikabarkan sempat mengatakan bahwa pihak keluarga tidak akan mendukung pertarungan Chris John selanjutnya. Menurutny, meski Chris John sedang berada di puncak karier, tapi akan lebih terhormat meng-gantungkan sarung tinju sebelum kalah. Ia juga menyebut, dirinya tidak menginginkan suaminya itu menyesal setelah hal lebih buruk terjadi. "Sekarang ini yang mau dicari Chris John itu apa, dari sisi materi maupun prestasi sudah didapat, terus mau apa lagi," kata Anna.

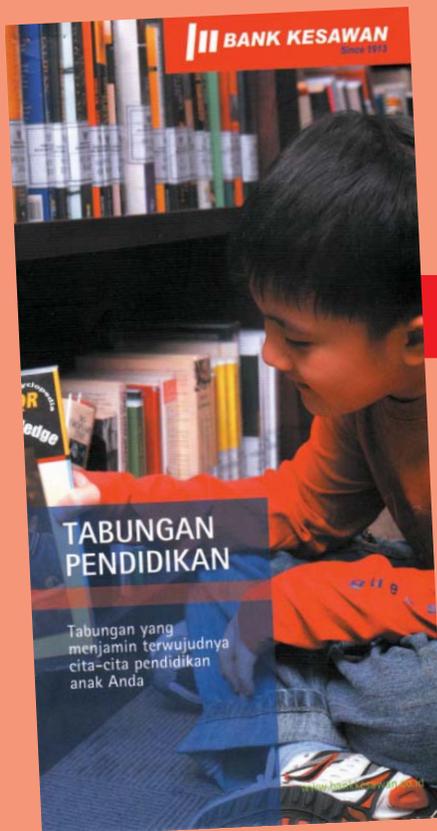
Seperti diketahui, "The Dragon", -julukan untuk Chris John- sudah mempertahankan gelarnya selama 12 kali. Lima kali merupakan *mandatory fight*, enam kali pertarungan pilihan (*choice*) dan sekali pertarungan ulang (*rematch*).

Menanggapi himbauan istrinya, Chris John sendiri mengatakan, itu hanya kekuatiran berlebih dari seorang istri kepada suami yang menggeluti olahraga berisiko tinggi seperti tinju. "Buat saya, yang me-



mang harus terjadi, ya terjadilah. Cedera memang sudah menjadi risiko olahraga tinju," katanya. Ia mengatakan akan terus bertinju dan hanya menunda pertarungan hingga kondisinya membaik. "Mudah-mudahan jika ada jalan yang baik, saya masih ingin terus berkarier. Saya ingin terus meraih yang terbaik bagi negara. Mudah-mudahan Tuhan memberkati," katanya.

Belakangan, Anna dikabarkan akhirnya melunak. Ia tidak ngotot lagi menolak keinginan suaminya melanjutkan karir di dunia tinju. Ia hanya menyarankan adanya perbaikan di tubuh manajemen Chris John. ■ **HB**



Guna melengkapi kebutuhan nasabah yang kian beragam dalam perencanaan biaya pendidikan, Bank Kesawan meluncurkan produk baru Tabungan Pendidikan. Penandatanganan MOU Kerjasama antara Bank Kesawan dengan Asuransi Mega Life di Jakarta tanggal 21 Juni 2008.

Business Director Bank Kesawan - Entjik S.Djafar menjelaskan, melalui Tabungan Pendidikan diharapkan nasabah dapat **merencanakan biaya pendidikan** anak lebih baik. Jangka waktu yang diberikan sangat fleksibel yaitu mulai dari **1 tahun sampai 20 tahun** dan usia penabung pada saat jatuh tempo adalah 65 tahun, dan setoran rutin setiap bulan besarnya **mulai dari Rp. 100.000,- atau kelipatannya dengan maksimum sampai dengan Rp5 juta**. Mudah melakukan setoran rutin karena secara otomatis Bank Kesawan akan mendebet rekening Tabungan atau Giro setiap bulannya.

## Bank Kesawan Luncurkan Tabungan Pendidikan

Selain kemudahan-kemudahan di atas, Tabungan Pendidikan Bank Kesawan juga memberikan perlindungan **asuransi jiwa**. Dalam hal ini apabila penabung meninggal dunia maka setoran rutin bulannya akan diteruskan oleh Asuransi Mega Life. Jika nasabah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap atau meninggal dunia maka ahli waris akan mendapatkan **santunan duka sebesar 250%** dari kumulatif saldo tabungan atau maksimum Rp500 juta, dan manfaat santunan rawat jalan/inap sebesar biaya rumah sakit atau maksimum 25% dari saldo Tabungan Pendidikan.

Sesuai dengan visi Bank Kesawan untuk menjadi Bank terdepan di kelasnya, kini lebih memantapkan posisi dalam kancah persaingan perbankan nasional. Hal ini didukung oleh 32 jaringan layanan yang tersebar di 10 kota di Indonesia dan ATM Kesawan yang siap untuk memberikan pelayanan selama 24 jam sehari serta **bebas biaya transaksi ATM** untuk info saldo, tarik tunai dan transfer antar rekening Bank Kesawan. Akses jaringan ATM Kesawan tersebar di lebih dari **12.000 mesin ATM** yang berlogokan ATM Bersama di seluruh Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai Tabungan Pendidikan Bank Kesawan, dapat menghubungi Customer Service kami yang terdekat di kota Anda:

JAKARTA: 021-350.8888; MEDAN: 061-415.2929; BANDUNG: 022-422.0618; SURABAYA: 031-568.7530; DENPASAR: 0361-233.777; PEKANBARU: 0761-33308; BATAM: 0778-456.112; TANJUNG BALAI: 0623-92688 dan PEMATANG SIANTAR: 0622-29666.



YAYASAN PESANTREN INDONESIA  
MA'HAD AL-ZAYTUN

Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia  
Telp. (0234) 742815, Fax. (0234) 742833



## Pernyataan Belasungkawa

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah berhamdalah kepada Allah Swt, dan bershalawat untuk Nabi Muhammad Saw, Keluarga Besar Al-Zaytun menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulanginya ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Swt

### Ibu Fira Beranata

usia 43 tahun, di Jakarta pada Kamis, 29 Juli 2010

Isteri Bapak Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA

إنا لله وإنا إليه راجعون

Kami semua berdo'a kepada Tuhan untuk beliau agar mendapatkan rahmat dan ampunan Ilahi, dan semoga keluarga besar yang ditinggalkan bersabar jua.

هذا والله يرعانا ويحفظنا والحمد لله رب العالمين

Al-Zaytun, 18 Rajab 1413 H (29 Juli 2010)

  
( A.S. Panji Gumintang )  
Syaykh Al-Zaytun



Al-Zaytun



KARSA



PARAMADINA

BUDHY MUNAWAR-RACHMAN

ENSIKLOPEDI

# Nurcholish Madjid

ENSIKLOPEDI

# Nurcholish Madjid

Disunting oleh:

BUDHY MUNAWAR RACHMAN



**Untuk Pemesanan  
Hubungi:**

**Mahad Al-Zaytun  
(0234) 742815**

**Majalah Berita Indonesia  
(021) 8292735**